

**PT PERTAMINA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1-3
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4-6
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	7-8
Laporan Arus Kas Konsolidasian	9-10
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	11-170
Informasi Keuangan Tambahan	171-179

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Nicke Widyawati
Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110
Telepon : 021 - 3815200
Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Emma Sri Martini
Alamat Kantor : Jl. Medan Merdeka Timur 1A
Jakarta 10110
Telepon : 021 - 3815400
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya ("Grup");
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 Mei 2020

Atas nama dan mewakili Direksi
PT Pertamina (Persero)



Nicke Widyawati
Direktur Utama

Emma Sri Martini
Direktur Keuangan

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01092/2.1032/AU.1/02/0684-5/1/V/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Pertamina (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01092/2.1032/AU.1/02/0684-5/1/V/2020 (lanjutan)

Opini


Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan

Informasi keuangan PT Pertamina (Persero) (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan rugi komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai suatu informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Drs. Hari Purwantono
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0684

22 Mei 2020

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	2g,2h,5	6.756.252	9.112.312
Kas yang dibatasi penggunaannya	2g,2h,6	182.129	108.915
Investasi jangka pendek	2h	392.584	225.199
Piutang usaha	2h,2i		
Pihak berelasi	2f,40a	1.554.094	1.297.651
Pihak ketiga	7a	1.892.058	1.933.455
Piutang Pemerintah - bagian lancar	2f,2h,2i,8	3.375.794	1.834.261
Piutang lain-lain	2h,2i		
Pihak berelasi	2f,40b	182.487	149.178
Pihak ketiga	7b	956.932	734.312
Persediaan	2j,9	5.893.332	6.323.165
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	2u,39a	1.361.726	820.598
Biaya dibayar di muka dan uang muka	2k	447.604	534.987
Investasi lainnya	2h,10	85.834	80.171
Jumlah Aset Lancar		23.080.826	23.154.204
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	2f,2h,2i,8	3.313.801	2.924.148
Aset pajak tangguhan	2u,39e	1.506.071	1.441.866
Penyertaan jangka panjang	2h,2m,11	2.973.879	2.819.054
Aset tetap	2n,2o,12	13.352.327	12.859.274
Aset minyak dan gas serta panas bumi	2o,2p,13	19.756.792	18.614.286
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	2u,39a	875.900	820.287
Aset tidak lancar lainnya	2h,14	2.226.812	2.085.333
Jumlah Aset Tidak Lancar		44.005.582	41.564.248
JUMLAH ASET		67.086.408	64.718.452

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	2h,15	1.270.052	4.347.035
Utang usaha	2h		
Pihak berelasi	2f,40c	73.304	78.781
Pihak ketiga	16	4.570.033	3.597.777
Utang Pemerintah - bagian lancar	2h,2f,17	940.413	1.207.743
Utang pajak	2u,39b		
Pajak penghasilan		199.380	467.605
Pajak lain-lain		302.942	258.405
Beban akrual	2h,18	2.798.681	2.135.509
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	2h,2o,19	573.726	420.577
Utang lain-lain	2h		
Pihak berelasi	2f,40d	74.459	54.011
Pihak ketiga		1.103.362	1.203.426
Pendapatan tangguhan - bagian lancar	2r	256.996	202.013
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		12.163.348	13.972.882
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	2h,17	796.029	795.082
Liabilitas pajak tangguhan	2u,39e	3.731.426	3.307.406
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	2h,2o,19	1.546.412	1.805.300
Utang obligasi	2h,20	12.614.493	11.094.096
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2s,21b	1.994.389	1.850.383
Provisi pembongkaran dan restorasi	2q,22	2.458.905	2.029.735
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar	2r	53.826	74.623
Utang jangka panjang lain-lain	2h	508.099	178.905
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		23.703.579	21.135.530
JUMLAH LIABILITAS		35.866.927	35.108.412

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar - 600.000.000 saham biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham;			
Ditempatkan dan disetor - 171.227.044 saham	24a	16.191.204	16.191.204
Tambahan modal disetor	24b	(924.296)	(924.296)
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	25	146.578	401.120
Komponen ekuitas lainnya		67.697	607.564
Saldo laba	26		
- Ditentukan penggunaannya		10.770.470	8.796.357
- Belum ditentukan penggunaannya		2.529.342	2.526.772
		<u>28.780.995</u>	<u>27.598.721</u>
Kepentingan non-pengendali	2c,23	2.438.486	2.011.319
JUMLAH EKUITAS		<u>31.219.481</u>	<u>29.610.040</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>67.086.408</u>	<u>64.718.452</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya:	2r		
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	27	43.783.510	44.742.511
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	28	4.875.075	5.632.468
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	29	3.628.904	3.636.953
Imbalan jasa pemasaran	40e	-	15.432
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	30	2.297.168	3.906.207
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA		54.584.657	57.933.571
Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya:	2r		
Beban pokok penjualan	2r,31	(39.559.658)	(42.787.916)
Beban produksi hulu dan <i>lifting</i>	2r,32	(4.999.734)	(4.386.516)
Beban eksplorasi	2r,33	(206.929)	(267.680)
Beban dari aktivitas operasi lainnya	2r,34	(1.741.689)	(1.271.977)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA		(46.508.010)	(48.714.089)
LABA BRUTO		8.076.647	9.219.482
Beban penjualan dan pemasaran	2r,35	(1.624.902)	(1.642.831)
Beban umum dan administrasi	2r,36	(1.553.620)	(1.329.911)
Laba selisih kurs, neto	2r,2t	289.430	19.622
Pendapatan keuangan	2r,37	1.221.380	256.573
Beban keuangan	2r,37	(965.290)	(835.238)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	2c,2r	80.322	122.724
Beban lain-lain, neto	2r,38	(642.988)	(80.825)
		(3.195.668)	(3.489.886)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		4.880.979	5.729.596
Beban pajak penghasilan, neto	2u,39c	(2.262.593)	(3.013.202)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITIES</i>		2.618.386	2.716.394

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN LABA <i>MERGING ENTITIES</i>		2.618.386	2.716.394
(RUGI) PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbangan pasti, neto	2s	(93.315)	228.498
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):			
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2c,2t	48.178	(79.561)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	2c,2m	(156.607)	(130.775)
Jumlah (rugi) penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak		(201.744)	18.162
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH DAMPAK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>MERGING ENTITIES</i>		2.416.642	2.734.556
Penyesuaian atas laba tahun berjalan <i>merging entities</i> :			
Pemilik entitas induk		-	(45.770)
Kepentingan non-pengendali	2c	-	(34.585)
		-	(80.355)
JUMLAH LABA TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN <i>MERGING ENTITIES</i> YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		2.529.342	2.526.772
Kepentingan non-pengendali	2c	89.044	109.267
		2.618.386	2.636.039

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
Penyesuaian penghasilan komprehensif tahun berjalan atas <i>merging entities</i> :			
Pemilik entitas induk		-	(42.546)
Kepentingan non-pengendali	2c	-	(32.682)
		<u>-</u>	<u>(75.228)</u>
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM DAMPAK PENYESUAIAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>MERGING ENTITIES</i> YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk		1.989.475	2.536.559
Kepentingan non-pengendali	2c	427.167	122.769
		<u>2.416.642</u>	<u>2.659.328</u>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk

Catatan	Komponen ekuitas lainnya										
	Modal saham ditempatkan dan disetor	Ekuitas <i>merging entites</i>	Tambahkan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
							Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017	13.417.047	1.804.579	2.736	1.361	(302.976)	790.675	6.871.101	2.540.195	25.124.718	1.888.549	27.013.267
Penyesuaian laba tahun berjalan <i>merging entites</i>	-	45.770	-	-	-	-	-	-	45.770	34.585	80.355
Penyesuaian penghasilan komprehensif tahun berjalan <i>merging entites</i>	-	(3.224)	-	-	-	-	-	-	(3.224)	(1.903)	(5.127)
Perubahan atas kepemilikan di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	4c,4j	-	-	-	-	13.710	-	-	13.710	68.814	82.524
Kapitalisasi uang muka untuk penerbitan saham	2.774.157	(1.847.125)	(927.032)	-	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	25b	-	-	399.759	-	-	-	-	399.759	-	399.759
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c,2t	-	-	-	(59.338)	-	-	-	(59.338)	(20.223)	(79.561)
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-	(69.138)	-	-	(69.138)	(61.637)	(130.775)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	2s	-	-	-	-	234.631	-	-	234.631	(6.133)	228.498
Pembagian dividen	2aa,26	-	-	-	-	-	-	(614.939)	(614.939)	-	(614.939)
Alokasi cadangan lain	26	-	-	-	-	-	1.925.256	(1.925.256)	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	2.526.772	2.526.772	109.267	2.636.039
Saldo 31 Desember 2018	16.191.204	-	(924.296)	401.120	(362.314)	969.878	8.796.357	2.526.772	27.598.721	2.011.319	29.610.040

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Distribusikan kepada pemilik entitas induk											
Catatan	Modal saham ditempatkan dan disetor	Ekuitas <i>merging entites</i>	Tambahkan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba		Jumlah	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
					Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditetapkan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Saldo 1 Januari 2019/ 31 Desember 2018	16.191.204	-	(924.296)	401.120	(362.314)	969.878	8.796.357	2.526.772	27.598.721	2.011.319	29.610.040
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	25b	-	-	(254.542)	-	-	-	-	(254.542)	-	(254.542)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2c,2t	-	-	-	16.388	-	-	-	16.388	31.790	48.178
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-	-	-	-	(452.733)	-	-	(452.733)	296.126	(156.607)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	2s	-	-	-	-	(103.522)	-	-	(103.522)	10.207	(93.315)
Pembagian dividen	2aa,26	-	-	-	-	-	-	(552.659)	(552.659)	-	(552.659)
Alokasi cadangan lain	26	-	-	-	-	-	1.974.113	(1.974.113)	-	-	-
Laba tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	2.529.342	2.529.342	89.044	2.618.386
Saldo 31 Desember 2019	16.191.204	-	(924.296)	146.578	(345.926)	413.623	10.770.470	2.529.342	28.780.995	2.438.486	31.219.481

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan		51.863.307	48.878.496
Penerimaan kas dari Pemerintah		7.195.147	7.805.648
Penerimaan kas dari restitusi pajak		82.958	185.016
Pembayaran kas kepada pemasok		(40.687.345)	(38.227.640)
Pembayaran kas kepada Pemerintah		(9.587.675)	(11.279.557)
Pembayaran pajak penghasilan badan		(2.451.894)	(2.688.175)
Pembayaran kas kepada pekerja dan manajemen (Penempatan pada)/penerimaan dari kas yang dibatasi penggunaannya		(1.923.899)	(1.640.855)
Penerimaan bunga		(47.011)	73.109
		47.145	63.327
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		4.490.733	3.169.369
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil dari pelepasan investasi jangka pendek		162.836	198.439
Penerimaan bunga dari investasi		5.841	13.784
Hasil penjualan aset tetap		1.255	176
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi dan ventura bersama		99.812	214.083
Pembelian aset tetap		(1.277.676)	(1.287.975)
Pembelian aset minyak dan gas serta panas bumi		(2.360.764)	(1.482.518)
Penempatan penyertaan jangka panjang		(290.286)	(1.062.244)
Penempatan investasi jangka pendek		(340.803)	(237.577)
Pembayaran aset eksplorasi dan evaluasi		(6.978)	(99.538)
Penerimaan dari/(penempatan pada) kas yang dibatasi penggunaannya		1.837	(22.614)
Akuisisi bisnis entitas anak, dikurangi kas yang diperoleh		8.467	-
Penerimaan kas dari aktivitas investasi lainnya		99.031	262.222
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi		(3.897.428)	(3.503.762)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PT PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	45	7.147.166	9.489.219
Penerimaan dari penerbitan obligasi	45	1.498.855	734.407
Penerimaan dari liabilitas jangka panjang	45	394.739	255.931
Pembayaran pinjaman jangka pendek	45	(10.254.978)	(5.583.278)
Pembayaran liabilitas jangka panjang	45	(524.558)	(465.351)
Pembayaran dividen	26,45	(563.106)	(585.755)
Pembayaran beban keuangan		(621.564)	(538.489)
Pembayaran obligasi	45	-	(37.649)
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya		(139.043)	(312)
Kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan		(3.062.489)	3.268.723
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(2.469.184)	2.934.330
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas		113.124	(231.845)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	5	9.112.312	6.409.827
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	5	6.756.252	9.112.312

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian integral dari laporan keuangan konsolidasian.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. PT Pertamina (Persero) (“Perusahaan”)

i. Profil Perusahaan

PT Pertamina (Persero) (“Perusahaan”) didirikan sesuai dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 20 tanggal 17 September 2003. Akta pendirian Perusahaan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003 dan melalui Surat Edaran No. 93 lampiran No. 11620 tanggal 21 November 2003. Pendirian Perusahaan didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tanggal 7 Maret 1995 tentang Perseroan Terbatas (“PT”), Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 12 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), dan PP No. 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003 tentang perubahan status Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Badan Usaha Milik Negara (“Persero”).

Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir diaktakan untuk menambah modal Perusahaan, dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 29 tertanggal 13 April 2018, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018.

Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003, seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan perjanjian-perjanjian antara Entitas Pertamina sebelumnya dan pihak ketiga, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, dialihkan ke Perusahaan. Sesuai PP No. 31 Tahun 2003, tujuan dari Perusahaan adalah untuk terlibat dalam kegiatan usaha minyak dan gas di pasar domestik maupun pasar luar negeri dan kegiatan bisnis terkait lainnya. Dalam menjalankan usahanya, tujuan Perusahaan adalah memperoleh pendapatan dan berkontribusi pada peningkatan ekonomi yang bermanfaat untuk rakyat Indonesia.

Pada tanggal pendirian Perusahaan, seluruh aktivitas minyak dan gas serta panas bumi entitas Pertamina sebelumnya, termasuk operasi bersama (*joint operations*) dengan perusahaan lain, dialihkan ke entitas anak Perusahaan. Seluruh karyawan entitas Pertamina sebelumnya menjadi karyawan Perusahaan.

ii. Kegiatan usaha dan alamat utama

Sesuai dengan Akta No. 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani S.H., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0008395.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, Perusahaan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi;
- b. Melaksanakan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi;
- c. Menyelenggarakan kegiatan di bidang energi listrik, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi energi panas bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTPB”), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (“PLTG”) dan energi listrik yang dihasilkan Perseroan;
- d. Melaksanakan kegiatan pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak (“BBM”), Bahan Bakar Khusus, Bahan Bakar Non-Minyak, Petrokimia, Bahan Bakar Diesel, Gas Alam Cair (“LNG”), dan Gas Cair (“GTL”) maupun produk-produk intermedia;
- e. Melaksanakan kegiatan penyediaan bahan baku, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*);

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) (“Perusahaan”) (lanjutan)

ii. Kegiatan usaha dan alamat utama (lanjutan)

- f. Melaksanakan kegiatan pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
- g. Melaksanakan kegiatan penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya untuk tujuan komersil;
- h. Melaksanakan kegiatan niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, BBM, Bahan Bakar Gas dan/atau hasil/produk lainnya, penyaluran gas bumi melalui pipa termasuk niaga energi listrik yang dihasilkan Perseroan; dan
- i. Melaksanakan kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi dan niaga energi baru dan terbarukan, *Coal Bed Methane* (“CBM”), Batu Bara Cair, Batu Bara Tergaskan (*Gasified Coal*), *Shale Gas*, *Shale Oil*, Bahan Bakar Nabati, Energi Surya, Energi Angin, dan Biomasa.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. *Trading house*, *real estate*, pergudangan, pariwisata, resor, olah raga dan rekreasi, *rest area*, rumah sakit, pendidikan, penelitian, prasarana, telekomunikasi, jasa penyewaan dan perusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan, jalan bebas hambatan (tol) dan pusat perbelanjaan/mall;
- b. Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus;
- c. Pengelolaan Kawasan Industri (*industrial complex*); dan
- d. Kegiatan usaha lainnya yang menunjang dan terkait usaha utama Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan menerima mandat dari Pemerintah terkait penugasan *Public Service Obligation* (“PSO”) untuk penyediaan BBM (Catatan 48j).

Perusahaan mempunyai aktivitas pengolahan yang meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah menjadi produk minyak dan produksi *Liquified Petroleum Gas* (“LPG”) dan petrokimia (*paraxylene* dan *propylene*). Perusahaan memiliki enam Unit Pengolahan (“UP”) dengan kapasitas pengolahan minyak mentah terpasang sebagai berikut:

UP	Kapasitas pengolahan minyak mentah terpasang (barrel/hari) (tidak diaudit)
UP II - Dumai dan Sungai Pakning, Riau	170.000
UP III - Plaju dan Sungai Gerong, Sumatera Selatan	118.000
UP IV - Cilacap, Jawa Tengah	348.000
UP V - Balikpapan, Kalimantan Timur	260.000
UP VI - Balongan, Jawa Barat	125.000
UP VII - Kasim, Papua Barat	10.000

Perusahaan, melalui entitas anaknya, juga melakukan beberapa kegiatan usaha seperti yang dijelaskan dalam Catatan 1b dan 43.

Alamat utama kantor pusat Perusahaan adalah Jl. Medan Merdeka Timur No. 1A, Jakarta, Indonesia.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) (“Perusahaan”) (lanjutan)

iii. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Komisaris Utama	Basuki Tjahaja Purnama ^{a,b}	Tanri Abeng ^a
Wakil Komisaris Utama	Budi Gunadi Sadikin ^b	Arcandra Tahar
Komisaris	Ego Syahril	Ego Syahril
Komisaris	Alexander Lay ^d	Alexander Lay ^d
Komisaris	Condro Kirono ^b	Ahmad Bambang
Komisaris	Isa Rachmatarwata ^c	Suahasil Nazara
Komisaris	-	Sahala Lumban Gaol

^a Komisaris Independen

^b Efektif sejak 23 Desember 2019 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-329/MBU/12/2019, menggantikan keputusan RUPS No. SK-282/MBU/11/2019 tanggal 22 November 2019

^c Efektif sejak 23 Desember 2019 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-327/MBU/12/2019

^d Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS No. SK-142/MBU/05/2018

Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Direktur Utama	Nicke Widyawati	Nicke Widyawati
Direktur Pemasaran Korporat	Basuki Trikora Putra	Basuki Trikora Putra
Direktur Pemasaran Ritel	Mas'ud Khamid	Mas'ud Khamid
Direktur Hulu	Dharmawan H. Samsu	Dharmawan H. Samsu
Direktur Keuangan	Emma Sri Martini ^a	Pahala N. Mansury
Direktur Sumber Daya Manusia	Koeshartanto	Koeshartanto
Direktur Logistik, Supply Chain, dan Infrastruktur	Mulyono ^b	Gandhi Sriwidodo
Direktur Pengolahan	Budi Santoso Syarif	Budi Santoso Syarif
Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia	Ignatius Tallulembang	Ignatius Tallulembang
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko	Heru Setiawan	Heru Setiawan
Direktur Manajemen Aset	M. Haryo Yudianto	M. Haryo Yudianto

^a Efektif sejak 22 November 2019 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-283/MBU/11/2019

^b Efektif sejak 26 Desember 2019 berdasarkan keputusan RUPS No. SK-336/MBU/12/2019

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. PT Pertamina (Persero) (“Perusahaan”) (lanjutan)

iii. Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan (lanjutan)

Susunan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ketua	Basuki Tjahaja Purnama ^a	Tanri Abeng
Wakil Ketua	Alexander Lay ^a	Sahala Lumban Gaol
Wakil Ketua	-	Ahmad Bambang
Anggota	Agus Yulianto	Agus Yulianto
Anggota	Bonar Lumban Tobing	Bonar Lumban Tobing

^a Efektif sejak 3 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/KPTS/K/DK/2019

iv. Jumlah karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Grup memiliki masing-masing sebanyak 32.449 dan 31.569 karyawan tetap (tidak diaudit).

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama

i. Entitas anak

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Group memiliki pengendalian secara langsung maupun tidak langsung, pada entitas anak sebagai berikut:

Entitas Anak	Tahun pendirian	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
		2019	2018	2019	2018
Eksplorasi dan produksi minyak dan gas					
1. PT Pertamina Hulu Energi	1990	100,00%	100,00%	5.156.691	4.531.667
2. PT Pertamina EP	2005	100,00%	100,00%	7.598.719	7.498.644
3. PT Pertamina EP Cepu	2005	100,00%	100,00%	3.557.976	2.992.894
4. Pertamina E&P Libya Limited, British Virgin Island	2005	100,00%	100,00%	154	154
5. PT Pertamina East Natuna	2012	100,00%	100,00%	129	129
6. PT Pertamina EP Cepu ADK	2013	100,00%	100,00%	12.743	12.847
7. PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	2013	100,00%	100,00%	6.049.260	5.841.041
8. ConocoPhillips Algeria Limited, Cayman Island (Efektif dilikuidasi pada tanggal 28 Februari 2019)	2013	-	100,00%	-	774.216
9. PT Pertamina Hulu Indonesia	2015	100,00%	100,00%	2.687.368	1.478.109
10. PT Pertamina Hulu Rokan (Catatan 4g)	2018	100,00%	100,00%	785.002	785.000
Eksplorasi dan produksi panas bumi					
11. PT Pertamina Geothermal Energy	2006	100,00%	100,00%	2.573.431	2.556.651
Jasa pengeboran minyak dan gas					
12. PT Pertamina Drilling Services Indonesia	2008	100,00%	100,00%	574.631	560.423
Jasa pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas, konstruksi dan perminyakan, teknologi informasi dan telekomunikasi					
13. PT Elnusa Tbk.	1969	41,10%	41,10%	489.536	390.995

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

i. Entitas anak (lanjutan)

Entitas Anak	Tahun pendirian	Persentase kepemilikan		Jumlah aset sebelum eliminasi	
		2019	2018	2019	2018
Perdagangan minyak dan gas bumi, transportasi gas, pemrosesan, distribusi dan penyimpanan minyak dan gas					
14. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (Catatan 4a)	2018	56,96%	56,96%	7.373.713	8.764.437
Ketenagalistrikan					
15. PT Pertamina Power Indonesia	2016	100,00%	100,00%	128.300	114.721
Jasa perdagangan dan aktivitas industri					
16. PT Pertamina Patra Niaga	1997	100,00%	100,00%	1.031.669	908.986
17. Pertamina International Timor S.A	2015	95,00%	95,00%	43.356	36.643
Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ("SPBU")					
18. PT Pertamina Retail	1997	100,00%	100,00%	269.469	203.312
Pengolahan dan pemasaran pelumas					
19. PT Pertamina Lubricants	2013	100,00%	100,00%	498.008	413.332
Perkapalan					
20. PT Pertamina Trans Kontinental	1969	100,00%	100,00%	340.517	307.519
21. PT Pertamina International Shipping	2016	100,00%	100,00%	419.060	296.335
Jasa pengangkutan udara					
22. PT Pelita Air Service	1970	100,00%	100,00%	63.365	60.380
Manajemen investasi					
23. PT Pertamina Pedeve Indonesia	2002	100,00%	100,00%	62.715	62.098
Jasa pengembangan sumber daya manusia					
24. PT Pertamina Training & Consulting	1999	100,00%	100,00%	50.402	39.799
Sewa perkantoran, perumahan dan hotel					
25. PT Patra Jasa	1975	100,00%	100,00%	308.519	236.119
Jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit					
26. PT Pertamina Bina Medika IHC (dahulu PT Pertamina Bina Medika)	1997	100,00%	100,00%	113.735	105.743
Jasa asuransi					
27. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. ("ATPI") (Catatan 4j)	1981	58,50%	58,50%	1.249.846	923.376
Kilang Pengolahan					
28. PT Kilang Pertamina Internasional	2017	100,00%	100,00%	141.432	1.836
Liquified Natural Gas ("LNG") regasification					
29. PT Nusantara Regas ("Regas") (Catatan 4b)	2010	82,78%	82,78%	275.767	240.817
Bisnis Bunker & Logistik dan Penjualan & Distribusi					
30. Pertamina International Marketing and Distribution Pte. Ltd. (Catatan 4l)	2019	100%	-	121.617	-

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

ii. Entitas asosiasi

Entitas asosiasi dengan kepemilikan langsung pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Entitas asosiasi	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	Jasa pemasaran
2. PT Trans Pacific Petrochemical Indotama ("TPPI")	37,65%*	Jasa pengolahan dan penjualan hasil olahan minyak dan gas
3. PT Tuban Petrochemical Industries ("Tuban Petro")	51,00%	Perdagangan umum, industri dan jasa

*) Belum termasuk kepemilikan tidak langsung melalui Tuban Petro sebesar 21,73%

Entitas asosiasi dengan kepemilikan tidak langsung pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Entitas asosiasi	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PT Donggi Senoro LNG	29,00%	Pengolahan LNG
2. PT Asuransi Samsung Tugu	30,00%	Asuransi
3. Seplat Petroleum Development Company Plc., ("Seplat") Nigeria	20,46%	Eksplorasi dan produksi minyak dan gas
4. PT Gas Energi Jambi	40,00%	Transportasi dan distribusi gas bumi

Pada tanggal 18 November 2019, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pembelian Saham Baru Tuban Petro untuk membeli sebanyak 190.372 lembar saham seri B. Akuisisi ini membuat Perusahaan memiliki 51% saham Tuban Petro, dengan pembelian saham ini, kepemilikan efektif Perusahaan atas TPPI berubah menjadi 61,12% (Catatan 4m).

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPPI melakukan penerbitan saham baru sebanyak 4.350 ribu lembar saham yang menyebabkan persentase kepemilikan efektif Perusahaan atas TPPI berubah menjadi 59,38% (Catatan 4o).

iii. Pengaturan bersama

Ventura bersama dengan kepemilikan tidak langsung pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Ventura bersama	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. PT Patra SK	35,00%	Pengolahan Lube Base Oil (LBO)
2. PT Perta-Samtan Gas	66,00%	Pengolahan LNG
3. PT Perta Daya Gas	65,00%	Regasifikasi LNG
4. PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia ("PRPP")	55,00%	Pengembangan kilang minyak bumi dan petrokimia
5. PT Transportasi Gas Indonesia ("Transgasindo")	59,87%	Transportasi gas bumi melalui jaringan pipa transmisi
6. PT Permata Karya Jasa ("Perkasa")	60,00%	Jasa perbengkelan, pembinaan, and penyaluran tenaga kerja

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Entitas anak, entitas asosiasi dan pengaturan bersama (lanjutan)

iii. Pengaturan bersama (lanjutan)

Grup menganggap keberadaan hak keikutsertaan substantif dari pemegang saham non-pengendali PT Perta-Samtan Gas, PT Perta Daya Gas dan PRPP menyebabkan pemegang saham tersebut memiliki pengendalian bersama atas kebijakan keuangan dan operasional yang penting. Dengan pertimbangan hak yang dimiliki pemegang saham non-pengendali tersebut, Grup tidak memiliki pengendalian atas kebijakan keuangan dan operasional penting di PT Perta-Samtan Gas, PT Perta Daya Gas dan PRPP meskipun Grup memiliki kepemilikan saham lebih dari 50%.

Tanggal 11 April 2018, Perusahaan memiliki kendali atas Regas. Sebelumnya, Perusahaan mengakui investasi pada Regas sebagai investasi ventura bersama (Catatan 4b).

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki operasi bersama dengan kepemilikan tidak langsung adalah sebagai berikut:

Operasi bersama	Persentase kepemilikan	Kegiatan usaha
1. Natuna 2 B.V., Belanda	50,00%	Eksplorasi dan produksi

Perusahaan mengklasifikasikan investasi pada PT Badak Natural Gas Liquefaction ("Badak NGL") sebagai investasi aset keuangan tersedia untuk dijual pada harga perolehan karena secara substansi Perusahaan tidak memiliki pengendalian pada Badak NGL sebab operasinya dikendalikan oleh para produsen gas bumi. Investasi ini diukur dengan menggunakan harga perolehan karena nilai wajarnya tidak dapat untuk diukur secara handal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Grup sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"). Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 oleh Grup.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dan dasar pengukuran dengan menggunakan harga historis, kecuali beberapa akun tertentu yang dicatat berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dan mengklasifikasikan arus kas menjadi kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat (US\$ atau Dolar AS), mata uang fungsional Grup, kecuali dinyatakan lain.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

i. Penerapan dari standar dan interpretasi baru/revisi berikut, tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan efek material terhadap laporan keuangan konsolidasian

Standar baru, revisi terhadap standar yang telah ada dan interpretasi berikut ini, telah diterbitkan dan wajib untuk diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku Grup yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019 atau periode setelahnya. Grup telah mengadopsinya tetapi tidak ada dampak signifikan terhadap bisnis Grup saat ini.

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka dalam Mata Uang Asing
- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- PSAK 22 (Penyesuaian 2018): Kombinasi Bisnis
- PSAK 26 (Penyesuaian 2018): Biaya Pinjaman
- PSAK 46 (Penyesuaian 2018): Pajak Penghasilan
- PSAK 66 (Penyesuaian 2018): Pengaturan Bersama

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif

Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Berlaku efektif 1 Januari 2020

- Amendemen PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, yang mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi, yang merupakan amendemen lanjutan dikarenakan oleh penerbitan PSAK 71. Standar yang diamendemen memberikan petunjuk bagi entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi, terutama perusahaan asuransi, tentang bagaimana menerapkan PSAK 71. PSAK 62 mengizinkan suatu entitas yang memenuhi kriteria tertentu untuk menerapkan pengecualian sementara dari PSAK 71 (*deferral approach*) atau memilih untuk menerapkan pendekatan berlapis (*overlay approach*) untuk aset keuangan yang ditetapkan.
- PSAK 71: Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengadopsi PSAK 71 "Instrumen Keuangan" yang secara efektif akan menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". PSAK 71 membahas klasifikasi, pengukuran dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas keuangan, memperkenalkan aturan baru untuk akuntansi lindung nilai dan model penurunan nilai baru untuk aset keuangan. PSAK 71 berlaku sejak 1 Januari 2020 di mana adopsi dini diizinkan. Selain akuntansi lindung nilai, penerapan standar ini harus dilakukan secara retrospektif dengan tidak memerlukan penyajian kembali informasi komparatif.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

- PSAK 71: (lanjutan)

Mengenai penurunan nilai untuk aset keuangan yang dimiliki oleh Perusahaan, model penurunan nilai dalam PSAK 71 mensyaratkan pengakuan atas cadangan penurunan nilai berdasarkan perkiraan kerugian pinjaman dibandingkan dengan kerugian kredit aktual dalam PSAK 55. Hal ini berlaku untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai biaya amortisasi, instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, kontrak aset dalam PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak Pelanggan", piutang sewa guna usaha, komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan tertentu. Grup masih dalam proses menghitung dampak penyesuaian untuk penurunan nilai. Kuantum atau jumlah penurunan nilai tambahan yang perlu dicatat oleh Grup belum dapat ditentukan karena memerlukan informasi yang cukup tentang tanggal adopsi PSAK 71 pada 1 Januari 2020.

Standar baru ini juga memperluas persyaratan pengungkapan dan perubahan dalam presentasi. Hal ini diharapkan mengubah sifat dan batasan pengungkapan instrumen keuangan Grup, terutama pada tahun penerapan standar baru.

- PSAK 72: merupakan standar baru yang menyediakan kerangka kerja komprehensif terkait dengan penentuan bagaimana pendapatan harus diakui, waktu pengakuan pendapatan, dan jumlah yang harus diakui oleh Grup. Standar ini memperkenalkan model tunggal yang digunakan dalam mencatat pendapatan dengan pelanggan, yang disebut model lima langkah (Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan, Identifikasi Kewajiban Implementasi, Menentukan Harga Transaksi, Alokasi Harga Transaksi, dan Pengakuan Pendapatan), yang harus diterapkan di semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memperkenalkan beberapa konsep baru seperti perlakuan akuntansi terkait dengan modifikasi kontrak dan kapitalisasi biaya yang terkait dengan kontrak dengan pelanggan.

PSAK 72 secara efektif akan menggantikan semua standar saat ini yang berkaitan dengan pendapatan; yaitu PSAK 23 "Pendapatan", PSAK 34 "Kontrak Konstruksi", PSAK 44 "Akuntansi untuk Aktivitas Pengembangan Real Estat", dan ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan". PSAK 72 berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 dengan aplikasi dini diizinkan.

Ada dua metode alternatif yang dapat digunakan Grup dalam proses transisi PSAK 72. Metode pertama, standar ini diperbolehkan secara retrospektif pada kontrak dengan pelanggan yang ada di setiap periode yang disajikan dalam laporan keuangan. Metode kedua, Grup diizinkan untuk menggunakan metode modifikasi retrospektif yang mana PSAK 72 hanya akan diterapkan untuk transaksi setelah 1 Januari 2020 dengan dampak kumulatif pada penerapan awal akan dicatat sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal (untuk komponen ekuitas lainnya, yang sesuai) pada 1 Januari 2020.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

ii. Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif (lanjutan)

Berlaku efektif 1 Januari 2020 (lanjutan)

- PSAK 73: memberikan model komprehensif untuk mengidentifikasi kontrak sewa maupun perlakuan akuntansi atas transaksi sewa sebagai *lessee* atau *lessor*. PSAK 73 menekankan pentingnya pengendalian dalam identifikasi kontrak sewa yang mana faktor-faktor yang membedakan kontrak sewa dan kontrak jasa bergantung pada pihak mana yang memiliki kendali atas identifikasi aset. Jika pelanggan memiliki kendali atas identifikasi aset, kontrak memenuhi definisi sewa dalam PSAK 73.

PSAK 73 secara efektif akan menggantikan beberapa standar dan interpretasi, yaitu: PSAK 30 "Sewa", ISAK 8 "Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa", ISAK 23 "Sewa Insentif Operasi", ISAK 24 "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa", dan ISAK 25 " Hak Atas Tanah ". PSAK 73 akan berlaku mulai 1 Januari 2020. Penerapan dini PSAK 73 diizinkan sejak Grup menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak Dengan Pelanggan" pada atau sebelum tanggal adopsi awal PSAK 73.

Penerapan PSAK 73 akan berdampak pada hampir semua sewa yang diakui dalam laporan posisi keuangan, di mana standar ini menghilangkan perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan. Biaya sewa operasi dalam PSAK 73, akan dikapitalisasi sebagai aset (atau hak pakai untuk barang sewaan) dan liabilitas keuangan yang mencerminkan komitmen pembayaran sewa masa depan setelah mempertimbangkan dampak diskon dan panduan praktis yang akan digunakan oleh Grup. Pengecualian untuk perlakuan ini hanya untuk sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah. Penyewa diharuskan untuk mengakui dan menyajikan secara terpisah biaya bunga yang timbul dari kewajiban sewa guna usaha dengan biaya penyusutan hak sewa.

Perlakuan akuntansi untuk *lessor* tidak akan berbeda secara signifikan.

- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif yang mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga.
- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan yang mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait.

Pada tahap ini, kuantum atau besarnya dampak penyesuaian yang harus dibukukan Grup belum ditentukan. Grup akan melakukan tinjauan yang lebih mendalam tentang dampaknya pada periode dua belas bulan ke depan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup. Grup mengendalikan suatu entitas ketika Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas itu.

Grup menilai kembali apakah masih mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas Entitas Anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup pada Entitas Anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian Grup pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada Entitas Anak, maka Grup menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, Kepentingan Non-pengendali ("KNP") dan komponen ekuitas lainnya serta mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian. Saldo investasi yang masih dimiliki diakui pada nilai wajarnya.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Jika anggota Grup menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan atas laporan keuangannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang signifikan antara Perusahaan dengan Entitas Anak telah dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil dari operasi Grup sebagai satu kesatuan bisnis.

KNP merupakan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang diatribusikan kepada kepemilikan atas ekuitas yang secara langsung atau tidak langsung tidak dimiliki oleh Perusahaan, yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan sebagai ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas Induk dari Grup dan KNP, meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Untuk tujuan konsolidasi entitas anak yang menggunakan mata uang selain dari Dolar AS sebagai mata uang fungsional, aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode pelaporan. Di sisi lain, pendapatan dan beban dijabarkan menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia ketika periode laba rugi.

Perbedaan yang muncul dari penjabaran laporan keuangan entitas anak tersebut ke dalam Dolar AS disajikan sebagai akun "Pendapatan komprehensif lainnya-selisih dari penjabaran mata uang selain Dolar AS" sebagai bagian komponen ekuitas lainnya dalam laporan posisi keuangan konsolidasian bagian ekuitas.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi bisnis

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 22 (Revisi 2015). Biaya perolehan dari suatu akuisisi diukur dari nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan dicatat dalam "Beban Penjualan, Umum dan Administrasi".

Ketika Grup melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk pemisahan atas derivatif yang melekat pada kontrak utama oleh pihak yang diakuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepemilikan atas ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang terjadi dalam laba rugi.

Imbalan kontinjensi yang akan dibayarkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar atas imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas, akan diakui dalam laporan laba rugi atau sebagai pendapatan komprehensif lain sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014). Jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, imbalan kontinjensinya tidak diukur kembali sampai penyelesaian terakhir dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, pertama kali *goodwill* diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dibayarkan dan jumlah yang diakui untuk KNP dibandingkan dengan jumlah dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diperoleh. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto Entitas Anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, setiap akhir periode *goodwill* akan diuji penurunan nilai.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai, jika ada. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis dialokasikan sejak tanggal akuisisi kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan memperoleh manfaat dari kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang mengakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu dalam UPK tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terasosiasi dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan operasi. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi UPK yang ditahan.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2015), apabila proses akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi terjadi, Grup melaporkan jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Grup menyesuaikan secara retrospektif jumlah sementara yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui telah berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Kombinasi bisnis entitas sependali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sependali, dalam bentuk transfer bisnis dalam bentuk reorganisasi entitas dalam grup yang sama dalam substansi ekonomi bukan merupakan perubahan kepemilikan, oleh karena itu, transaksi tersebut tidak akan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi grup sebagai induk maupun entitas individu dalam grup yang sama sehingga transaksi dicatat menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of-interests method*).

Entitas yang melepas dan menerima bisnis mencatat perbedaan antara imbalan diterima/ditransfer dan bisnis dilepas/jumlah tercatat seluruh transaksi kombinasi bisnis dalam ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor" (*Additional Paid-in Capital*).

Dalam penerapan metode *pooling-of-interests*, komponen laporan keuangan pada periode di mana kombinasi bisnis terjadi dan untuk periode lain yang disajikan sebagai pembandingan, disajikan seolah-olah kombinasi bisnis terjadi sejak awal periode di mana entitas-entitas tersebut ada dalam satu pengendali.

f. Transaksi-transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai PSAK 7 (Revisi 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas termasuk kas, bank dan semua deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk tujuan penyusunan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas disajikan setelah dikurangi cerukan.

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan sebagai Kas yang dibatasi penggunaannya dan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian disajikan dalam Aset tidak lancar lainnya dan disajikan sebagai bagian dari Aset Tidak Lancar.

h. Instrumen keuangan

i. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif. Pengklasifikasian ini tergantung pada hakekat dan tujuan aset keuangan diperoleh dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

Aset keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diakui pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan

Pengukuran setelah pengakuan awal atas aset keuangan bergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

- i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.
- iii. Aset keuangan tersedia untuk dijual
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan dalam dua kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.
- iv. Investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo
Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap, dan liabilitas tetap dan liabilitas jatuh tempo diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo ketika Grup memiliki niat dan kemampuan positif untuk mempertahankannya hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Amortisasi SBE diakui sebagai pendapatan keuangan dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul karena penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi sebagai beban keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau suatu kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Kriteria yang digunakan Grup untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi:

- i. debitur gagal membayar atau menunggak pembayaran;
- ii. kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur;
- iii. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- iv. pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan kepada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- v. terdapat kemungkinan besar bahwa debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- vi. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kriteria yang digunakan Grup untuk menentukan bahwa ada bukti objektif dari suatu penurunan nilai meliputi: (lanjutan)

vii. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi ke aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk antara lain:

1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
2. kondisi ekonomi lokal dan nasional yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebesar selisih nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto dengan menggunakan SBE awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi, baik secara langsung maupun menggunakan pos provisi. Jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui akan dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos provisinya. Jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan jumlahnya tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan dilakukan seandainya tidak ada penurunan nilai.

Aset yang tersedia untuk dijual

Ketika penurunan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual telah diakui secara langsung dalam ekuitas dan aset tersebut mengalami penurunan nilai yang signifikan dan dalam jangka panjang atau terdapat bukti yang objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui secara langsung dalam ekuitas harus dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi.

Kerugian penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang telah diakui pada laporan laba rugi tidak dapat dipulihkan melalui laporan laba rugi. Kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui di OCI.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- (i) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

i. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila: (lanjutan)

- (ii) Grup telah mengalihkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya yang tidak tersedia untuk diperdagangkan atau tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan lainnya meliputi pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang Pemerintah, beban akrual, liabilitas jangka panjang, utang lain-lain, utang obligasi dan utang jangka panjang lain-lain.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran liabilitas keuangan tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Liabilitas derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya akrual bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Penghentian pengakuan

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Metode SBE

Metode SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

iii. Saling hapus antar instrumen keuangan, transaksi derivatif dan akuntansi lindung nilai

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disajikan secara saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

iv. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan kontrak *forward* dan *option* mata uang asing untuk melakukan lindung nilai atas risiko mata uang asing. Instrumen keuangan tersebut pada awalnya diakui sebesar nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif dimulai dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan saat nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan saat nilai wajarnya negatif.

Perusahaan mempunyai kontrak *forward* dan *option* antar mata uang yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan dalam arus kas sehubungan dengan perubahan nilai tukar mata uang asing. Kontrak *forward* dan *option* tersebut tidak memenuhi persyaratan akuntansi lindung nilai.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Piutang

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

j. Persediaan

Persediaan minyak mentah, gas dan produk minyak dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.

Biaya perolehan ditentukan berdasarkan metode rata-rata dan termasuk semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang terjadi untuk membawa persediaan ke tempat dan kondisi saat ini.

Nilai realisasi neto untuk produk BBM bersubsidi adalah berdasarkan nilai terendah antara harga ketetapan dan harga formula untuk bulan berikutnya.

Nilai realisasi neto untuk produk LPG tabung 3 kg adalah harga kontrak LPG Aramco ditambah biaya distribusi dan margin (*alpha*) dikurangi dengan estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk melakukan penjualan.

Persediaan material seperti suku cadang, bahan kimia dan sebagainya, dicatat berdasarkan metode rata-rata. Persediaan material tidak termasuk persediaan usang, tidak terpakai dan lambat pergerakannya yang disajikan dalam akun Aset lain-lain dan menjadi bagian dari Aset Tidak Lancar.

Penyisihan penurunan nilai persediaan usang, tidak terpakai dan lambat pergerakannya dilakukan berdasarkan analisis manajemen terhadap kondisi material tersebut pada akhir tahun.

k. Biaya dibayar di muka dan uang muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode manfaat masing-masing biaya.

l. Aset dimiliki untuk didistribusikan kepada Perusahaan

Aset dimiliki untuk didistribusikan kepada Perusahaan dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

m. Penyertaan jangka panjang

i. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Penyertaan jangka panjang (lanjutan)

i. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama (lanjutan)

Ventura bersama adalah jenis pengaturan bersama dimana pihak-pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak atas aset bersih ventura bersama tersebut. Pengendalian bersama adalah pembagian pengendalian yang disetujui secara kontrak dari suatu perjanjian, yang hanya ada bila keputusan tentang kegiatan yang relevan memerlukan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang memiliki pengendalian bersama.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan atau pengendalian bersama adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian atas anak entitas. Investasi Kelompok Usaha pada entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Kelompok Usaha atas aset bersih entitas asosiasi atau ventura bersama sejak tanggal akuisisi. Goodwill sehubungan dengan entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam nilai tercatat investasi dan tidak diuji untuk penurunan nilai secara terpisah.

Laporan laba rugi mencerminkan bagian Grup atas hasil usaha entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap perubahan pendapatan komprehensif Grup lainnya ("OCI") dari *investee* tersebut disajikan sebagai bagian dari OCI. Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keseluruhan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada laba rugi di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan Kepentingan non-pengendali pada anak entitas asosiasi atau ventura bersama Laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Grup. Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan untuk menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan Grup.

ii. Properti investasi

Properti investasi terdiri dari tanah dan bangunan yang dikuasai Grup untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal.

Properti investasi diukur dengan menggunakan metode biaya, yang dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya penggantian bagian properti investasi, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya operasi penggunaan properti tersebut.

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berkisar antara 10 (sepuluh) sampai 25 (duapuluh lima) tahun yang merupakan estimasi umur manfaat ekonomisnya.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Penyertaan jangka panjang (lanjutan)

ii. Properti investasi (lanjutan)

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut ditarik secara permanen dari penggunaan dan tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan atau pelepasan tersebut.

Transfer ke properti investasi dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemiliknya atau dimulainya sewa operasi ke pihak lain. Transfer dari properti investasi juga dilakukan jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik.

Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

n. Aset tetap

Pemilikan langsung

Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya, kecuali tanah, dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Grup mengakui biaya perbaikan dan pemeliharaan yang bersifat signifikan sebagai aset tetap. Nilai tercatat yang terkait dengan komponen yang diganti tidak diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan lainnya dibebankan dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, biaya-biaya tersebut tidak disusutkan. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	5-25
Kilang	10-20
Bangunan	5-25
Kapal laut dan pesawat terbang	6-25
Harta benda modal ("HBM") bergerak	5-20
Biaya perbaikan dan pemeliharaan signifikan	3

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun buku, nilai sisa, umur manfaat dan metode penyusutan aset ditinjau ulang dan disesuaikan secara prospektif sebagaimana mestinya.

Apabila suatu aset tetap sudah tidak digunakan atau dijual, nilai tercatatnya dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi.

Aset dalam penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan dan akuisisi aset tetap dan biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pembangunan selesai.

o. Sewa

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Grup sebagai Lessee

- i. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar yang lebih kecil nilai wajar aset sewaan dan nilai kini pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung dalam laporan laba rugi.
- ii. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa diakui pada laporan laba rugi dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

Grup sebagai Lessor

Sewa dimana grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi

i. Aset eksplorasi dan evaluasi

Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas serta panas bumi dicatat dengan menggunakan metode akuntansi *successful efforts*. Biaya-biaya yang terjadi diakumulasikan berdasarkan lapangan per lapangan.

Biaya geologi dan geofisika dibebankan pada saat terjadi.

Biaya-biaya untuk memperoleh hak eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dicatat sebagai biaya perolehan aset yang belum terbukti jika cadangan terbukti belum ditemukan, atau sebagai biaya perolehan aset terbukti bila cadangan terbukti telah ditemukan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi (lanjutan)

i. Aset eksplorasi dan evaluasi (lanjutan)

Biaya-biaya pengeboran sumur eksplorasi dan biaya-biaya pengeboran-sumur tes stratigrafi, dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian - sumur eksplorasi dan evaluasi, di dalam aset minyak dan gas bumi hingga ditentukan apakah sumur tersebut menemukan cadangan terbukti. Jika sumur tersebut tidak menemukan cadangan terbukti, biaya pengeboran sumur yang telah dikapitalisasi akan dibebankan ke dalam laporan laba rugi sebagai beban sumur kering (*dry hole*).

Selanjutnya, aset eksplorasi dan evaluasi yang cadangannya secara komersial telah terbukti akan direklasifikasi menjadi aset pengembangan. Aset eksplorasi dan evaluasi diuji penurunan nilai sebelum direklasifikasi keluar dari aset eksplorasi dan evaluasi.

ii. Aset pengembangan

Biaya-biaya pengeboran sumur dalam pengembangan termasuk biaya pengeboran sumur pengembangan yang tidak menghasilkan dan sumur pengembangan stratigrafi dikapitalisasi sebagai bagian dari aset dalam penyelesaian sumur pengembangan hingga proses pengeboran selesai. Pada saat pengembangan sumur telah selesai pada lapangan tertentu, maka sumur tersebut akan ditransfer sebagai sumur produksi.

iii. Aset produksi

Aset produksi merupakan agregasi aset eksplorasi dan evaluasi yang cadangannya secara komersial telah terbukti dan pengeluaran pengembangan yang berhubungan dengan sumur berproduksi. Aset produksi didepresiasi menggunakan metode unit produksi berdasarkan cadangan terbukti yang telah dikembangkan sejak dimulainya produksi komersialnya dari masing-masing lapangan.

iv. Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya

Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis atau masa Kontrak Kerja Sama ("KKS") yang relevan, mana yang lebih rendah, sebagai berikut:

	Tahun
Instalasi	3-30
Pabrik LPG	10-20
Bangunan	5-30
HBM bergerak	2-27
Sumur panas bumi	10-20

Tanah dan hak atas tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah minimal setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal aset diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

p. Aset minyak dan gas serta panas bumi (lanjutan)

iv. Aset minyak dan gas serta panas bumi lainnya (lanjutan)

Akumulasi biaya atas pembangunan, instalasi, atau penyelesaian bangunan, pabrik dan fasilitas infrastruktur seperti anjungan dan saluran pipa dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya-biaya ini direklasifikasi ke aset tetap yang relevan pada saat pembangunan atau instalasinya telah siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat tersebut.

v. Hak kepemilikan atas operasi unitisasi

Aset bersama adalah aset dimana setiap pihak mempunyai hak dan kepemilikan bersama. Setiap pihak memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan bagian dari aset dan manfaat ekonomis yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Pada unitisasi, operator dan non-operator mempersatukan aset mereka di dalam satu lapangan produksi untuk membentuk satu unit produksi dan sebagai imbalan menerima kepemilikan di dalam unit tersebut. Dengan demikian, operasi unitisasi adalah perjanjian pengendalian bersama aset setiap liabilitas yang terjadi, bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama dengan pihak lain yang berkaitan dengan perjanjian bersama, setiap penghasilan dari penjualan atau penggunaan bagiannya atas output ventura bersama, bersama dengan bagiannya atas beban yang terjadi pada ventura bersama. Apabila Grup sebagai operator, Grup akan mengakui piutang dari pihak non-operator (sebesar porsi pihak non-operator atas beban dan pengeluaran modal yang ditanggung oleh operator); jika sebaliknya, Grup akan mengakui utang kepada operator.

q. Provisi pembongkaran dan restorasi

Provisi pembongkaran dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum berkaitan dengan penarikan aset minyak dan gas bumi termasuk fasilitas produksi yang berasal dari akuisisi, konstruksi atau pengembangan dan/atau operasi normal dari aset tersebut. Penarikan aset tersebut ini, termasuk penjualan, peninggalan, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain, adalah penarikan selain penghentian sementara pemakaian.

Kewajiban ini diakui sebagai liabilitas pada saat timbulnya kewajiban konstruktif yang berkaitan dengan penarikan sebuah aset. Biaya penarikan aset dalam jumlah yang setara dengan jumlah liabilitas dikapitalisasi sebagai bagian dari suatu aset tertentu dan kemudian disusutkan atau didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Kewajiban ini diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut.

Penyisihan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Grup merupakan pihak yang bertanggung jawab, diakui ketika:

- Grup memiliki kewajiban kini baik yang bersifat hukum maupun konstruktif, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu;
- besar kemungkinan penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan
- estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat ditentukan.

Kewajiban penarikan aset untuk fasilitas hilir secara umum baru dapat dipastikan pada saat fasilitas tersebut ditutup secara permanen dan dibongkar. Namun demikian, fasilitas ini memiliki umur yang tidak terbatas berdasarkan rencana kelanjutan penggunaannya dan dengan demikian, nilai wajar dari liabilitas hukum bersyarat ini tidak dapat diukur karena tanggal penyelesaian di masa depan dari liabilitas tersebut tidak dapat diperkirakan. Grup melakukan evaluasi secara berkala atas aset di hilir untuk menentukan apakah ada perubahan dalam fakta dan kondisi yang ada yang dapat menyebabkan timbulnya kewajiban penarikan aset.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban

i. Pendapatan

Pendapatan produksi minyak mentah, gas bumi, LPG, dan LNG diakui berdasarkan metode *provisional entitlements* pada saat *lifting*. Perbedaan *lifting* aktual minyak mentah, gas bumi, LPG, dan LNG menghasilkan piutang ketika *lifting* minyak mentah, gas bumi, LPG, dan LNG (posisi *underlifting*), dan menghasilkan utang ketika *lifting* minyak mentah, gas bumi, LPG, dan LNG melebihi *entitlements* final (posisi *overlifting*). Volume *underlifting* dan *overlifting* dinilai berdasarkan harga rata-rata tertimbang tahunan Minyak Mentah Indonesia - (*Indonesia Crude Price* atau "ICP") (untuk minyak mentah) dan harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas yang bersangkutan (untuk gas bumi, LPG, dan LNG).

Perusahaan mengakui pendapatan subsidi ketika Perusahaan menjual produk subsidi dan berhak atas subsidinya.

Pendapatan dari penjualan barang dan jasa masing-masing diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli dan pada saat jasa diberikan.

Pendapatan denda yang berasal dari piutang penjualan produk BBM yang tertunggak diakui pada saat Perusahaan dan pelanggan tersebut menyepakati jumlah denda dan ada bukti-bukti bahwa pelanggan berkomitmen untuk membayar denda.

Pendapatan dari distribusi gas bumi, jasa transmisi minyak dan gas bumi, dan *toll fees* dari transmisi gas diakui ketika gas didistribusikan atau ditransmisikan kepada pelanggan berdasarkan pembacaan meter gas.

Pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian aset dan pipa transmisi diakui setelah layanan diberikan dan diukur berdasarkan unit gas yang dialirkan selama periode tertentu.

Biaya dan pendapatan sehubungan dengan penjualan listrik antara PGE, kontraktor panas bumi dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("PLN") dicatat berdasarkan *Energy Sales Contracts* dalam Kontrak Operasi Bersama ("KOB"). KOB tersebut mengharuskan penjualan listrik dari kontraktor KOB ke PLN dilakukan melalui PGE pada nilai yang sama dengan biaya pembelian listrik dari kontraktor KOB.

Kelebihan dan/atau kekurangan pendapatan akibat perbedaan harga jual eceran ("HJE") formula dan HJE penetapan ("Selisih Harga") Jenis Bahan Bakar Tertentu ("JBT") Minyak Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan ("JBKP") Premium diakui pada tahun penjualan JBT Solar dan JBKP Premium tersebut terjadi sepanjang terdapat keyakinan atas pengembalian dan/atau ketertagihan Selisih Harga tersebut pada saat penyelesaian laporan keuangan.

Perusahaan mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada akun pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya karena merupakan bagian dari operasi Perusahaan.

Pendapatan yang ditangguhkan terdiri dari:

- jumlah yang telah ditagihkan dan diterima sehubungan dengan transaksi gas "ambil atau bayar" (TOP) yang akan diakui sebagai pendapatan ketika kuantitas gas tersebut telah dikirimkan ke pelanggan atau pada saat perjanjian tersebut berakhir,
- pembayaran sewa dan jasa pemeliharaan yang diterima dimuka serta
- pendapatan sewa atas periode yang belum berjalan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

ii. Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan konsep akrual.

s. Program pensiun dan imbalan kerja

i. Kewajiban pensiun

Entitas-entitas di dalam Grup menggunakan berbagai skema pensiun. Grup memiliki program imbalan pasti dan iuran pasti. Program iuran pasti adalah program imbalan pascakerja yang mewajibkan Grup membayar sejumlah iuran tertentu kepada entitas terpisah. Grup tidak memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika entitas tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan pascakerja sebagai imbalan atas jasa yang diberikan pekerja pada periode berjalan dan periode lalu.

Grup harus menyediakan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Undang-Undang (“UU”) Ketenagakerjaan No. 13/2003 atau Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) Grup, mana yang lebih tinggi. Karena UU Ketenagakerjaan atau PKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau PKB adalah program imbalan pasti.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal laporan keuangan dikurangi nilai wajar aset program.

Besarnya kewajiban imbalan pasti ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan secara tahunan menggunakan metode *projected unit credit*.

Beban yang diakui di laporan laba rugi termasuk biaya jasa kini, beban/pendapatan bunga, biaya jasa lalu dan keuntungan/kerugian penyelesaian. Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Pengukuran kembali yang timbul dari program pensiun manfaat pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Pesangon pemutusan kontrak kerja terhutang ketika Grup memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal atau ketika karyawan menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

Grup mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja pada tanggal yang lebih awal diantara:

- (a) ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (b) ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang melibatkan pembayaran pesangon.

ii. Kewajiban pascakerja lainnya

Beberapa entitas di dalam Grup memberikan imbalan kesehatan pascakerja bagi pekerja yang telah memasuki masa pensiun. Imbalan ini diberikan kepada pekerja yang tetap bekerja sampai usia pensiun dan memenuhi masa kerja minimum. Biaya yang diharapkan timbul atas imbalan ini terhutang selama masa kerja dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Kewajiban ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Transaksi dan saldo dalam denominasi non-Dolar AS

Unsur-unsur yang disertakan dalam laporan keuangan setiap entitas anggota Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi (mata uang fungsional).

Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS menggunakan kurs penutup. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laporan laba rugi, kecuali jika ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas dan lindung nilai investasi neto yang memenuhi syarat.

Untuk entitas anak dalam negeri dan luar negeri, yang bukan merupakan bagian integral dari operasi Perusahaan dan mata uang fungsionalnya bukan Dolar AS, aset dan liabilitasnya dijabarkan ke dalam mata uang Dolar AS dengan menggunakan kurs penutup yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebagai berikut (nilai penuh dibulatkan dalam dua angka desimal terdekat):

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1.000 Rupiah/Dolar AS	0,07	0,07
Dolar Singapura/Dolar AS	0,74	0,73
100 Yen Jepang/Dolar AS	0,92	0,91
Dolar Hong Kong/Dolar AS	0,13	0,13
Euro/Dolar AS	1,12	1,14
Ringgit Malaysia/Dolar AS	0,24	0,24
Dinar Aljazair/Dolar AS	0,01	0,01

u. Pajak penghasilan

Pajak penghasilan kini

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dikembalikan dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah ini adalah yang telah diberlakukan atau secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban operasi lainnya karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Grup secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam laporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak yang berlaku dapat ditafsirkan. Apabila diperlukan, Grup menetapkan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayarkan kepada otoritas pajak termasuk pertimbangan pengadilan pajak dan keputusan pengadilan tertinggi dalam kasus proses banding Grup.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak penghasilan kini (lanjutan)

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan dicatat ketika surat ketetapan pajak diterima, atau untuk jumlah ketetapan banding yang diajukan oleh Grup, ketika: (1) saat hasil dari banding tersebut ditentukan, kecuali jika ada ketidakpastian yang signifikan mengenai hasil dari banding tersebut, di mana peristiwa dampak amandemen kewajiban pajak berdasarkan suatu penilaian diakui pada saat mengajukan banding, atau (2) pada saat itu berdasarkan pengetahuan tentang perkembangan dalam kasus serupa yang melibatkan hal-hal yang diajukan banding, dalam putusan oleh Pengadilan Pajak atau Mahkamah Agung, di mana hasil banding positif diputuskan tidak pasti secara signifikan, di mana dampak amandemen kewajiban pajak diakui berdasarkan jumlah penilaian yang diajukan banding.

Dalam perhitungan pajak penghasilan, Perusahaan mengakui pendapatan dari Selisih Harga dalam sebesar nilai piutang sebelum penyesuaian nilai wajar (Catatan 8a). Selisih nilai piutang dengan nilai wajar diakui sebagai aset pajak tangguhan. Pemulihan dari penyesuaian nilai wajar piutang pada tahun-tahun berikutnya akan dicatat sebagai pendapatan bunga. Atas pendapatan bunga tersebut tidak diakui sebagai objek pajak penghasilan tetapi sebagai pembalik aset pajak tangguhan yang sebelumnya diakui.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas untuk perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis, dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/penghasilan kena pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak dalam investasi pada anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalikkan dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi pajak yang belum digunakan. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak akan cukup untuk dikompensasikan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta dan akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal suatu aset atau liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan merupakan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi atau penghasilan kena pajak/kerugian pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari investasi pada anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui jika besar kemungkinan perbedaan temporer tersebut tidak akan dibatalkan dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi oleh perbedaan sementara.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangi jika penghasilan kena pajak mungkin tidak cukup untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui jika besar kemungkinan laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun ketika aset tersebut dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan aktivitas KKS dihitung menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal efektif KKS atau tanggal perpanjangan atau tanggal perubahan dalam KKS.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan transaksi yang mendasari baik dalam OCI maupun langsung dalam ekuitas.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban dan aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- i. PPN yang timbul dari pembelian aset atau layanan yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item yang diterapkan untuk pengeluaran; dan
- ii. Piutang dan utang yang disajikan termasuk jumlah PPN.

PPN untuk subsidi dan/atau perbedaan harga akan dicatat oleh Perusahaan ketika mengajukan pembayaran untuk subsidi dan/atau perbedaan harga kepada Direktorat Jenderal Anggaran.

Pajak Final

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan masih dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 (Revisi 2014), pajak final tidak lagi diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak final yang timbul dari pendapatan bunga yang dikenai pajak final sebagai pos terpisah.

v. Informasi segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana informasi keuangan yang dapat dipisahkan tersedia.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

w. Penurunan nilai aset non-keuangan

Aset yang memiliki umur manfaat tidak terbatas - sebagai contoh, *goodwill* atau aset tak berwujud yang belum siap digunakan tidak diamortisasi dan dilakukan pengujian penurunan nilai secara tahunan.

Aset yang diamortisasi atau didepresiasi diuji terhadap penurunan nilai ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat dipulihkan. Penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai aset. Dalam menentukan penurunan nilai, aset dikelompokkan pada tingkat yang paling rendah dimana terdapat arus kas yang dapat diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan selain *goodwill* yang mengalami penurunan nilai diuji setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat kemungkinan pemulihan penurunan nilai.

x. Biaya emisi penerbitan obligasi

Biaya emisi penerbitan obligasi disajikan sebagai pengurang utang obligasi sebagai bagian dari liabilitas tidak lancar pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto yang diamortisasi dengan metode SBE selama jangka waktu utang obligasi.

y. Pengaturan bersama

Grup merupakan pihak dalam pengaturan bersama apabila terdapat pengaturan kontraktual yang memberikan pengendalian bersama atas aktivitas relevan kepada Grup dan minimal satu pihak lainnya. Pengendalian bersama diuji dengan prinsip yang sama dengan penilaian pengendalian atas entitas anak.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama berdasarkan kepentingan sebagai berikut:

- a. Ventura bersama (*joint venture*): di mana Grup memiliki hak hanya atas aset neto dalam pengaturan bersama.
- b. Operasi bersama (*joint operation*): di mana Grup memiliki baik hak atas aset maupun kewajiban dalam pengaturan bersama.

Dalam melakukan penilaian klasifikasi kepentingan dalam pengaturan bersama, Grup mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Struktur pengaturan bersama;
- b. Bentuk hukum pengaturan bersama apabila dibentuk melalui kendaraan terpisah;
- c. Persyaratan pengaturan kontraktual;
- d. Relevan, fakta dan keadaan lain (termasuk semua perjanjian kontraktual lainnya).

Grup mencatat kepentingannya dalam ventura bersama menggunakan metode ekuitas.

Selisih lebih biaya investasi pada ventura bersama dibandingkan dengan nilai wajar aset teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontingen teridentifikasi yang diakuisisi, dikapitalisasi dan termasuk dalam jumlah tercatat investasi pada ventura bersama. Jika terdapat indikasi bahwa investasi pada ventura bersama mengalami penurunan nilai, maka dilakukan uji penurunan nilai dengan cara yang sama dengan uji penurunan nilai pada aset nonkeuangan.

Grup mencatat kepentingannya dalam operasi bersama dengan mengakui hak atas aset, bagian atas liabilitas, pendapatan dan beban sesuai dengan ketentuan hak dan kewajiban dalam ketentuan kontraktual.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

z. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas.

Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, neto setelah pajak, dari jumlah yang diterima.

aa. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham diakui sebagai liabilitas dan mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup dalam periode dimana pembagian dividen tersebut diumumkan.

ab. Biaya pinjaman

Biaya pinjaman merupakan bunga dan selisih kurs pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan biaya lainnya (amortisasi diskonto/premi dari pinjaman diterima, dan lain-lain) yang terjadi sehubungan dengan peminjaman dana.

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya telah selesai.

ac. Pengukuran nilai wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

- di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Seluruh aset dan liabilitas yang mana nilai wajar aset atau liabilitas tersebut diukur atau diungkapkan, dikategorikan dalam hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Tingkat 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ad. Kontrak asuransi

Kontrak asuransi adalah kontrak yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dimana pada saat penerbitan polis perusahaan asuransi menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis.

Risiko asuransi adalah kemungkinan untuk membayar manfaat yang signifikan kepada pemegang polis apabila suatu kejadian yang diasuransikan terjadi dibandingkan dengan manfaat minimum yang akan dibayarkan apabila risiko yang diasuransikan tidak terjadi. Skenario-skenario yang diperhatikan adalah skenario yang mengandung unsur komersial.

Grup mendefinisikan risiko asuransi yang signifikan sebagai kemungkinan Grup menyetujui untuk mengkompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tertentu yang tidak pasti (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis.

Ketika sebuah kontrak telah diklasifikasi sebagai kontrak asuransi, reklasifikasi terhadap kontrak tersebut tidak dapat dilakukan kecuali ketentuan perjanjian kemudian di amandemen.

Kontrak asuransi diklasifikasikan sebagai berikut:

- Kontrak asuransi jangka pendek
Kontrak asuransi jangka pendek adalah kontrak asuransi yang hanya memberikan proteksi asuransi tanpa ada komponen deposit untuk jangka waktu sama dengan atau kurang dari dua belas bulan.
- Kontrak asuransi jangka panjang
Kontrak asuransi jangka panjang adalah kontrak asuransi yang hanya memberikan proteksi asuransi tanpa ada komponen deposit untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan.

i) Pengakuan pendapatan *underwriting*

Pendapatan *underwriting* diakui sejak berlakunya polis.

Premi dari kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan. Premi dari polis bersama diakui sebesar pangsa premi Grup.

Premi reasuransi adalah bagian dari premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian (kontrak) reasuransi. Premi reasuransi diakui selama periode kontrak reasuransi secara proporsional dengan proteksi diperoleh.

Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan merupakan bagian dari premi yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan perlindungan.

Grup mengakui cadangan atas premi jangka pendek yang belum merupakan pendapatan dengan menggunakan metode harian.

Grup juga mengakui cadangan atas premi jangka panjang yang belum merupakan pendapatan yang dihitung dengan menggunakan metode nilai kini arus kas masa depan (diskonto arus kas).

Entitas anak Perseroan menghitung liabilitas manfaat polis masa depan dengan menggunakan metode *Gross Premium Reserve* yang mencerminkan nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan, nilai kini estimasi seluruh biaya yang dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

(Kenaikan) penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara premi belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu dan diakui secara neto pada laba rugi konsolidasian.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ad. Kontrak asuransi (lanjutan)

i) Pengakuan pendapatan *underwriting* (lanjutan)

Porsi aset reasuransi dari cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan diakui bersamaan pada saat timbulnya cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

Porsi aset reasuransi dari cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan diukur berdasarkan kontrak reasuransi terkait konsistensi dengan metode pengukuran cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.

Penyajian pendapatan premi neto dalam laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi dan retrosesi, dan (kenaikan) penurunan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi dan retrosesi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

ii) Reasuransi

Grup mereasuransikan sebagian risiko atas akseptasi pertanggungjawaban kepada perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi.

Jumlah premi dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi dan retrosesi prospektif diakui sebagai premi reasuransi selama periode kontrak reasuransi dan retrosesi secara proporsional dengan proteksi yang diberikan. Pembayaran atau liabilitas atas transaksi reasuransi dan retrosesi retrospektif diakui sebagai piutang reasuransi sebesar liabilitas yang dicatat sehubungan kontrak reasuransi dan retrosesi tersebut.

Grup mempunyai kontrak reasuransi dan retrosesi proporsional dan non-proporsional dengan perusahaan asuransi dan reasuransi di dalam maupun di luar negeri. Tujuan reasuransi ini adalah untuk membagi risiko yang melebihi kapasitas retensi Grup. Premi reasuransi dan retrosesi, klaim reasuransi dan retrosesi dan diskon reasuransi dan retrosesi dikurangkan dari premi bruto, klaim bruto dan komisi bruto.

Grup mereasuransikan sebagian porsi risikonya kepada perusahaan reasuradur. Jumlah premi yang dibayar atau porsi premi atas transaksi reasuransi prospektif diakui sesuai dengan proporsi jumlah proteksi reasuransi yang diterima.

Aset reasuransi termasuk saldo yang diharapkan dibayarkan oleh perusahaan reasuransi untuk *ceded* estimasi klaim reasuransi, dan *ceded* premi belum merupakan pendapatan. Jumlah manfaat yang ditanggung oleh reasuradur diperkirakan secara konsisten sesuai dengan liabilitas yang terkait dengan polis reasuransi.

Jika aset reasuransi mengalami penurunan nilai, Grup mengurangi nilai tercatat dan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut dalam laba rugi konsolidasian. Aset reasuransi mengalami penurunan nilai jika ada bukti objektif, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, bahwa Grup tidak dapat menerima seluruh jumlah karena di bawah syarat-syarat kontrak, dan dampak pada jumlah yang akan diterima dari reasuradur dapat diukur secara andal.

Grup menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas premi belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas klaim.

iii) Biaya akuisisi

Biaya akuisisi merupakan beban yang terjadi untuk mendapatkan premi asuransi, seperti komisi yang dibayarkan kepada pialang asuransi, agen dan entitas asuransi lain. Biaya akuisisi ini ditanggungkan dan diamortisasi sesuai dengan metode perhitungan cadangan atas premi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

ad. Kontrak asuransi (lanjutan)

iv) Klaim

Klaim meliputi klaim disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan (IBNR - *Incurring But Not Reported*) dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan (kenaikan) penurunan estimasi klaim retensi sendiri. Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Grup sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasuradur untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim reasuransi pada aset reasuransi.

Grup menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha. Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR).

Cadangan Grup untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Grup membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

Perubahan jumlah estimasi klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi konsolidasian pada tahun terjadinya perubahan.

v) Pengujian kecukupan liabilitas

Pengujian kecukupan liabilitas dilakukan pada tanggal pelaporan untuk kontrak secara individual ataupun per kelompok produk, ditentukan sesuai dengan cara Grup memperoleh, memelihara, dan mengukur profitabilitas dari kontrak asuransi tersebut.

Grup menilai liabilitas asuransi pada setiap akhir periode pelaporan untuk meyakinkan apakah liabilitas asuransi yang dicatat cukup untuk menutup kerugian yang diperkirakan pada akhir periode pelaporan, dengan menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi.

Jika penilaian tersebut menunjukkan kekurangan antara nilai tercatat liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tanggungan terkait) dibandingkan dengan estimasi arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan tersebut dicatat dalam laba rugi konsolidasian.

Pada tanggal pelaporan, keseluruhan jumlah aset dan kewajiban asuransi yang dicatat telah diestimasi dan manajemen meyakini bahwa jumlah tersebut telah memadai.

ae. Provisi kontrak memberatkan

Kontrak memberatkan adalah kontrak yang dapat menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam memenuhi kewajiban menurut kontrak dan biaya tersebut melebihi manfaat ekonomik yang diperkirakan akan diterima. Biaya yang tidak dapat dihindarkan dalam kontrak mencerminkan biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak, yaitu mana yang lebih rendah antara biaya memenuhi kontrak dengan denda atau kompensasi yang dibayar jika entitas tidak memenuhi kontrak. Jika Grup terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut tersebut diukur dan diakui sebagai provisi.

af. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian Grup telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 22 Mei 2020.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, manajemen harus membuat estimasi, pertimbangan dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain.

Estimasi dan asumsi tersebut dibuat berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup:

i. Biaya eksplorasi dan evaluasi

Kebijakan akuntansi Grup untuk biaya eksplorasi dan evaluasi mengakibatkan biaya tertentu dikapitalisasi untuk sebuah *area of interest* yang dianggap dapat dipulihkan oleh eksploitasi di masa depan atau penjualan atau dimana kegiatan belum mencapai tahap tertentu yang memungkinkan dilakukan penilaian estimasi yang wajar atas keberadaan cadangan. Kebijakan ini mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tertentu atas peristiwa dan keadaan di masa depan, khususnya apakah operasi eksploitasi dapat dilaksanakan secara ekonomis.

ii. Biaya pengembangan

Kegiatan pengembangan dimulai setelah dilakukan pengesahan proyek oleh tingkat manajemen yang berwenang. Pertimbangan diterapkan oleh manajemen dalam menentukan kelayakan suatu proyek secara ekonomis.

iii. Eksposur ketidakpastian pajak

Berdasarkan peraturan pajak yang berlaku saat ini, manajemen melakukan penilaian jika jumlah tercatat atas pengajuan pengembalian pajak yang dapat diperoleh dan diterima kembali dari Kantor Pajak. Lebih jauh, manajemen juga menilai kemungkinan kewajiban yang timbul dari pemeriksaan keberatan pajak.

Keputusan signifikan meliputi penentuan cadangan pajak penghasilan perusahaan dan pajak-pajak lainnya dalam transaksi tertentu. Ketidakpastian muncul seiring interpretasi peraturan pajak yang kompleks dan jumlah serta penentuan waktu pajak penghasilan masa mendatang. Grup membuat analisa dari semua posisi terkait pajak penghasilan untuk menentukan jika kewajiban pajak atas manfaat pajak tidak diakui harus diakui dalam catatan Grup.

iv. Pengakuan selisih harga penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan HJE BBM, disebutkan bahwa dalam hal hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK") dalam 1 (satu) tahun anggaran terdapat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha penerima penugasan sebagai akibat dari penetapan HJE BBM, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan pengaturan kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan Badan Usaha setelah berkordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") dan Menteri BUMN.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

a. Pertimbangan (lanjutan)

iv. Pengakuan selisih harga penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium (lanjutan)

Keyakinan manajemen untuk mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada tahun penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium dilakukan apabila terdapat keyakinan atas ketertagihan dan/atau pengembalian Selisih Harga yang didukung terutama jika, Perusahaan telah memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas JBT Minyak Solar dan JBKP Premium kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi memiliki hak untuk mengelola dan mengendalikan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium tersebut pada saat penjualan terjadi dan telah menerima hasil audit BPK atas Selisih Harga. Selain itu, untuk kekurangan penerimaan atas Selisih Harga, keyakinan atas ketertagihan pendapatan atas Selisih Harga juga didukung oleh Surat Ketetapan dari Kementerian Keuangan ("Surat Ketetapan") yang telah diterima sebelum penyelesaian laporan keuangan. Perusahaan mencatat kelebihan dan/atau kekurangan penerimaan atas Selisih Harga pada akun pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya karena merupakan bagian dari operasi Perusahaan.

v. Kontrak memberatkan

Estimasi kewajiban kini dari kontrak yang memberatkan yang diperkirakan akan ditanggung Group dibuat dengan membandingkan nilai terendah antara total biaya pemenuhan kontrak dan biaya untuk membatalkan kontrak tersebut.

Dalam menentukan biaya pemenuhan kontrak, pembayaran yang jatuh tempo pada periode dimana kontrak tidak dapat dibatalkan harus turut dipertimbangkan. Jika terdapat pilihan untuk membatalkan kontrak dan membayar denda, maka nilai sekarang dari jumlah yang harus dibayar pada saat pembatalan kontrak juga harus dipertimbangkan, dan kontrak diukur pada biaya neto terendah untuk terbebas dari ikatan kontrak. Biaya-biaya yang harus diperhitungkan dalam hal ini harus merupakan biaya yang tidak dihindarkan yang bisa dikaitkan langsung dengan kewajiban Perusahaan. Biaya yang tidak dihindarkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Merupakan biaya-biaya langsung variabel dalam kontrak dan karena itu merupakan *incremental* terkait dengan kontrak.
- Tidak termasuk biaya alokasi atau biaya pembagian
- Tidak bisa dihindari oleh rencana masa depan Perusahaan.

Biaya yang akan terjadi terlepas apakah kontrak akan dipenuhi atau tidak, bukan merupakan biaya inkremental. Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental adalah biaya yang sifatnya tetap dan tidak dapat dibatalkan seperti biaya depresiasi atas aset tetap, biaya sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan, dan lain-lain.

Biaya-biaya yang bukan merupakan biaya inkremental tersebut tidak perlu dimasukkan dalam analisis kontrak memberatkan karena biaya-biaya tersebut merupakan biaya-biaya untuk menjalankan bisnis.

b. Estimasi dan asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

i. Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi pada setiap periode pelaporan untuk menentukan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai memerlukan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi atas produksi yang diharapkan dan volume penjualan, harga komoditas (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), cadangan, biaya operasi, biaya pembongkaran dan restorasi serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini terpapar risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan perubahan situasi dapat mengubah proyeksi ini, yang dapat memengaruhi nilai aset yang dapat dipulihkan kembali.

ii. Estimasi cadangan

Cadangan minyak dan gas bumi terbukti adalah perkiraan jumlah minyak mentah dan gas alam yang berdasarkan data geologis dan teknis dapat diambil dengan tingkat kepastian yang memadai di tahun-tahun mendatang dari cadangan yang ada berdasarkan kondisi ekonomi dan operasi yang sekarang ada. Cadangan terbukti meliputi:

- (i) Cadangan terbukti dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan akan diambil melalui metode sumur, fasilitas, dan operasi yang sekarang ada; dan
- (ii) Cadangan terbukti yang belum dikembangkan: jumlah hidrokarbon yang diharapkan dapat diambil setelah adanya pengeboran, fasilitas dan metode operasi baru.

Akurasi dari cadangan terbukti tergantung pada sejumlah faktor, asumsi dan variabel seperti: kualitas data geologi, teknis dan ekonomi yang tersedia beserta interpretasi dan pertimbangan terkait, hasil pengeboran, pengujian dan produksi setelah tanggal estimasi, kinerja produksi *reservoir*, teknik produksi, proyeksi tingkat produksi di masa mendatang, estimasi besaran biaya dan waktu terjadinya pengeluaran pengembangan, ketersediaan pasar komersial, harga komoditi yang diharapkan dan nilai tukar.

Karena asumsi ekonomis yang digunakan untuk mengestimasi cadangan berubah dari waktu ke waktu dan tambahan data geologi yang dihasilkan selama operasi, estimasi cadangan dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan cadangan yang dilaporkan dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

- i. Penyusutan dan amortisasi yang ditentukan berdasarkan unit produksi, atau jika masa manfaat ekonomi sumur aset berubah.
- ii. Provisi biaya pembongkaran, restorasi lokasi aset dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang memengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
- iii. Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi pemulihan manfaat pajak.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

a. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

ii. Estimasi cadangan (lanjutan)

Grup menetapkan cadangan terbukti berdasarkan pada prinsip *Petroleum Resources Management System* ("PRMS") 2018 sejak 1 Januari 2019 (sebelumnya menggunakan PRMS 2007). Karakteristik alamiah *reservoir* minyak dan gas bumi yang penuh ketidakpastian dapat menyebabkan terjadinya perubahan estimasi cadangan karena penambahan data yang diperoleh Grup.

iii. Aset minyak dan gas bumi

Grup menerapkan metode *successful efforts* untuk kegiatan eksplorasi dan evaluasi minyak dan gas bumi.

Untuk sumur eksplorasi dan sumur uji eksplorasi stratigrafi, biaya yang secara langsung terkait dengan pengeboran sumur-sumur tersebut, dikapitalisasi dahulu sebagai aset dalam penyelesaian dalam akun aset minyak dan gas bumi, hingga ditentukan apakah telah ditemukan cadangan minyak dan gas yang berpotensi ekonomis berdasarkan pengeboran tersebut.

Setiap estimasi dan asumsi tersebut dapat berubah seiring tersedianya informasi baru. Jika sumur tidak menemukan cadangan yang memiliki potensi ekonomi, biaya sumur akan dibebankan sebagai beban sumur kering (*dry hole*) dan diklasifikasikan sebagai biaya eksplorasi.

iv. Penyisihan penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan dan piutang

Penyisihan penurunan nilai piutang dikelola pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Pada setiap tanggal laporan keuangan, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan yang dibentuk berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

v. Piutang Pemerintah

Grup mengakui piutang Pemerintah untuk penggantian biaya subsidi untuk jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 kg dan piutang imbalan jasa pemasaran atas jasa memasarkan minyak mentah, gas bumi dan LNG bagian Pemerintah. Grup melakukan estimasi atas jumlah dari piutang Pemerintah tersebut berdasarkan parameter volume penyerahan aktual dan tarif yang telah ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah. Jumlah piutang subsidi tersebut menjadi subjek yang diaudit dan disetujui oleh BPK. Hasil audit dapat berbeda dengan jumlah yang diakui.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

vi. Penyusutan, estimasi nilai sisa dan masa manfaat aset tetap

Masa manfaat properti investasi dan aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diperkirakan dapat digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman terhadap aset sejenis.

vii. Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui hanya bila saldo aset pajak tangguhan tersebut kemungkinan besar dapat direalisasi, dimana hal ini tergantung dari jumlah laba kena pajak yang memadai yang dapat dihasilkan di masa depan.

viii. Provisi untuk biaya pembongkaran dan restorasi lokasi aset

Grup memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran fasilitas produksi minyak dan gas bumi dan pipa pada akhir umur manfaat aset-aset tersebut. Kewajiban pembongkaran terbesar yang dihadapi Grup berkaitan dengan penutupan dan peninggalan sumur-sumur yang sudah tidak terpakai dan pembuangan platform minyak dan gas alam dan saluran pipa pada area kontrak Grup.

Grup mengakui provisi untuk biaya pembongkaran dan restorasi lokasi aset untuk sewa aset yang ada dalam wilayah kerja PSC Grup kecuali untuk beberapa entitas anak seperti yang dijelaskan dalam Catatan 48o.

Sebagian besar pembongkaran akan dilakukan di masa yang akan datang sehingga terdapat ketidakpastian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi pada saat dilakukannya pembongkaran. Teknologi pembongkaran dan biaya pembongkaran terus berubah, termasuk ekspektasi politik, lingkungan, keselamatan dan publik. Akibatnya, terdapat ketidakpastian yang signifikan terkait kapan dan jumlah arus kas masa depan yang harus dikeluarkan. Perubahan dalam ekspektasi biaya masa depan yang diharapkan tercermin dalam aset dan provisi terkait yang dapat memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN

Grup telah melakukan akuisisi dan penambahan *participating interest* melalui transaksi akuisisi maupun perolehan blok eks terminasi. Transaksi akuisisi ini dilakukan sejalan dengan strategi Grup dalam pengembangan bisnis hulu minyak dan gas yaitu untuk peningkatan jumlah produksi dan cadangan minyak, gas dan panas bumi serta pengembangan bisnis ke luar negeri. Ringkasan transaksi selama tahun 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Akuisisi Wilayah Kerja dan <i>Participating Interest</i>	Wilayah kerja	Wilayah	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo	Persentase kepemilikan	Produksi	Periode kontrak	Dimiliki oleh
Lapangan Unitisasi Attaka	Attaka	Kalimantan Timur	01/01/2018	24/10/2018	100%	Minyak dan gas bumi	10 bulan	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Mahakam	Mahakam	Kalimantan Timur	01/01/2018	31/12/2037	90%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Tuban	Blok Tuban	Jawa Timur	20/05/2018	20/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Ogan Komering	Blok Ogan Komering	Sumatera Selatan	20/05/2018	19/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Lapangan Unitisasi Sukowati	Sukowati	Tuban	20/05/2018	-	100%	-	20 tahun	PT Pertamina EP
Blok Sanga Sanga	Blok Sanga Sanga	Kalimantan Timur	08/08/2018	07/08/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok <i>Offshore Southeast Sumatera</i> ("OSES")	Blok OSES	Sumatera Tenggara	06/09/2018	05/09/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok <i>North Sumatera Offshore</i> ("NSO")	Blok NSO	Sumatera Utara	17/10/2018	16/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok East Kalimantan dan Attaka	Blok East Kalimantan	Kalimantan Timur	25/10/2018	24/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Jambi Merang	Blok Jambi Merang	Sumatera Selatan	10/02/2019	09/02/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Raja Pendopo	Blok Raja Pendopo	Sumatera Selatan	06/07/2019	05/07/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Salawati	Blok Salawati	Papua	23/04/2020	22/04/2040	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Kepala Burung	Blok Kepala Burung	Papua	15/10/2020	14/10/2040	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
<i>Geothermal</i> Seulawah Agam	Seulawah Agam	Aceh	09/04/2018	08/04/2055	75%	Panas bumi	37 tahun	PT Pertamina Geothermal Energy
Blok Maratua	Kalimantan Utara & Kalimantan Timur	Kalimantan	18/02/2019	17/02/2049	100%	Minyak dan gas bumi	30 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Rokan	Rokan	Sumatera Tengah	09/08/2021	08/08/2041	100%	Minyak	20 tahun	PT Pertamina Hulu Rokan
Blok West Ganai	West Ganai B	Makassar	26/01/2020	25/01/2050	30%	Minyak dan gas bumi	30 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Corridor	Blok Corridor	Sumatera Selatan	20/12/2023	19/12/2043	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

a. Pembentukan *Holding Migas*

Pada tanggal 30 Desember 2016, Pemerintah Indonesia (“Pemerintah”) mengeluarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 72/2016 sebagai revisi terhadap PP No. 44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Peraturan ini adalah dasar hukum untuk menciptakan *holding* BUMN yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pada tanggal 28 Februari 2018, Pemerintah menerbitkan PP No. 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Penambahan penyertaan modal Pemerintah dalam Perusahaan melalui pengalihan seluruh saham seri B milik Negara pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (“PGN”) sebanyak 13.809.038.755 lembar saham yang mewakili 56,96% total saham PGN kepada Perusahaan.

Pada tanggal 28 Maret 2018, Kementerian Keuangan menerbitkan surat keputusan No. 286/KMK.06/2018 tentang Penetapan Nilai Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan. Surat keputusan tersebut menetapkan bahwa nilai penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Perusahaan sebesar Rp38.136.346.046.696 (nilai penuh).

Pada tanggal 11 April 2018, Menteri BUMN menerbitkan Surat Keputusan No. S-216/MBU/2018 untuk menyetujui pengalihan 56,96% saham seri B milik Pemerintah di PGN dan tambahan penyertaan modal negara di Perusahaan sebesar Rp38.136.346.046.696 (nilai penuh). Pada tanggal yang sama, Menteri BUMN menerbitkan Surat Keputusan No. S-217/MBU/04/2018 untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari Rp200 triliun menjadi Rp600 triliun dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham. Surat ini juga yang menyetujui penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perusahaan menjadi 38.136.347 lembar saham atau sebesar Rp38.136.346.046.696 (nilai penuh) atau setara dengan US\$2.774.157.

Lebih lanjut, pada tanggal 11 April 2018, Menteri BUMN dan Perusahaan mengadakan perjanjian terkait pemindahan hak Pemerintah di PGN kepada Perusahaan, untuk meningkatkan penyertaan modal negara di Perusahaan.

Pada tanggal 13 April 2018 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008395.AH.01.02.2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah disetujui dengan jumlah modal ditempatkan senilai Rp171.227.044.000.000 (nilai penuh) atau setara dengan US\$16.191.204.

Pada 9 Mei 2018, Menteri BUMN sebagai pemegang saham dwiwarna seri A PGN menerbitkan Surat Kuasa terkait pemindahan hak dan kewenangan saham seri A PGN kepada Perusahaan sebagai pemilik saham mayoritas seri B. Surat ini untuk menyatakan kendali Perusahaan atas PGN.

Transaksi tersebut di atas dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

a. Pembentukan *Holding Migas* (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan informasi keuangan PGN pada tanggal perolehan:

	Nilai buku
ASET	
Aset lancar	2.021.879
Aset tidak lancar	4.442.988
Jumlah aset	6.464.867
LIABILITAS	
Liabilitas lancar	553.560
Liabilitas tidak lancar	2.649.167
Jumlah liabilitas	3.202.727
EKUITAS	
Modal Saham	344.019
Tambahan modal disetor lainnya	284.339
Saldo laba	
Ditentukan penggunaannya	2.427.854
Belum ditentukan penggunaannya	223.501
Komponen ekuitas lainnya	(36.868)
Jumlah ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.242.845
Saham seri B pindahan mewakili 56,96% kepemilikan	(1.847.125)
Nilai perolehan melalui penambahan modal Perusahaan	2.774.157
Tambahan modal disetor	927.032

Berdasarkan amandemen dan pernyataan kembali perjanjian jual beli saham antara Perusahaan dan PGN tanggal 28 Desember 2018, PGN resmi mengakuisisi saham PT Pertamina Gas ("Pertagas") yang dimiliki oleh Perusahaan sebanyak 51,00% saham (atau 2.591.099 lembar saham) senilai Rp20,18 triliun setara dengan US\$1.351.955. Dengan akuisisi saham ini, PGN secara efektif memiliki 51,00% saham Pertagas termasuk 5 anak perusahaan, yaitu PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, PT Perta-Samtan Gas, dan PT Perta Kalimantan Gas. Sehubungan dengan restrukturisasi ini, kepemilikan efektif Perusahaan atas Pertagas turun dari 100% menjadi 78,05%.

b. Pengendalian atas Regas

Perusahaan dan PGN masing-masing memiliki 60,00% dan 40,00% kepemilikan dalam Regas. Sebagai hasil pembentukan BUMN *holding migas*, Perusahaan secara tidak langsung memiliki 82,78% kepemilikan. Manajemen menyimpulkan bahwa Perusahaan memiliki hak suara mayoritas atas Regas untuk mengarahkan aktivitas bisnis Regas. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki kendali atas Regas dan mulai 11 April 2018, Perusahaan mengkonsolidasi laporan keuangan Regas.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

b. Pengendalian atas Regas

Berikut ini adalah ringkasan informasi keuangan Regas pada tanggal disaat Perusahaan memperoleh pengendalian:

	Nilai buku
ASET	
Aset lancar	233.935
Aset tidak lancar	56.116
Jumlah aset	290.051
LIABILITAS	
Liabilitas lancar	20.769
Liabilitas tidak lancar	12.707
Jumlah liabilitas	33.476
EKUITAS	
Modal saham	145.589
Laba ditahan	
Ditentukan penggunaannya	43.129
Belum ditentukan penggunaannya	68.026
Komponen ekuitas lainnya	(169)
Jumlah ekuitas	256.575

c. Perubahan persentase kepemilikan di M&P

Pada tanggal 5 November 2018, M&P menandatangani perjanjian dengan Rockover Energy Limited ("Rockover") untuk memperoleh pembayaran yang ditangguhkan yang dimiliki oleh Rockover dengan jumlah US\$10,75 juta (nilai penuh) yang harus dibayar tunai dan penerbitan 5.373.209 saham baru M&P.

Pada tanggal 12 Desember 2018, rapat umum pemegang saham luar biasa M&P menyetujui pendelegasian wewenang yang berkaitan dengan peningkatan modal untuk tujuan transaksi dengan Rockover kepada Dewan Direksi. Pada tanggal 14 Desember 2018, Direksi M&P mengimplementasikan delegasi wewenang ini dan memutuskan untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah nominal total €4.137.371 (nilai penuh) melalui penerbitan 5.373.209 saham baru dengan nilai nominal €0,77 (nilai penuh) per saham dan nilai setoran modal sebesar €5,182 (nilai penuh) per unit. Berdasarkan penyelesaian peningkatan modal, Rockover memegang 2,68% dari modal saham M&P dan mengakibatkan dilusi persentase kepemilikan Perusahaan di M&P dari 72,65% menjadi 70,75%. Sehingga dampak dari transaksi ini sebesar US\$32.243 diperhitungkan sebagai transaksi ekuitas dan dicatat dalam akun ekuitas lainnya.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

d. *Gross split contract* (“*gross split*”)

Pada tanggal 13 Januari 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 08/2017 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama Tanpa Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi atau disebut sebagai KKS *Gross Split* telah diterbitkan. Berikut ini adalah daftar partisipasi Grup dalam *Gross Split* per tanggal 31 Desember 2019:

Wilayah kerja	Tanggal efektif	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Periode kontrak	Sub-holding
Blok East Sepinggan	20/07/2012	19/07/2042	15%	30 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Offshore North West Java (“ONWJ”)	19/01/2017	18/01/2037	90%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok East Kalimantan dan Attaka	25/10/2018	24/10/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Tuban	20/05/2018	19/05/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Ogan Komering	20/05/2018	19/05/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Sanga Sanga	08/08/2018	07/08/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok OSES	6/09/2018	05/09/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok North Sumatera Offshore (NSO)	17/10/2018	16/10/2038	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Jambi Merang	10/02/2019	09/02/2039	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Maratua	18/02/2019	17/02/2049	100%	30 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Raja Pendopo	06/07/2019	05/07/2039	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok West Ganai	26/01/2020	25/01/2050	30%	30 tahun	PT Pertamina Hulu Indonesia
Blok Salawati	22/04/2020	22/04/2040	30%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Kepala Burung	15/10/2020	14/10/2040	30%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi
Blok Rokan	09/08/2021	08/08/2041	100%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Rokan
Blok Corridor	20/12/2023*	19/12/2043	30%	20 tahun	PT Pertamina Hulu Energi

* Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) *gross split* ditandatangani tanggal 11 November 2019

e. Kontrak Bagi Hasil Blok Mahakam

PSC Mahakam ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2015 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dan PHM dengan tanggal efektif 1 Januari 2018. Kontrak PSC tersebut menerapkan konsep *production sharing*, namun menggunakan pendekatan *sliding scale* untuk perhitungan *entitlement* kontraktor berdasarkan rasio *Revenue over Costs* (“R/C”).

Pada tanggal 25 Oktober 2016 telah dilakukan amandemen PSC Mahakam yang pertama dengan menambahkan beberapa poin penting, diantaranya kepastian atas biaya yang dikeluarkan oleh PHM setelah tanggal penandatanganan kontrak namun sebelum tanggal efektif. Biaya tersebut dapat di-*cost recovery*-kan sebagai biaya operasi setelah tanggal efektif kontrak.

Pada tanggal 20 April 2018, telah dilakukan amandemen PSC Mahakam yang kedua dengan menambahkan beberapa poin penting, diantaranya adalah penambahan wilayah kerja Tengah ke dalam wilayah kerja Mahakam. Amandemen ini berlaku efektif pada tanggal 5 Oktober 2018. PSC ini mengacu pada PP No. 79 tahun 2010, dimana mekanisme *assume and discharge* untuk pajak yang menjadi insentif bagi Kontraktor KKS diakui sebagai bagian dari biaya yang akan ditagihkan melalui mekanisme *cost recovery*.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

e. Kontrak Bagi Hasil Blok Mahakam (lanjutan)

Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di kontrak kerja sama Blok Mahakam adalah sebagai berikut:

- Bagi hasil minyak mentah dan gas bumi

Bagi hasil produksi minyak antara PHM dan Pemerintah masing-masing sebesar 23,5294% dan 76,4706%, sedangkan untuk bagi hasil gas masing-masing sebesar 47,0588% dan 52,9412% untuk tahun pertama kontrak. Adapun faktor R/C yang berlaku di tahun pertama adalah 1,3 sesuai dengan yang tercantum dalam KKS. Untuk tahun-tahun berikutnya menggunakan persentase bagi hasil sesuai tabel di bawah dengan menggunakan faktor R/C akhir tahun di tahun sebelumnya.

Faktor R/C sendiri adalah pendapatan kumulatif kontraktor sejak tanggal penandatanganan kontrak dibagi dengan biaya kumulatif kontraktor sejak penandatanganan kontrak.

Ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

R/C Lebih dari	R/C Kurang dari atau sama dengan	Tax Rate	Gross Contractor Share		Net Contractor Share	
			Oil	Gas	Oil	Gas
0	1	36,25%	31,37%	54,90%	20%	35%
1	1,2	36,25%	27,45%	50,98%	18%	33%
1,2	1,4	36,25%	23,53%	47,06%	15%	30%
1,4	1,6	36,25%	19,61%	43,14%	12%	28%
> 1,6		36,25%	15,69%	39,22%	10%	25%

- First Tranche Petroleum (“FTP”)

Pemerintah dan PHM berhak untuk menerima sebesar 20% dari jumlah produksi minyak dan gas setiap tahunnya sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP dibagi antara Pemerintah dan PHM sesuai dengan bagi hasil atas produksi minyak dan gas.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian, skema pemanfaatan aset yang dahulunya dimiliki oleh PSC Mahakam masih belum diputuskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kementerian ESDM.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

f. Penambahan 50,56% *participating interest* PT Pertamina EP Cepu (“PEPC”) di Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (“JTB”)

Efektif sejak tanggal 3 November 2017, PEPC memperoleh tambahan 41,37% *participating interest* di lapangan JTB yang sebelumnya dimiliki oleh ExxonMobil Cepu Limited dan Ampolex (Cepu) Pte. Ltd., sehingga *participating interest* PEPC di lapangan JTB menjadi 82,74%. Kontraktor lain di lapangan JTB pada tanggal 31 Desember 2017 adalah PT Pertamina EP sebesar 8,06% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,19%.

Melalui Surat No. 001/KETUA-BKS/XI/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat No. 004/KETUA-BKS/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017, BUMD menyampaikan penarikan diri dari pengembangan lapangan JTB terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018, sehingga PEPC menambah 9,19% *participating interest* di lapangan unitisasi JTB menjadi 91,93%. Atas transaksi ini, PEPC mengganti *cash call* yang telah dibayarkan BUMD tersebut sebesar US\$16.764, yang dicatat PEPC sebagai penambah aset minyak dan gas bumi.

g. Pendirian PT Pertamina Hulu Rokan (“PHR”)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1923K/10/MEM/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-ketentuan Pokok (*Term and Conditions*) Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah Kerja Rokan, syarat yang harus dipenuhi Pertamina antara lain membentuk anak usaha baru, melunasi bonus tanda tangan dan membayar jaminan komitmen pelaksanaan.

Pada tanggal 20 Desember 2018, PT Pertamina Hulu Rokan didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 13 tanggal 20 Desember 2018 dari Lenny Janis Ishak, S.H. Akta pendirian PHR telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-0061348.AH.01.01.2018 tanggal 21 Desember 2018. PHR akan mengelola Blok Rokan mulai dari tahun 2021 sampai 2041. Total modal dasar PHR sebesar US\$3.140.000 dengan modal disetor sebesar US\$785.000. Modal disetor tersebut digunakan untuk membayar bonus penandatanganan kepada Pemerintah Indonesia sebesar US\$783.980 pada tanggal 21 Desember 2018, serta digunakan sebagai modal kerja selama tahun pertama mengelola wilayah kerjanya.

h. Penambahan 20% *participating interest* PT Pertamina EP di Lapangan Unitisasi Sukowati

Berdasarkan surat SKK Migas No. SRT-0493/SKKMA0000/2018/S1 tanggal 25 Juni 2018 perihal penetapan operator baru unitisasi Lapangan Sukowati, fasilitas produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas, PT Pertamina EP ditunjuk sebagai operator baru Lapangan Sukowati.

Berdasarkan kesepakatan bersama terkait pengelolaan unitisasi Lapangan Sukowati, pengoperasian fasilitas produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas tanggal 16 Mei 2018 antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, disepakati bahwa PT Pertamina EP memiliki *participating interest* sebesar 100% (Catatan 42c).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

i. Kontrak kerja sama sementara Wilayah Kerja Attaka

Kontrak kerja sama sementara wilayah kerja Attaka dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2017, oleh SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Attaka, yang menjelaskan semua syarat, ketentuan, hak dan kewajiban, dari dan berdasarkan eks-KKS Attaka akan berlaku dari tanggal 1 Januari 2018 hingga 24 Oktober 2018. Efektif mulai 25 Oktober 2018, wilayah kerja Attaka digabungkan ke KKS East Kalimantan dan Attaka.

j. Penurunan persentase kepemilikan Perusahaan di ATPI

Pada tanggal 28 Mei 2018, ATPI menjadi perusahaan publik dengan mengeluarkan saham baru sebanyak 177.777.800 saham. Akibatnya, persentase kepemilikan Perusahaan di ATPI turun dari 65,0% menjadi 58,5%. Penurunan persentase kepemilikan ini tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian Perusahaan di ATPI. Sehingga, dampak dari transaksi ini sebesar US\$20.551 diperhitungkan sebagai transaksi ekuitas dan dicatat dalam akun selisih dari transaksi dengan kepentingan non-pengendali.

k. Addendum perjanjian pengalihan dan pengelolaan Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) Blok ONWJ

Pada tanggal 6 Februari 2019, PHE ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (“MUJ ONWJ”) telah menandatangani addendum atas perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10% *participating interest* di KBH Blok ONWJ. Bagi hasil produksi MUJ ONWJ dari KBH Blok ONWJ, setelah dikurangi MUJ ONWJ atas biaya dalam KBH tersebut terhitung sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar US\$16.302.702 (nilai penuh). Penyelesaian atas kewajiban tersebut telah diselesaikan oleh PHE ONWJ kepada MUJ ONWJ pada tanggal 8 Februari 2019.

Dimulai sejak tanggal pengalihan, pembayaran bagi hasil produksi bagian MUJ ONWJ akan dilakukan oleh PHE ONWJ setiap bulan, setelah dikurangi bagian MUJ atas biaya operasi KBH ONWJ dan kewajiban lainnya sesuai dengan KBH.

Dalam hal bagian bagi hasil produksi MUJ ONWJ pada bulan berjalan tidak mencukupi bagian biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MUJ ONWJ, kekurangan pembayaran biaya operasi tersebut akan diperhitungkan di bulan-bulan berikutnya.

Untuk menjamin pendapatan MUJ ONWJ, bagi hasil produksi serta biaya operasi bagian MUJ ONWJ dihitung menggunakan persentase provisional untuk setahun penuh sesuai lampiran addendum perjanjian. Jika akumulasi biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MUJ ONWJ ke PHE ONWJ pada suatu tahun melebihi bagian MUJ ONWJ atas bagi hasil produksi, PHE ONWJ akan memberikan pembayaran kepada MUJ ONWJ sebesar US\$1 (nilai penuh) setiap bulan pada tahun berikutnya.

l. Pendirian Pertamina International Marketing & Distribution (“PIMD”)

Pada tanggal 5 Agustus 2019, berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* No. 201925608H yang disahkan oleh Pendaftar Tan Yong Tat, PIMD didirikan dengan menerbitkan saham sebesar US\$40.200. PIMD bergerak di bidang bisnis bunker dan logistik, serta penjualan dan distribusi bahan bakar dan LPG, dan berdomisili hukum di Singapura.

m. Akuisisi saham Tuban Petro dan Perubahan kepemilikan di TPPI

Berdasarkan Perjanjian tanggal 18 November 2019, Perusahaan dan Tuban Petro menandatangani perjanjian untuk membeli 190.372 saham baru seri B yang dikeluarkan Tuban Petro dengan total nilai sebesar Rp3.156.560.797.208 (nilai penuh) atau setara dengan US\$224.171, yang mewakili 51% saham Tuban Petro. Perjanjian kerja sama pengelolaan PT Tuban Petro Chemical Industries antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT Pertamina (Persero) dan PT Tuban Petrochemical Industries tanggal 18 November 2019 menyatakan pembelian saham baru oleh Perusahaan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendalian yang menyebabkan pengambilalihan Perseroan sesuai UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

m. Akuisisi saham Tuban Petro dan Perubahan kepemilikan di TPPI (lanjutan)

Sebagai akibat pembelian saham tersebut di atas, Tuban Petro memiliki 19,16% saham TPPI sehingga secara langsung dan tidak langsung investasi Perusahaan di TPPI mengalami kenaikan menjadi 61,12% (Catatan 1b).

n. Perpanjangan KBH Blok B pasca terminasi

Pada tanggal 15 November 2019, PHE NSB kembali ditugaskan untuk sementara mengelola Area Kerja B melalui surat Kementerian ESDM No. 512/13/MEM.M/2019, dari tanggal 18 November 2019 sampai dengan 17 November 2020 atau sampai dengan KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi terlebih dahulu (Catatan 42d).

o. Penurunan persentase kepemilikan Perusahaan di TPPI

Pada Bulan Desember 2019, TPPI melakukan penerbitan saham baru sebanyak 4.350 ribu lembar yang dibeli oleh Tuban Petro dan menerima hak kepemilikan saham dari PT Polytama Propindo sebesar 1.012.669 lembar saham, hal ini mengakibatkan kepemilikan Tuban Petro atas TPPI berubah menjadi 42,61% dan kepemilikan saham Perusahaan di TPPI terdilusi dari semula 48,59% menjadi 37,65%. Atas dilusi tersebut, Perusahaan mencatat keuntungan dari dilusi kepemilikan saham sebesar US\$20.672 (Catatan 38).

p. Akuisisi Maurel & Prom Venezuela SLU atas 40% "Shareholder B" yang dimiliki oleh Shell di Mixed Company.

Pada Oktober 2018, Maurel & Prom Venezuela SLU ("M&P Venezuela"), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh M&P, menandatangani *Share Sale and Purchase Agreement* ("SSPA") dengan Shell Exploration and Production Investments BV ("Shell") untuk mengakuisisi 40% "Share B" yang dimiliki oleh Shell di Mixed Company. Mixed Company merupakan Perusahaan yang mengoperasikan lapangan Urdaneta West field di Lake Maracaibo, Venezuela.

Petróleos de Venezuela SA ("PDVSA"), melalui anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Corporación Venezolana del Petróleo ("CVP") dan PDVSA Social ("PDVSAS") - secara kolektif disebut sebagai "Pemegang Saham A", memiliki 60% saham dari Mixed Company.

Pada 3 Desember 2018, setelah memperoleh persetujuan dari *Ministry of Petroleum* of Venezuela, M&P Venezuela secara efektif memperoleh 40% kepemilikan saham Shell di Mixed Company dengan total nilai transaksi sebesar €70 juta yang dibayarkan sebagai berikut:

1. €47 juta dibayarkan pada saat penutupan transaksi di bulan Desember 2018, dan
2. €23 juta akan dibayarkan pada Desember 2019, yaitu 1 (satu) tahun setelah penutupan transaksi.

Pada tanggal 17 Juli 2019, M&P dan Sucre Energy Latam B.V. ("Sucre Energy") menandatangani perjanjian dimana Sucre Energy setuju untuk mengambil alih 20% kepemilikan M&P pada M&P Iberoamerica S.L. (sebelumnya M&P Venezuela), yang memiliki kepemilikan sebesar 40% di Mixed Company. *Price condition* untuk akuisisi ini sama dengan yang diterapkan pada transaksi yang diselesaikan antara M&P dan Shell atas Mixed Company pada Desember 2018.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

4. AKUISISI, PENAMBAHAN *PARTICIPATING INTEREST* DAN PERUBAHAN PERSENTASE KEPEMILIKAN (lanjutan)

q. Akuisisi M&P atas 20% *participating interest* di Blok 3/05 dan Blok3/05A di Angola

Pada 31 Juli 2019, M&P telah menyelesaikan akuisisi untuk 20% hak kepemilikan yang dimiliki oleh Angola Japan Oil Co., Ltd. ("AJOCO"), anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Mitsubishi Corporation ("Mitsubishi"), di dua blok lepas pantai Angola, Blok 3/05 dan Blok 3/05A. Berdasarkan *sales and purchase agreement*, nilai transaksi adalah sebesar US\$80.000, dikurangi dengan deposit sebesar US\$2.000 yang telah dibayarkan pada saat awal transaksi diumumkan dan telah disesuaikan dengan nilai sebesar US\$43.000 yang merupakan modal kerja dan arus kas yang diterima dan disalurkan oleh AJOCO atas nama M&P sejak kontrak efektif tanggal 1 Januari 2018. Sehingga nilai kas bersih yang dibayarkan kepada AJOCO oleh M&P pada saat penyelesaian transaksi adalah US\$35.000.

r. KBH *Gross Split* Blok Maratua dan Blok Corridor

Pada tanggal 18 Februari 2019, PHE Lepas Pantai Bunyu menandatangani KBH *Gross Split* blok Maratua dengan jangka waktu kontrak 30 tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan KBH tersebut.

Pada tanggal 11 November 2019, PHE Corridor menandatangani KBH *Gross Split* blok Corridor dengan jangka waktu kontrak 20 tahun, yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Desember 2023.

5. KAS DAN SETARA KAS

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas	5.743	4.119
Kas di bank	4.189.729	5.045.496
Deposito berjangka	2.560.780	4.062.697
Jumlah	6.756.252	9.112.312

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang dan tiap bank adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas		
Rupiah	4.714	3.128
Dolar AS	950	891
Lain-lain	79	100
Jumlah kas	5.743	4.119

Kas di bank

Dolar AS:

Entitas berelasi dengan Pemerintah

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("BRI")	957.552	891.329
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI")	785.983	844.933
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank Mandiri")	382.760	581.752
- PT Bank Syariah Mandiri ("Bank Syariah Mandiri")	81.258	-
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	134	1.526

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kas di bank (lanjutan)		
Dolar AS: (lanjutan)		
<u>Pihak ketiga</u>		
- Credit Agricole Corporate and Investment Bank ("Credit Agricole CIB", dahulu "Calyon")	191.196	214.982
- Citibank, N.A.	54.980	49.440
- J.P. Morgan Chase & Co.	42.043	16.130
- PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional ("BTPN")	27.862	2.515
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC")	7.453	94.194
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	13.932	13.532
Total Rekening Dolar AS	2.545.153	2.710.333
Rupiah:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- Bank Mandiri	504.478	651.073
- BRI	426.569	598.851
- BNI	425.820	547.355
- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN")	136.860	265.065
- PT Bank BRI Syariah Tbk. ("BRI Syariah")	24.295	48.692
- PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. ("BNI Syariah")	13.587	14.188
- Bank Syariah Mandiri	11.764	7.982
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	3.980	1.763
<u>Pihak ketiga</u>		
- PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")	20.318	40.008
- Citibank, N.A.	267	24.875
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	9.792	17.866
Total rekening Rupiah	1.577.730	2.217.718
Euro:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- Bank Mandiri	7	220
- BNI	7	8
- BRI	-	1
<u>Pihak ketiga</u>		
- Credit Agricole CIB	39.847	64.889
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	7	-
Total rekening Euro	39.868	65.118
Ringgit Malaysia		
- RHB Bank Berhad	18.516	39.417
Kas di bank - rekening mata uang asing lainnya - Pihak ketiga	8.462	12.910
Total kas di bank	4.189.729	5.045.496

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Deposito berjangka dengan jatuh tempo tiga bulan atau kurang		
Rekening Dolar AS:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BRI	770.655	508.397
- BNI	323.448	193.671
- BTN	205.000	127.500
- Bank Mandiri	34.625	32.760
- PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga ("BRI Agroniaga")	18.500	-
- Bank Syariah Mandiri	275	50.005
 <u>Pihak ketiga</u>		
- Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC")	-	20.000
- Citibank, N.A.	-	15.000
- Bank Muamalat	-	12.000
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	1.622	7.900
Total deposito berjangka - rekening Dolar AS	<u>1.354.125</u>	<u>967.233</u>
 Rekening Rupiah:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BNI	258.049	505.346
- BRI	252.042	1.351.105
- BTN	217.280	454.425
- BRI Syariah	98.611	13.811
- BNI Syariah	86.889	18.591
- Bank Mandiri	75.729	516.931
- Bank Syariah Mandiri	74.167	137.711
- BRI Agroniaga	66.347	47.807
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	3.237	3.453
 <u>Pihak ketiga:</u>		
- Bank Bukopin	23.799	12.098
- ICBC	21.513	-
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	28.515	27.845
Total deposito berjangka - rekening Rupiah	<u>1.206.178</u>	<u>3.089.123</u>
Total deposito berjangka - rekening mata uang asing lainnya - pihak ketiga	<u>477</u>	<u>6.341</u>
Total deposito berjangka	<u>2.560.780</u>	<u>4.062.697</u>
Total kas dan setara kas	<u>6.756.252</u>	<u>9.112.312</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Suku bunga tahunan deposito berjangka per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	2,50% - 9,00%	3,25% - 9,00%
Dolar AS	0,10% - 3,65%	0,50% - 3,37%
Dolar Singapura	0,50% - 1,00%	0,50%

Eksposur maksimum terhadap resiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

6. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Kas yang dibatasi penggunaannya menunjukkan Dolar AS dan Rupiah rekening *escrow* yang ada di bank adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rekening Dolar AS:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BRI	111.956	11.725
- BNI	6.094	10.401
- Bank Mandiri	5.137	58.140
<u>Pihak ketiga</u>		
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. ("HSBC")	35.632	-
- BNP Paribas	18.000	18.000
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	652	4.685
Rekening Rupiah:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BNI	3.009	3.553
- Bank Mandiri	1.415	990
- BRI	234	1.421
Total kas yang dibatasi penggunaannya	<u>182.129</u>	<u>108.915</u>

Tingkat bunga per tahun atas kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	4,25% - 7,65%	5,00%-7,80%
Dolar AS	0,50% - 3,25%	0,24%-0,80%

Rekening Dolar AS

Rekening *escrow* berkaitan dengan *Letter of Credit* ("L/C") yang diterbitkan untuk pengadaan minyak mentah dan produk turunannya serta bank garansi.

Rekening Rupiah

Rekening *escrow* adalah deposito berjangka yang dijamin untuk penerbitan bank garansi dan *performance bond*.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG - PIHAK KETIGA

a. Piutang usaha

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang usaha	2.106.491	2.161.456
Penyisihan penurunan nilai, neto	(214.433)	(228.001)
Jumlah	1.892.058	1.933.455

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan sebesar nilai tercatat dari piutang di atas.

Grup tidak menguasai aset-aset pelanggan sebagai jaminan piutang.

Beberapa piutang usaha entitas anak tertentu digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka panjang entitas anak tertentu tersebut (Catatan 19a).

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha dari pihak ketiga.

Mutasi penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	(228.001)	(211.506)
Penurunan nilai	(12.241)	(29.957)
Pemulihan penurunan nilai	1.921	7.652
Laba selisih kurs	23.888	5.810
Saldo akhir	(214.433)	(228.001)

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha dari pihak ketiga.

Piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dolar AS	1.278.057	1.323.528
Rupiah	825.223	837.130
Dolar Singapura	3.115	700
Euro	96	98
Jumlah	2.106.491	2.161.456

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

7. PIUTANG - PIHAK KETIGA (lanjutan)

b. Piutang lain-lain

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Aset reasuransi	532.781	333.119
Piutang yang berasal dari operasi minyak dan gas bumi pada entitas anak	149.529	132.545
Lain-lain	295.072	286.788
Sub jumlah	977.382	752.452
Penyisihan penurunan nilai	(20.450)	(18.140)
Total piutang lain-lain	956.932	734.312

Aset reasuransi mempresentasikan jumlah premi yang dibayar atau bagian premi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. atas transaksi reasuransi dan retrosesi prospektif.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	(18.140)	(18.551)
(Penambahan) pemulihan penurunan nilai	(2.310)	411
Saldo akhir	(20.450)	(18.140)

Berdasarkan penelaahan atas saldo piutang lain-lain pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

8. PIUTANG PEMERINTAH

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Perusahaan:		
Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga	5.451.285	2.924.148
Piutang atas penggantian biaya subsidi JBT	490.256	175.556
Piutang atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg	310.924	1.147.538
Piutang imbalan jasa pemasaran	72.489	72.489
Piutang atas penggantian biaya subsidi minyak tanah	17.529	16.828
Konversi minyak tanah	839	10.626
Sub jumlah	6.343.322	4.347.185
Entitas anak	418.762	411.224
Sub jumlah	6.762.084	4.758.409
Penyisihan penurunan nilai piutang imbalan jasa pemasaran	(72.489)	-
Jumlah (Catatan 40)	6.689.595	4.758.409
Bagian lancar	(3.375.794)	(1.834.261)
Bagian tidak lancar	3.313.801	2.924.148

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang Pemerintah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	-	(110.936)
Penurunan nilai	(72.489)	-
Pemulihan penurunan nilai	-	106.085
Laba selisih kurs	-	4.851
Saldo akhir	(72.489)	-

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga

Rincian piutang atas pengakuan selisih harga adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang atas pendapatan selisih harga:		
2019	1.888.134	-
2018	2.657.132	2.657.132
2017	1.248.347	1.248.347
Sub jumlah	5.793.613	3.905.479
Penyesuaian nilai wajar piutang:		
2019	(366.186)	-
2018	(773.562)	(773.562)
2017	(207.769)	(207.769)
Sub jumlah	(1.347.517)	(981.331)
Piutang bersih setelah penyesuaian nilai wajar dan sebelum efek <i>unwinding interest</i> :		
2019	1.521.948	-
2018	1.883.570	1.883.570
2017	1.040.578	1.040.578
Sub jumlah	4.446.096	2.924.148
Dampak dari <i>unwinding interest</i> :		
2019	-	-
2018	655.182	-
2017	212.684	-
Sub jumlah (Catatan 37)	867.866	-
Dampak dari selisih kurs:		
2019	-	-
2018	90.152	-
2017	47.171	-
Sub jumlah	137.323	-
Saldo akhir neto:		
2019	1.521.948	-
2018	2.628.904	1.883.570
2017	1.300.433	1.040.578
Jumlah	5.451.285	2.924.148

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga (lanjutan)

Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK atas Volume dan Nilai Subsidi Penyaluran JBT serta Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 pada PT Pertamina (Persero) No. 12/ST.04/04/2020 tanggal 27 April 2020, menyatakan Perhitungan Kelebihan (Kekurangan) Penerimaan Atas Penetapan Harga Jual Eceran JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Tahun 2019 pada Perusahaan disebutkan sebagai berikut:

- Kekurangan penerimaan atas Selisih Harga dalam penyaluran JBT Minyak Solar Tahun 2019 sebesar sebesar Rp16,39 triliun atau setara dengan US\$1.179.043 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp2,49 triliun atau setara dengan US\$179.251);
- Kekurangan penerimaan atas penyaluran JBKP Premium Non Jamali tahun 2019 sebesar Rp8,99 triliun atau setara dengan US\$646.390 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp1,32 triliun atau setara dengan US\$95.223);
- Kekurangan penerimaan atas penyaluran JBKP Premium Jamali tahun 2019 sebesar Rp6,02 triliun atau setara dengan US\$433.187 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp885 milyar atau setara dengan US\$63.698).

Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-361/MK.02/2020 tanggal 6 Mei 2020, Menteri Keuangan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, mengeluarkan kebijakan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan Perusahaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar, JBKP Premium Jamali dan Non Jamali Tahun 2019. Nilai penggantian JBT Minyak Solar, JBKP Premium Jamali dan JBKP Premium Non Jamali masing-masing ditetapkan sebesar:

- Penggantian JBT Minyak Solar ditetapkan sebesar Rp16,39 triliun atau setara dengan US\$1.179.043 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp2,49 triliun atau setara dengan US\$179.251);
- Penggantian JBKP Premium Jamali ditetapkan sebesar Rp8,99 triliun atau setara dengan US\$646.390 (termasuk PPN dan PBBKB sebesar Rp1,32 triliun atau setara dengan US\$95.223);
- Penggantian JBKP Premium Non Jamali ditetapkan sebesar Rp5,49 triliun atau setara dengan US\$394.851 (termasuk PPN dan PBBKN sebesar Rp801,74 milyar atau setara dengan US\$57.675).

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Pencatatan dan Penyajian Utang Piutang kompensasi antara Kementerian Keuangan RI dan Perusahaan No. BA-24/AG.6/2020 dan No. 004/H00000/2020-S0, disepakati:

1. Utang piutang pendapatan selisih harga senilai Rp45 triliun atau setara dengan US\$3.237.177) dicatat dan disajikan sebagai utang piutang lancar dengan rincian:
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBT Minyak Solar tahun 2017 sebesar Rp20,8 triliun atau setara dengan US\$1.495.498;
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBT Minyak Solar tahun 2018 sebesar Rp24,2 triliun atau setara dengan US\$1.741.679.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga (lanjutan)

2. Utang piutang pendapatan selisih harga senilai Rp51,5 triliun (setara dengan US\$3.704.960) dicatat dan disajikan sebagai utang piutang tidak lancar dengan rincian:
- Utang piutang pendapatan selisih harga JBT Minyak Solar tahun 2018 sebesar Rp5,1 triliun (setara dengan US\$366.981);
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBKP Premium Non Jamali tahun 2018 sebesar Rp15,6 triliun (setara dengan US\$1.117.695);
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBT Minyak Solar tahun 2019 sebesar Rp16,4 triliun (setara dengan US\$1.179.043);
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBKP Premium Non Jamali tahun 2019 sebesar Rp8,9 triliun (setara dengan US\$646.390);
 - Utang piutang pendapatan selisih harga JBKP Premium Jamali tahun 2018 sebesar Rp5,5 triliun (setara dengan US\$394.851).

Sesuai dengan Berita Acara tersebut perusahaan melakukan reklasifikasi porsi piutang lancar dan piutang jangka panjang dan melakukan penyesuaian asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan nilai wajar seperti dijelaskan di bawah ini.

Asumsi perhitungan nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tahun	Termin pembayaran	Tingkat suku bunga diskonto (yield) obligasi Rupiah Pemerintah	Estimasi tahun penerimaan
2018	Termin 1	7,91%	2022
	Termin 2	8,01%	2023
2017	Termin 1	7,38%	2020
	Termin 2	7,72%	2021

Asumsi perhitungan nilai wajar pada tahun Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tahun	Termin pembayaran	Tingkat suku bunga diskonto (yield) obligasi Rupiah Pemerintah	Estimasi tahun penerimaan
2019	Termin 1	6,25%	2022
	Termin 2	6,46%	2023
2018	Termin 1	5,94%	2021

Adanya perubahan asumsi pembayaran dan perhitungan nilai wajar tersebut di atas mengakibatkan percepatan pengakuan *unwinding interest* atas pendapatan selisih HJE tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar US\$132.286 dan US\$501.736.

Penyesuaian nilai wajar atas pengakuan pendapatan dan piutang dari Pemerintah atas Selisih Harga tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5,09 triliun atau setara dengan US\$366.186, dan Rp1,93 triliun atau setara dengan US\$133.521.

Pengakuan pendapatan dan piutang atas selisih harga tahun 2017 dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. 642/MK.02/2018 tanggal 24 Agustus 2018, Menteri Keuangan berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan pendapatan Perusahaan dari hasil penjualan JBT Solar sesuai dengan LHP BPK. Perusahaan mencatat piutang bersih atas kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT solar tahun 2017 sebesar Rp18,08 triliun atau setara dengan US\$1.248.347, setelah dikurangi PPN dan PBBKB sebesar Rp2,71 triliun setara dengan US\$187.252, dan setelah dikurangi penyesuaian nilai wajar piutang.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Piutang atas pengakuan pendapatan Selisih Harga (lanjutan)

Sedangkan pengakuan pendapatan dan piutang atas selisih harga tahun 2018 dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-430/MK.02/2019 tanggal 28 Mei 2019, Menteri Keuangan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Menteri ESDM dan Menteri BUMN, mengeluarkan kebijakan bahwa Pemerintah akan mengganti kekurangan penerimaan Perusahaan dari hasil penjualan JBT Minyak Solar dan JBKP Premium Non Jamali Tahun 2018 sesuai dengan LHP BPK No. 31/AUDITAMA VII/PDPTT/05/2019. Sedangkan untuk kekurangan dan kelebihan penerimaan Perusahaan dari penjualan JBKP Premium Jamali menjadi kekurangan dan kelebihan penerimaan Perusahaan. Perusahaan mencatat piutang bersih atas kekurangan pendapatan dari hasil penjualan JBT solar dan JBKP Premium Non Jamali tahun 2018 sebesar Rp38,48 triliun (setara dengan US\$2.657.132) setelah dikurangi PPN dan PBBKB sebesar Rp6,37 triliun atau setara dengan US\$440.001, dan setelah dikurangi penyesuaian nilai wajar piutang.

b. Piutang atas penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg

Piutang ini merupakan penggantian biaya subsidi LPG 3 kg yang disalurkan kepada masyarakat. Penugasan Pemerintah dalam bentuk PSO kepada Perusahaan dan harganya ditetapkan berdasarkan kontrak tahunan dengan Menteri ESDM.

Saldo piutang subsidi LPG 3 kg ini akan dibayarkan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") periode berikutnya.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	1.147.538	1.404.911
Penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg tahun berjalan (Catatan 28)	2.673.170	3.496.603
Koreksi audit pemerintahan (BPK dan ESDM) untuk penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg tahun:		
- 2019 (Catatan 28)	(1.073)	-
- 2018 (Catatan 28)	-	(1.252)
- 2017 (Catatan 28)	-	(5.661)
Penerimaan tunai	(3.551.833)	(3.614.277)
Penyesuaian nilai wajar piutang subsidi (Catatan 28)	(19.411)	-
Untung (rugi) selisih kurs	62.533	(132.786)
Saldo akhir	<u>310.924</u>	<u>1.147.538</u>

c. Piutang atas penggantian biaya subsidi JBT

Piutang Perusahaan atas penggantian biaya subsidi JBT merupakan tagihan atas subsidi JBT Solar, Biosolar dan Minyak Tanah yang disalurkan kepada masyarakat.

Penugasan Pemerintah dalam bentuk PSO kepada Perusahaan ditetapkan berdasarkan kontrak tahunan dengan BPH Migas. Penetapan harga jual BBM bersubsidi tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

c. Piutang atas penggantian biaya subsidi JBT (lanjutan)

Saldo piutang penggantian subsidi JBT Solar, Biosolar dan Minyak Tanah, ini akan dibayarkan melalui mekanisme APBN periode berikutnya.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	175.556	473.928
Penggantian biaya subsidi JBT Solar, Biosolar dan Minyak Tanah untuk tahun berjalan (Catatan 28)	2.263.031	2.126.796
Pajak-pajak	168.792	266.693
Koreksi audit pemerintahan (BPK dan ESDM) untuk penggantian biaya subsidi JBT Solar, Biosolar dan Minyak Tanah tahun:		
- 2019 (Catatan 28)	(2.060)	-
- 2018 (Catatan 28)	-	(699)
- 2017 (Catatan 28)	-	(147)
Penerimaan tunai	(2.101.936)	(2.600.487)
Penyesuaian nilai wajar piutang subsidi (Catatan 28)	(38.582)	-
Untung (rugi) selisih kurs	25.455	(90.528)
Saldo akhir	490.256	175.556

Pada 16 Agustus 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan No. 40 Tahun 2018 menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Sesuai dengan peraturan baru tersebut, harga jual eceran Solar dan Biosolar per liter pada titik pengiriman dihitung berdasarkan harga formula, termasuk PPN, dengan subsidi maksimum Rp2.000 (nilai penuh) per liter dan diterapkan secara retrospektif mulai 1 Januari 2018.

d. Piutang imbalan jasa pemasaran

Piutang ini merupakan jumlah tagihan Perusahaan kepada Pemerintah melalui SKK Migas untuk komisi jasa memasarkan minyak mentah, gas bumi dan LNG milik Pemerintah.

Rincian piutang imbalan jasa pemasaran adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Imbalan jasa pemasaran:		
2018	22.587	22.587
2017	26.529	26.529
2016	23.373	23.373
Sub jumlah	72.489	72.489
Penyisihan penurunan nilai	(72.489)	-
Saldo akhir	-	72.489

Berdasarkan surat DJA No. S-271/AG/2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal Imbalan (*Fee*) Pengelolaan dan/atau Penjualan Minyak Mentah dan/atau Kondensat Bagian Negara (MMKBN) dan berdasarkan notulen rapat perihal Pembahasan Volume Penjualan LNG Bagian Negara, Perusahaan belum mendapatkan kesepakatan antara SKK Migas dan DJA terkait tagihan jasa pemasaran, sehingga Perusahaan melakukan provisi sepenuhnya atas tagihan tahun 2016-2018 dan tidak mengakui pendapatan jasa pemasaran atas tagihan tahun 2019.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

8. PIUTANG PEMERINTAH (lanjutan)

e. Piutang entitas anak

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
PEP		
- <i>Domestic Market Obligation</i> ("DMO") fees	99.370	106.398
- <i>Underlifting</i>	32.040	18.942
PHE		
- DMO fees	27.261	15.414
- <i>Underlifting</i>	22.684	25.730
PEPC		
- <i>Underlifting</i>	202.563	224.904
PHI		
- DMO fees	32.314	18.780
- <i>Underlifting</i>	2.530	1.056
Jumlah - entitas anak	<u>418.762</u>	<u>411.224</u>

DMO fees merupakan tagihan kepada Pemerintah sehubungan dengan kewajiban entitas anak dalam menyediakan minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri untuk produk minyak sesuai dengan KKS-nya.

Piutang *underlifting* merupakan piutang entitas anak dari SKK Migas karena volume *lifting* minyak mentah dan gas bumi yang dilakukan oleh SKK Migas melebihi *entitlement* pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan evaluasi manajemen terhadap kolektibilitas saldo masing-masing piutang entitas anak, Perusahaan berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai memadai untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang entitas anak dari Pemerintah.

f. Piutang atas penggantian biaya subsidi jenis minyak tanah

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 8a di atas, berdasarkan LHP BPK No. 31/AUDITAMA VII/PDPTT/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perusahaan mengalami kekurangan penerimaan dalam penyaluran JBT Minyak Tanah sebesar Rp243,68 miliar atau setara dengan US\$16.828 (tidak termasuk PPN sebesar Rp24,38 miliar atau setara dengan US\$1.683) akibat penetapan Harga Indeks Pasar ("HIP") dan Harga Dasar JBT Minyak Tanah tidak sesuai dengan formula perhitungan harga jual eceran BBM yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No. 62K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa atas kekurangan tersebut akan mendapatkan penggantian dari Pemerintah melalui mekanisme subsidi.

9. PERSEDIAAN

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Gas	4.805	13.984
Minyak mentah:		
Produksi dalam negeri	1.149.929	1.026.225
Impor	527.401	579.765
Sub jumlah minyak mentah	<u>1.677.330</u>	<u>1.605.990</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Produk minyak:		
Minyak solar	662.800	1.018.791
Bensin Premium	606.642	536.309
Pertamax, Pertamax Turbo, Peralite dan Pertadex (bahan bakar diesel)	495.518	491.005
Intermedia	370.703	337.246
Produk minyak dalam proses produksi	326.094	399.963
LPG	224.826	262.104
Avtur dan Avigas	177.278	264.545
Petrokimia	131.670	170.815
Minyak tanah	93.967	94.299
BBM industri dan <i>marine</i>	91.722	148.621
Minyak diesel industri	14.207	17.563
Lainnya	342.728	476.999
Sub jumlah produk minyak (Catatan 31)	<u>3.538.155</u>	<u>4.218.260</u>
Sub jumlah gas, minyak mentah dan produk minyak	<u>5.220.290</u>	<u>5.838.234</u>
Penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 31)	<u>(82.654)</u>	<u>(167.270)</u>
	5.137.636	5.670.964
Material	858.037	754.228
Penyisihan penurunan nilai persediaan material	<u>(102.341)</u>	<u>(102.027)</u>
	755.696	652.201
Jumlah	<u>5.893.332</u>	<u>6.323.165</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal (Catatan 31)	(167.270)	(92.854)
Pembalikan (penambahan) selama tahun berjalan, neto	84.616	(74.416)
Saldo akhir	<u>(82.654)</u>	<u>(167.270)</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai material adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	(102.027)	(103.183)
(Penambahan) pembalikan selama tahun berjalan, neto	(314)	1.156
Saldo akhir	<u>(102.341)</u>	<u>(102.027)</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak dan material mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari penurunan nilai realisasi persediaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya (Catatan 12). Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang dapat timbul terkait dengan persediaan yang diasuransikan

10. INVESTASI LAINNYA

Investasi ini merupakan aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada Perusahaan sehubungan likuidasi Pertamina Energy Trading Limited ("Petral"), Zambesi Investment Limited ("Zambesi") dan Pertamina Energy Services Pte. Ltd. ("PES") sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan tanggal 13 Juli 2015.

Pada tanggal 13 Maret 2017, Petral telah mendistribusikan dananya kepada Perusahaan. Pada 16 Juni 2017, Zambesi telah dilikuidasi. Pada tanggal 31 Oktober 2017, Petral telah dilikuidasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo aset neto yang tersedia untuk didistribusikan kepada Perusahaan berdasarkan laporan likuidator untuk PES sebesar US\$85.834 (2018: US\$80.171).

Berdasarkan RUPS Perusahaan No. SR-16/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui untuk memperpanjang proses likuidasi PES sampai dengan selesainya proses pembubaran/likuidasi sekaligus melakukan aksi korporasi yang diperlukan untuk menuntaskan proses tersebut.

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Investasi pada blok minyak dan gas, neto	925.518	1.024.237
Investasi pada entitas asosiasi, neto	976.801	725.846
Investasi pada obligasi, neto	448.567	391.307
Investasi pada ventura bersama	330.458	369.922
Properti investasi	272.378	280.668
Penyertaan saham, neto	6.292	6.292
Aset keuangan lainnya	13.865	20.782
Jumlah	2.973.879	2.819.054

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Investasi pada blok minyak dan gas

Investasi pada blok minyak dan gas menunjukkan investasi Grup pada beberapa blok minyak dan gas di Malaysia yang dioperasikan oleh PTTEP HK Offshore Limited. Grup mencatat investasi tersebut menggunakan metode ekuitas karena memiliki pengaruh yang signifikan dalam *undivided interest* pada blok minyak dan gas tersebut.

31 Desember 2019				
	Saldo awal	Penambahan (Catatan 32)	Pemulihan/ (penurunan) nilai (Catatan 38)	Saldo akhir
Biaya	1.556.487	29.446	(35.184)	1.550.749
Akumulasi amortisasi	(532.250)	(92.981)	-	(625.231)
Nilai buku neto	1.024.237	(63.535)	(35.184)	925.518

31 Desember 2018				
	Saldo awal	Penambahan (Catatan 32)	Pemulihan/ (penurunan) nilai (Catatan 38)	Saldo akhir
Biaya	1.614.965	96.295	(154.773)	1.556.487
Akumulasi amortisasi	(387.778)	(144.472)	-	(532.250)
Nilai buku neto	1.227.187	(48.177)	(154.773)	1.024.237

b. Investasi pada entitas asosiasi

Perubahan investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Saldo akhir
Perusahaan							
PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	48.038	-	(2.565)	(1.674)	(3.571)	40.228
PT Tuban Petrochemical Industries	51,00%	-	224.171	-	9.620	-	233.791
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (Catatan 40 dan 38)	37,65%	82.005	20.672	110	(56.407)	-	46.380
		130.043	244.843	(2.455)	(48.461)	(3.571)	320.399
Investasi tidak langsung pada saham entitas asosiasi							
PT Donggi Senoro LNG	29,00%	279.219	-	-	14.078	-	293.297
PT Asuransi Samsung Tugu Seplat Petroleum Development Company Plc., Nigeria	30,00%	9.069	-	(31)	665	(65)	9.638
Lainnya	20,46%	224.548	-	-	59.914	(11.943)	272.519
	19,67% - 50,00%	82.967	-	(853)	(1.166)	-	80.948
		595.803	-	(884)	73.491	(12.008)	656.402
Jumlah investasi pada entitas asosiasi		725.846	244.843	(3.339)	25.030	(15.579)	976.801

31 Desember 2018							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Saldo akhir
Perusahaan							
PPT Energy Trading Co., Ltd.	50,00%	35.489	-	-	12.549	-	48.038
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (Catatan 40 dan 38)	48,59%	151.937	-	-	(69.932)	-	82.005
		187.426	-	-	(57.383)	-	130.043

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

b. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)

31 Desember 2018							
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Penambahan/ (pengurangan)	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada saham entitas asosiasi							
PT Donggi Senoro LNG	29,00%	240.437	-	2	38.780	-	279.219
PT Asuransi Samsung Tugu	30,00%	8.741	-	19	434	(125)	9.069
Seplat Petroleum Development Company Plc., Nigeria	20,46%	92.440	-	68.043	76.124	(12.059)	224.548
Lainnya	19,67%-50,00%	54.650	27.458	2.298	(1.439)	-	82.967
		<u>396.268</u>	<u>27.458</u>	<u>70.362</u>	<u>113.899</u>	<u>(12.184)</u>	<u>595.803</u>
Jumlah investasi pada entitas asosiasi		<u>583.694</u>	<u>27.458</u>	<u>70.362</u>	<u>56.516</u>	<u>(12.184)</u>	<u>725.846</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai investasi di entitas asosiasi sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai investasi.

Bagian Grup atas hasil dari asosiasi utama dan aset teragregasi (termasuk *goodwill*) dan liabilitas, adalah sebagai berikut:

	Negara berdiri	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)	Persentase kepemilikan
31 Desember 2019						
- PPT Energy Trading Co., Ltd.	Jepang	139.339	(68.572)	391.020	(10.604)	50,00%
- PT Tuban Petrochemical Industries	Jepang	346.990	(109.193)	243.206	41.724	51,00%
- PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama	Indonesia	876.161	(751.983)	85.219	116.089	37,65%
- PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	2.630.034	(1.618.410)	1.059.671	48.543	29,00%
- PT Asuransi Samsung Tugu	Indonesia	74.449	(529.051)	9.938	2.214	30,00%
- Seplat Petroleum Development Company Plc., Nigeria	Nigeria	3.271.110	(1.467.171)	697.777	277.008	20,46%
31 Desember 2018						
- PPT Energy Trading Co., Ltd.	Jepang	118.983	(30.486)	731.189	25.098	50,00%
- PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama	Indonesia	866.155	(697.385)	65.136	(141.991)	48,59%
- PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	2.646.556	(1.669.778)	1.174.024	133.726	29,00%
- PT Asuransi Samsung Tugu	Indonesia	61.997	(31.766)	9.046	1.446	30,00%
- Seplat Petroleum Development Company Plc., Nigeria	Nigeria	2.526.565	(925.680)	746.140	146.576	20,46%

c. Investasi pada obligasi

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo investasi pada obligasi masing-masing sebesar US\$448.567 dan US\$391.307 merupakan investasi obligasi yang dikeluarkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama. Kenaikan investasi pada obligasi disebabkan oleh *deferral notes* yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2019 sebesar US\$96.016 (Catatan 38). Dengan berlakunya *deferral notes*, utang bunga dan penalti yang belum dibayarkan dikonversi menjadi pokok. Kenaikan investasi pada obligasi dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai investasi pada obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar US\$38.756 (Catatan 38).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

d. Investasi pada ventura bersama

Perubahan investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019								
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Investasi tambahan	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Pemulihan/ (penurunan) nilai	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada ventura bersama								
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	202.743	-	(48)	29.381	(48.690)	-	183.386
PT Perta-Samtan Gas	66,00%	89.976	-	(3.135)	16.219	(23.100)	-	79.960
PT Patra SK	35,00%	62.406	-	(57)	5.166	(10.500)	-	57.015
PT Indo Thai Trading*)	51,00%	7.070	(7.070)	-	-	-	-	-
PT Perta Daya Gas	65,00%	3.734	-	(2.156)	3.296	-	-	4.874
PT Permata Karya Jasa	60,00%	3.586	-	-	1.230	-	-	4.816
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	55,00%	407	-	-	-	-	-	407
Jumlah investasi pada ventura bersama		369.922	(7.070)	(5.396)	55.292	(82.290)	-	330.458

*) Sejak 31 Juli 2019, Grup telah mengendalikan PT Indo Thai Trading melalui PT Pertamina Patra Niaga

31 Desember 2018								
	Persentase kepemilikan	Saldo awal	Investasi tambahan	Perubahan lain	Bagian laba/ (rugi), neto	Dividen	Pemulihan/ (penurunan) nilai	Saldo akhir
Investasi tidak langsung pada ventura bersama								
PT Transportasi Gas Indonesia	59,87%	281.700	-	(1.013)	27.814	(105.758)	-	202.743
PT Perta-Samtan Gas	66,00%	91.173	-	32	21.871	(23.100)	-	89.976
PT Patra SK	35,00%	65.769	-	-	5.387	(8.750)	-	62.406
PT Indo Thai Trading	51,00%	6.281	790	(791)	790	-	-	7.070
PT Perta Daya Gas	65,00%	1.683	-	28	2.023	-	-	3.734
PT Permata Karya Jasa	60,00%	-	2.416	-	1.382	(212)	-	3.586
PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	55,00%	407	-	-	-	-	-	407
Unimar L.L.C	50,00%	10.392	(7.176)	(1.657)	6.941	(8.500)	-	-
Jumlah investasi pada ventura bersama		457.405	(3.970)	(3.401)	66.208	(146.320)	-	369.922

Bagian Grup atas hasil entitas ventura bersama utama dan aset agregat (termasuk *goodwill*) dan liabilitas adalah sebagai berikut:

	Negara berdiri	Aset	Liabilitas	Pendapatan	Laba (rugi)	Persentase kepemilikan	
31 Desember 2019							
-	PT Transportasi Gas Indonesia	Indonesia	365.829	(59.521)	157.117	49.075	59,87%
-	PT Perta-Samtan Gas	Indonesia	151.803	(69.469)	97.783	24.574	66,00%
-	PT Patra SK	Indonesia	206.881	(43.981)	299.674	14.760	35,00%
-	PT Perta Daya Gas	Indonesia	50.497	(40.013)	9.748	4.740	65,00%
-	PT Permata Karya Jasa	Indonesia	10.771	(2.684)	16.685	2.050	60,00%
-	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	Indonesia	739	-	-	-	55,00%
31 Desember 2018							
-	PT Transportasi Gas Indonesia	Indonesia	735.029	(96.391)	153.413	46.458	59,87%
-	PT Perta-Samtan Gas	Indonesia	166.010	(29.683)	121.802	33.187	66,00%
-	PT Patra SK	Indonesia	232.842	(54.539)	341.114	15.391	35,00%
-	PT Indo Thai Trading	Indonesia	35.332	(21.470)	184.779	1.549	51,00%
-	PT Perta Daya Gas	Indonesia	48.618	(42.873)	12.497	3.113	65,00%
-	PT Permata Karya Jasa	Indonesia	6.308	(2.040)	16.301	1.383	60,00%
-	PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia	Indonesia	739	-	-	-	55,00%
-	Unimar L.L.C	USA	33.740	(19.387)	43.918	13.881	50,00%

Berdasarkan Akta Notaris No. 27 tanggal 31 Juli 2019, PTTGC International Private Limited menjual dan mengalihkan kepemilikan 3.920.000 lembar saham PT Indo Thai Trading ke PT Patra Trading, anak perusahaan PT Pertamina Patra Niaga. Karena itu, sejak tanggal tersebut, Grup mengendalikan PT Indo Thai Trading.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

e. Properti investasi

31 Desember 2019					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya historis:					
Tanah dan hak atas tanah	266.911	-	(7.570)	1.157	260.498
Bangunan	42.102	-	(252)	835	42.685
Jumlah biaya historis	309.013	-	(7.822)	1.992	303.183
Akumulasi depresiasi					
Bangunan	(28.345)	(1.954)	-	(506)	(30.805)
Nilai buku, neto	280.668				272.378
31 Desember 2018					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya historis:					
Tanah dan hak atas tanah	269.226	1.074	(17.368)	13.979	266.911
Bangunan	43.287	1.217	-	(2.402)	42.102
Jumlah biaya historis	312.513	2.291	(17.368)	11.577	309.013
Akumulasi depresiasi					
Bangunan	(28.159)	(2.058)	-	1.872	(28.345)
Nilai buku, neto	284.354				280.668

Beban depresiasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 untuk properti investasi senilai US\$1.954 dan US\$2.058 (Catatan 36).

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh properti investasi Grup, kecuali tanah dan hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi (Catatan 12).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, manajemen telah mengestimasi nilai wajar untuk properti investasi senilai US\$1.579.971 dan US\$1.803.218.

Pendapatan rental dari properti investasi yang dicatat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$25.395 dan US\$26.588.

Manajemen berkeyakinan, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan pada kondisi tertentu yang mengindikasikan penurunan nilai properti investasi pada tanggal 31 Desember 2019.

f. Penyertaan saham

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Saldo	Persentase kepemilikan	Saldo	Persentase kepemilikan
Perusahaan				
- PT Seamless Pipe Indonesia				
Jaya	25.026	4,97%	25.026	4,97%
- PT Arun NGL ^{a) b)}	170	100,00%	170	100,00%
- PT Badak NGL ^{b)}	149	55,00%	149	55,00%
Sub jumlah	25.345		25.345	

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYERTAAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

f. Penyertaan saham (lanjutan)

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Saldo	Persentase kepemilikan	Saldo	Persentase kepemilikan
Entitas anak				
- PT Staco Jasapratama				
Indonesia	751	4,46%	751	4,46%
- PT Marga Raya Jawa Tol	2.690	6,86%	2.690	6,86%
- PT Trans Javagas Pipeline	739	10,00%	739	10,00%
- PT Asuransi Maipark				
Indonesia	604	7,31%	604	7,31%
- PT Bhakti Patra				
Nusantara	77	4,11%	77	4,11%
- PT Banten Gas Sinergy	3	0,14%	3	0,14%
Sub jumlah	4.864		4.864	
Jumlah	30.209		30.209	
Dikurangi:				
Penyisihan penurunan nilai	(23.917)		(23.917)	
Neto	6.292		6.292	

a) dalam proses likuidasi
b) lihat Catatan 1b

Grup mengelompokkan penyertaan modalnya sebagai tersedia untuk dijual pada harga perolehan karena Perusahaan, secara substansial, tidak memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan tersebut. Penyertaan ini diukur pada harga perolehan karena nilai wajarnya sulit untuk ditentukan secara layak.

g. Aset keuangan lainnya

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, aset keuangan lainnya terutama merupakan investasi pada obligasi yang dimiliki oleh PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.

12. ASET TETAP

	31 Desember 2019					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Harga perolehan						
Perolehan langsung:						
Tanah dan hak atas tanah	1.705.095	55.161	-	46.977	3.228	1.810.461
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	9.322.018	145.226	-	670.431	1.434	10.139.109
Kilang	4.265.934	-	-	399.314	42	4.665.290
Bangunan	1.281.451	14.115	(458)	30.201	6.041	1.331.350
Kapal laut dan pesawat terbang	2.096.335	41.201	-	26.983	9.688	2.174.207
HBM bergerak	1.633.638	52.560	(23.506)	122.802	16.280	1.801.774
Aset dalam penyelesaian	2.129.917	1.479.940	(327)	(1.358.526)	2.122	2.253.126
Sub jumlah	22.434.388	1.788.203	(24.291)	(61.818)	38.835	24.175.317

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2019						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	205.737	1.054	-	7.029	-	213.820
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	414.634	15.110	-	(41.815)	-	387.929
HBM bergerak	167.015	585	(577)	(7.679)	2.112	161.456
Sub jumlah	787.386	16.749	(577)	(42.465)	2.112	763.205
Jumlah harga perolehan	23.221.774	1.804.952	(24.868)	(104.283)	40.947	24.938.522
Akumulasi penyusutan						
Perolehan langsung:						
Hak atas tanah	(212)	-	-	-	(51)	(263)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(4.834.321)	(543.459)	2.704	(567)	(923)	(5.376.566)
Kilang	(2.598.926)	(275.029)	-	3.352	(39)	(2.870.642)
Bangunan	(526.815)	(56.489)	418	(3.174)	(2.392)	(588.452)
Kapal laut dan pesawat terbang	(813.091)	(104.453)	-	2.534	(2.175)	(917.185)
HBM bergerak	(986.804)	(109.461)	18.296	9.319	(10.447)	(1.079.097)
Sub jumlah	(9.760.169)	(1.088.891)	21.418	11.464	(16.027)	(10.832.205)
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	(161.389)	(18.674)	-	(6.293)	-	(186.356)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(249.815)	(34.421)	-	8.617	-	(275.619)
HBM bergerak	(136.838)	(6.649)	315	1.254	(92)	(142.010)
Sub jumlah	(548.042)	(59.744)	315	3.578	(92)	(603.985)
Jumlah akumulasi penyusutan	(10.308.211)	(1.148.635)	21.733	15.042	(16.119)	(11.436.190)
Penyisihan penurunan nilai	(54.289)	(98.297)	126	2.482	(27)	(150.005)
Nilai buku, neto	12.859.274					13.352.327

31 Desember 2018						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Harga perolehan						
Perolehan langsung:						
Tanah dan hak atas tanah	1.702.277	3.034	-	5.618	(5.834)	1.705.095
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	9.168.847	28.693	(569)	131.485	(6.438)	9.322.018
Kilang	4.022.746	145.518	-	97.740	(70)	4.265.934
Bangunan	1.200.885	20.252	(367)	70.994	(10.313)	1.281.451
Kapal laut dan pesawat terbang	2.015.720	120.523	-	(26.626)	(13.282)	2.096.335
HBM bergerak	1.624.785	36.722	(5.875)	7.713	(29.707)	1.633.638
Aset dalam penyelesaian	1.446.340	1.083.618	-	(397.603)	(2.438)	2.129.917
Sub jumlah	21.181.600	1.438.360	(6.811)	(110.679)	(68.082)	22.434.388
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	157.605	-	-	(155.364)	(2.241)	-
Bangunan	83.987	-	-	121.750	-	205.737
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	369.534	44.097	-	1.003	-	414.634
HBM bergerak	156.432	10.707	-	-	(124)	167.015
Sub jumlah	767.558	54.804	-	(32.611)	(2.365)	787.386
Jumlah harga perolehan	21.949.158	1.493.164	(6.811)	(143.290)	(70.447)	23.221.774

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TETAP (lanjutan)

31 Desember 2018						
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Pengalihan/ reklasifikasi	Penjabaran	Saldo akhir
Akumulasi penyusutan						
Perolehan langsung:						
Hak atas tanah	(876)	-	-	-	664	(212)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(4.393.822)	(504.253)	42	58.559	5.153	(4.834.321)
Kilang	(2.349.134)	(249.586)	-	(307)	101	(2.598.926)
Bangunan	(477.017)	(52.430)	271	(1.435)	3.796	(526.815)
Kapal laut dan pesawat terbang	(775.835)	(105.264)	-	65.138	2.870	(813.091)
HBM bergerak	(969.682)	(103.113)	5.697	61.156	19.138	(986.804)
Sub jumlah	(8.966.366)	(1.014.646)	6.010	183.111	31.722	(9.760.169)
Aset sewa pembiayaan:						
Hak atas tanah	(82.872)	(6.070)	-	88.942	-	-
Bangunan	(58.902)	(14.272)	-	(88.215)	-	(161.389)
Tangki, instalasi pipa dan peralatan lainnya	(210.786)	(38.302)	-	(727)	-	(249.815)
HBM bergerak	(133.666)	(7.877)	-	4.628	77	(136.838)
Sub jumlah	(486.226)	(66.521)	-	4.628	77	(548.042)
Jumlah akumulasi penyusutan	(9.452.592)	(1.081.167)	6.010	187.739	31.799	(10.308.211)
Penyisihan penurunan nilai	(57.055)	-	2.719	-	47	(54.289)
Nilai buku, neto	12.439.511					12.859.274

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban pokok penjualan (Catatan 31)	537.783	566.412
Beban penjualan dan pemasaran (Catatan 35)	383.594	328.695
Beban umum dan administrasi (Catatan 36)	131.047	97.655
Beban dari aktivitas operasi lainnya (Catatan 34)	96.211	88.405
Jumlah	1.148.635	1.081.167

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di berbagai lokasi di Indonesia dengan Hak Guna Bangunan ("HGB") berkisar antara 20-30 tahun. Beberapa HGB akan habis masa berlakunya dalam waktu dekat. Manajemen berpendapat bahwa sertifikat HGB tersebut dapat diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset minyak dan gas serta panas bumi dari Grup, kecuali tanah dan hak atas tanah (Catatan 9, 11, 12 dan 13), telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar US\$54.254.089 dan US\$53.391.900.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul terkait dengan aset yang diasuransikan.

Aset tetap tertentu telah dijamin untuk pinjaman jangka panjang anak perusahaan (Catatan 19a).

Bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$18.964 serta US\$31.500 (Catatan 45).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai aset tetap. Pada tahun 2019 aset tetap PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") diturunkan nilainya sebesar US\$98.297 karena terbatasnya sumber arus kas di masa mendatang terkait utilisasi aset tetap tersebut.

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari tanah, kilang, bangunan, kapal, instalasi dan aset bergerak.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI

31 Desember 2019

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Perolehan langsung:					
Tanah dan hak atas tanah	18.281	-	-	1.669	19.950
Sumur minyak dan gas	15.404.342	692.824	(71.352)	1.674.591	17.700.405
Sumur panas bumi	759.351	-	-	32.384	791.735
Instalasi	7.675.508	153.291	(11.229)	13.947	7.831.517
Pabrik LPG	1.538.366	-	(104)	62.334	1.600.596
Bangunan	198.613	-	-	17.322	215.935
HBM bergerak	418.511	22.132	-	148.578	589.221
Sub jumlah	26.012.972	868.247	(82.685)	1.950.825	28.749.359
Aset dalam penyelesaian					
Sumur eksplorasi dan evaluasi	1.380.730	766.115	(37.420)	(286.421)	1.823.004
Sumur pengembangan	2.423.499	1.659.962	(3.591)	(1.610.922)	2.468.948
Sub jumlah	3.804.229	2.426.077	(41.011)	(1.897.343)	4.291.952
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	4.672	-	-	183.639	188.311
Pabrik LPG	12.501	-	(6.335)	(6.166)	-
Bangunan	19.939	-	-	-	19.939
HBM bergerak	195.595	-	-	(183.639)	11.956
Sub jumlah	232.707	-	(6.335)	(6.166)	220.206
Jumlah harga perolehan	30.049.908	3.294.324	(130.031)	47.316	33.261.517
Akumulasi penyusutan, deplesi, dan amortisasi					
Perolehan langsung:					
Sumur minyak dan gas	(7.044.165)	(1.490.479)	29.969	93.527	(8.411.148)
Sumur panas bumi	(152.127)	(39.562)	-	7	(191.682)
Instalasi	(2.717.802)	(387.874)	-	(73.813)	(3.179.489)
Pabrik LPG	(293.601)	(81.294)	-	33.486	(341.409)
Bangunan	(48.441)	(13.299)	-	585	(61.155)
HBM bergerak	(244.360)	(39.362)	-	(139.723)	(423.445)
Sub jumlah	(10.500.496)	(2.051.870)	29.969	(85.931)	(12.608.328)
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	(18.723)	8.604	-	(163.639)	(173.758)
Pabrik LPG	(5.777)	6.164	6.335	(6.722)	-
Bangunan	(18.522)	(243)	-	(42)	(18.807)
HBM bergerak	(181.398)	(2.087)	-	170.395	(13.090)
Sub jumlah	(224.420)	12.438	6.335	(8)	(205.655)
Jumlah akumulasi penyusutan, deplesi, dan amortisasi	(10.724.916)	(2.039.432)	36.304	(85.939)	(12.813.983)
Penyisihan penurunan nilai	(710.706)	(83.511)	106.920	(3.445)	(690.742)
Jumlah nilai buku	18.614.286				19.756.792

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI (lanjutan)

31 Desember 2018					
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo akhir
Harga perolehan					
Perolehan langsung:					
Tanah dan hak atas tanah	18.243	-	-	38	18.281
Sumur minyak dan gas	13.915.574	1.116.330	(107.073)	479.511	15.404.342
Sumur panas bumi	671.595	4.671	-	83.085	759.351
Instalasi	7.213.878	109.761	(1.195)	353.064	7.675.508
Pabrik LPG	1.538.366	-	-	-	1.538.366
Bangunan	173.184	1.152	-	24.277	198.613
HBM bergerak	346.955	39.034	-	32.522	418.511
Sub jumlah	23.877.795	1.270.948	(108.268)	972.497	26.012.972
Aset dalam penyelesaian					
Sumur eksplorasi dan evaluasi	1.326.425	606.380	(120.381)	(431.694)	1.380.730
Sumur pengembangan	2.096.876	1.163.019	(4.519)	(831.877)	2.423.499
Sub jumlah	3.423.301	1.769.399	(124.900)	(1.263.571)	3.804.229
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	4.672	-	-	-	4.672
Pabrik LPG	12.501	-	-	-	12.501
Bangunan	19.939	-	-	-	19.939
HBM bergerak	195.595	-	-	-	195.595
Sub jumlah	232.707	-	-	-	232.707
Jumlah harga perolehan	27.533.803	3.040.347	(233.168)	(291.074)	30.049.908
Akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi					
Perolehan langsung:					
Sumur minyak dan gas	(6.096.976)	(965.091)	38.038	(20.136)	(7.044.165)
Sumur panas bumi	(113.904)	(38.223)	-	-	(152.127)
Instalasi	(2.121.664)	(586.590)	-	(9.548)	(2.717.802)
Pabrik LPG	(179.681)	(113.920)	-	-	(293.601)
Bangunan	(36.698)	(11.743)	-	-	(48.441)
HBM bergerak	(214.002)	(30.358)	-	-	(244.360)
Sub jumlah	(8.762.925)	(1.745.925)	38.038	(29.684)	(10.500.496)
Aset sewa pembiayaan:					
Instalasi	(16.695)	(2.028)	-	-	(18.723)
Pabrik LPG	(5.469)	(308)	-	-	(5.777)
Bangunan	(18.198)	(324)	-	-	(18.522)
HBM bergerak	(181.118)	(280)	-	-	(181.398)
Sub jumlah	(221.480)	(2.940)	-	-	(224.420)
Jumlah akumulasi penyusutan, deplesi dan amortisasi	(8.984.405)	(1.748.865)	38.038	(29.684)	(10.724.916)
Penyisihan penurunan nilai	(518.024)	(218.189)	-	25.507	(710.706)
Jumlah nilai buku	18.031.374				18.614.286

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban produksi hulu dan <i>lifting</i> (Catatan 32)	2.030.834	1.741.040
Beban umum dan administrasi (Catatan 36)	8.598	7.825
Jumlah	2.039.432	1.748.865

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET MINYAK DAN GAS SERTA PANAS BUMI (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, seluruh aset panas bumi milik PGE, PEP, PHE, dan PGN, kecuali hak atas tanah telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lain yang mungkin terjadi (Catatan 12).

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul terkait dengan aset minyak dan gas serta panas bumi yang diasuransikan.

Beban bunga milik PGE yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset panas bumi masing-masing sebesar US\$25.452 dan US\$24.885 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 (Catatan 45).

Kenaikan nilai sumur minyak dan gas pada tahun 2019 merupakan akibat dari penambahan sumur pengembangan di PEP, PEPC, PHM, PHE (2018: pembayaran *signature bonus* Blok Rokan).

Penurunan nilai aset minyak dan gas bumi

Manajemen melakukan pengujian penurunan nilai pada tahun 2019 untuk semua Blok karena terdapat indikasi eksternal dari perkembangan harga minyak. Manajemen telah mengevaluasi aspek komersial dan teknikal berdasarkan hasil dari produksi terkini.

Estimasi jumlah terpulihkan dan nilai buku aset minyak dan gas bumi yang diturunkan nilainya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2019					
	Estimasi jumlah terpulihkan	Nilai buku	Estimasi penurunan/ (pemulihan) nilai	Jumlah penurunan/ (pemulihan) goodwill	Penurunan/ (pemulihan) nilai pada aset minyak dan gas serta panas bumi, neto
PHE dan entitas anaknya	392.622	420.904	28.282	-	28.282
PGE dan entitas anaknya	96.435	107.480	11.045	-	11.045
PGN dan entitas anaknya	592.974	530.238	(62.736)	-	(62.736)
Nilai buku, neto	1.082.031	1.058.622	(23.409)	-	(23.409)
31 Desember 2018					
	Estimasi jumlah terpulihkan	Nilai buku	Estimasi penurunan/ (pemulihan) nilai	Jumlah penurunan/ (pemulihan) goodwill	Penurunan/ (pemulihan) nilai pada aset minyak dan gas serta panas bumi, neto
PHE dan entitas anaknya	173.488	366.793	193.305	-	193.305
Pertamina EP Cepu ADK	55.046	53.708	(1.338)	-	(1.338)
PGN dan entitas anaknya	872.528	898.750	26.222	-	26.222
Nilai buku, neto	1.101.062	1.319.251	218.189	-	218.189

Asumsi harga minyak dan gas bumi serta tingkat diskonto yang digunakan diungkapkan di Catatan 14d.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Dana yang dibatasi penggunaannya	1.211.263	950.052
Uang muka ke pemasok	261.570	133.406
Piutang lain-lain - pihak ketiga	185.505	80.287
Aset bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya (Catatan 25)	146.578	401.120
Biaya dibayar dimuka	82.434	65.319
Piutang sewa pembiayaan	64.973	200.770
Piutang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 40b)	64.557	64.907
<i>Goodwill</i>	53.807	53.807
Piutang pegawai jangka panjang	33.107	37.530
Biaya hak atas tanah	17.775	18.917
Aset dimiliki tidak digunakan untuk operasi	16.070	23.454
Aset tidak berwujud	13.508	13.711
Beban tangguhan	12.679	17.256
Aset <i>non-free</i> dan <i>non-clear</i>	1.837	1.837
Lain-lain	61.149	22.960
Jumlah	<u>2.226.812</u>	<u>2.085.333</u>

a. Dana yang dibatasi penggunaannya

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rekening Dolar AS:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BRI	355.755	321.620
- Bank Mandiri	77.920	14.030
- BNI	66.420	50.016
<u>Pihak ketiga</u>		
- JP Morgan	43.303	31.087
- Lain-lain	6.106	540
Sub jumlah	<u>549.504</u>	<u>417.293</u>
Rekening Rupiah:		
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>		
- BRI	352.363	290.500
- Bank Mandiri	297.342	233.993
- BNI	1.595	840
- Lain-lain	1.878	-
<u>Pihak ketiga</u>		
Lain-lain	8.581	7.426
Sub jumlah	<u>661.759</u>	<u>532.759</u>
Jumlah	<u>1.211.263</u>	<u>950.052</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

a. Dana yang dibatasi penggunaannya (lanjutan)

Sesuai dengan instruksi SKK Migas, per tanggal 31 Desember 2019 PT Pertamina EP, PHE, PEPC, PIEP, dan PGN telah mendepositokan dana masing-masing sebesar US\$310.397 (2018: US\$275.660), US\$65.608 (2018: US\$34.215), US\$33.693 (2018: US\$28.186), US\$35.289 (2018: US\$31.087), dan US\$62.615 (2018: US\$52.425) untuk dana pembongkaran, restorasi lokasi aset dan aktivitas lain yang terkait.

Perusahaan mencadangkan pendanaan kewajiban pascakerja pegawai pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$646.546 dan US\$520.277.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, cadangan pendanaan untuk kegiatan Program Kemitraan masing-masing sebesar Rp12.174 juta atau setara dengan US\$876 dan Rp12.174 juta atau setara dengan US\$841.

Termasuk di dalam dana yang dibatasi penggunaannya adalah penempatan bank terkait dana komitmen pengembangan lapangan di PIEP, PGE, dan PGN.

b. Piutang sewa pembiayaan

Akun ini menampilkan bagian tidak lancar dari piutang sewa pembiayaan yang muncul dari perjanjian sewa antara KJG, entitas anak PGN, dan PLN terkait jalur pipa bawah laut KJG dan fasilitas penerimaan di darat (Perjanjian Pengangkutan Gas ("PPG") Kalija 1 yang diklasifikasikan sebagai transaksi sewa pembiayaan).

Kolektibilitas piutang atas sewa pembiayaan bergantung pada keputusan arbitrase yang saat ini sedang berlangsung dan kemampuan keuangan PCML dan PLN untuk memenuhi kewajiban *ship-or-pay* dalam GTA Kalija I. Grup berpendapat bahwa:

- (1) keputusan arbitrase akan berdampak positif kepada Grup;
- (2) PCML dan PLN akan dapat memenuhi kewajiban *ship-or-pay* dalam GTA Kalija I; dan
- (3) provisi penurunan nilai piutang atas sewa pembiayaan yang dibuat oleh Grup mencukupi sehubungan dengan keadaan yang dijelaskan di Catatan 48i.

Sebagai dampak dari proses arbitrase yang sedang berlangsung, maka pada tanggal 30 Juni 2019 Grup mengevaluasi sumber pendapatan lain selain GTA Kalija I dan menyimpulkan bahwa nilai sisa dari sewa pembiayaan sudah tidak lagi mengandung unsur sewa (arus kas tidak terjamin) sehingga nilai sisa tersebut direklasifikasi sebagai aset tetap dengan nilai tercatat sebesar US\$117.777.

c. Uang muka ke pemasok, neto

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Uang muka ke pemasok	294.274	166.110
Penyisihan penurunan nilai	(32.704)	(32.704)
Jumlah	261.570	133.406

Pada tanggal 27 September 2019, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka untuk Proyek Rekayasa, Pengadaan, dan Konstruksi ("EPC") Inside Battery Limit ("ISBL") dan Outside Battery Limit ("OSBL") Refinery Development Master Plan ("RDMP") RU-V Balikpapan sebesar US\$199.915. Pembayaran ini didasarkan pada (catatan 48n) Kontrak Amandemen Pertama EPC ISBL & OSBL No. 25/C000002/2018 tanggal 5 September 2019.

Perusahaan melakukan penyisihan penurunan nilai atas uang muka proyek pembuatan kapal tanker kapasitas 30.000 LTDW antara Perusahaan dengan Zhejiang Chenye Shipbuilding Co. Ltd. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut telah mencukupi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

d. Goodwill

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
31 Desember 2019				
PT PHE ONWJ	53.337	-	-	53.337
PHE Nunukan Company	415	-	-	415
PGN dan entitas anaknya	55	-	-	55
Jumlah	53.807	-	-	53.807
31 Desember 2018				
PT PHE ONWJ	53.337	-	-	53.337
PHE Nunukan Company	415	-	-	415
PGN dan entitas anaknya	55	-	-	55
Jumlah	53.807	-	-	53.807

Goodwill dialokasikan atas UPK Perusahaan yang diidentifikasi berdasarkan blok KKS.

Grup memperhitungkan jumlah terpulihkan berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan yang memberikan nilai lebih tinggi dibandingkan dengan perhitungan nilai pakai. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan ditentukan dengan menggunakan perhitungan arus kas diskonto setelah pajak.

Proyeksi arus kas didasarkan pada produksi dan rencana pengembangan yang telah disetujui oleh manajemen yang mencakup estimasi periode kontrak termasuk perpanjangan kontrak dan investasi masa depan untuk peningkatan *output*. Periode proyeksi berkisar antara 3-30 tahun.

PT PHE ONWJ dan PHE Nunukan Company

Grup mengambil alih PT Medco E&P Tuban (Kemudian berubah nama menjadi PT PHE Tuban) di tahun 2008 dan BP West Java Ltd., (kemudian berubah nama menjadi ONWJ Ltd.) di tahun 2009, serta PT PHE Oil dan Gas ("PHE OG") dan PHE Nunukan Company di tahun 2013.

PGN dan entitas anaknya

Tahun 2013, PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("PGASKOM"), entitas anak PGN, mengambil alih 100% kepemilikan PT Telemedia Dinamika Sarana ("TDS") dengan pembayaran Rp675 juta atau setara dengan US\$55. PGASKOM mengakui *goodwill* dari akuisisi ini sebesar US\$55.

Asumsi utama yang digunakan untuk harga minyak dan gas bumi diproyeksikan berdasarkan perkembangan pasar mengingat volatilitas harga minyak. Tingkat diskonto yang digunakan mencerminkan risiko yang berkaitan dengan industri minyak dan gas yang relevan dan mempertimbangkan risiko dari negara masing-masing operasi.

Asumsi yang digunakan sebagai dasar pengujian penurunan nilai tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Asumsi 2019				
	2019	2020	2021	2022	2023
Proyeksi ICP	US\$62,00	US\$58,40	US\$58,80	US\$61,40	US\$61,70
Proyeksi Brent	US\$64,30	US\$61,70	US\$62,10	US\$64,70	US\$65,00
Tingkat (penurunan) kenaikan antara (US\$3,60) sampai dengan US\$2,60 per tahun, baik untuk nilai ICP maupun Brent.					
Harga gas	Sesuai kontrak penjualan gas				
Tingkat diskonto	6,58% - 9,98%				

Manajemen berpendapat penurunan nilai *goodwill* sudah mencukupi berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)

e. Aset *non-free* dan *non-clear*, neto

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Aset <i>non-free</i> dan <i>non-clear</i>	112.237	112.237
Penyisihan penurunan nilai	(110.400)	(110.400)
Jumlah	<u>1.837</u>	<u>1.837</u>

Aset *non-free* dan *non-clear* merupakan tanah yang berlokasi di Teluk Semangka, Lampung dan aset di daerah lainnya yang sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, dokumentasi dan hak Perusahaan atas aset-aset ini masih dalam proses hukum dan penyelesaian agar aset tersebut dapat sepenuhnya digunakan oleh Perusahaan.

Perusahaan mengakui penyisihan penurunan nilai untuk mengurangi nilai dari aset-aset tersebut menjadi nilai terpulihkan. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai tersebut telah mencukupi.

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 40)</u>		
BRI	581.659	820.154
Bank Mandiri	483.554	1.705.709
BNI	-	638.751
Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	4.682	110
Sub jumlah	<u>1.069.895</u>	<u>3.164.724</u>
<u>Bank pihak ketiga</u>		
- HSBC Indonesia	174.181	67.075
- BTPN	20.826	160.396
- PT Bank Permata Tbk.	3.597	59.804
- PT Bank Mizuho Indonesia	-	203.272
- Citibank, N.A.	-	145.344
- PT ANZ Panin Bank Indonesia Tbk.	-	139.491
- BCA	-	118.934
- Deutsche Bank AG	-	93.970
- PT Bank DBS Indonesia	-	86.842
- SMBC	-	81.988
- PT Bank ICBC Indonesia	-	23.974
- Bank lainnya (masing-masing di bawah US\$10.000)	1.553	1.221
Sub jumlah	<u>200.157</u>	<u>1.182.311</u>
Jumlah	<u>1.270.052</u>	<u>4.347.035</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

Informasi lain mengenai fasilitas pinjaman bank jangka pendek Grup pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Masa berlaku
Bank Mandiri	31 Desember 2020
BNI	25 November 2020
BRI	1 Agustus 2020
BNI Syariah	27 Maret 2020
HSBC Indonesia	31 Agustus 2020
PT Bank UOB Indonesia	3 Desember 2020
BTPN	29 Maret 2020
PT Bank Permata Tbk.	27 Agustus 2020

Tingkat suku bunga yang dikenakan adalah tingkat suku bunga pasar (contoh: *Singapore Interbank Offered Rate* ("SIBOR") atau *London Interbank Offered Rate* ("LIBOR")) ditambah dengan persentase tertentu tergantung hasil negosiasi pada saat penarikan.

Tingkat suku bunga per tahun pinjaman jangka pendek selama tahun 2019 dan 2018 adalah:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dolar AS	2,00% - 2,93%	2,76% - 3,71%
Rupiah	6,65% - 11,50%	7,25% - 11,50%

Dana yang diperoleh dari pinjaman jangka pendek digunakan untuk tujuan modal kerja.

16. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Dolar AS	4.044.954	3.215.103
Rupiah	507.476	374.194
Lain-lain	17.603	8.480
Jumlah	4.570.033	3.597.777

Utang usaha - pihak ketiga Grup, terutama berkaitan dengan pembelian minyak mentah, gas bumi dan produk minyak.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PEMERINTAH

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan)	827.783	961.481
Pinjaman proyek panas bumi Ulubelu dan Lahendong	253.310	253.310
Pinjaman proyek panas bumi Lumut Balai	102.824	84.594
Bagian Pemerintah atas penjualan gas bumi domestik termasuk bagian Pemerintah atas produksi gas Indonesia	17.219	36.889
Utang dari pembelian produksi LPG bagian Pemerintah	4.460	11.358
Pinjaman proyek pembangunan depot pengisian pesawat udara ("DPPU") Bandara Ngurah Rai	3.816	4.505
Sub jumlah	<u>1.209.412</u>	<u>1.352.137</u>
Entitas anak:		
PT Pertamina EP		
Bagian Pemerintah atas bagi hasil produksi	26.238	25.764
Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara ("BMN")	83.999	81.815
PT Pertamina Hulu Energi		
Utang <i>overlifting</i>	20.080	37.878
PT Pertamina Hulu Indonesia		
Utang <i>overlifting</i>	18.272	109.126
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.		
Pinjaman untuk pembangunan jaringan pipa transmisi Gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat	344.217	352.971
Pinjaman proyek pengembangan pasar Gas Domestik	31.849	36.008
Pinjaman untuk pembiayaan proyek distribusi dan transmisi Gas Tahap II	2.375	7.126
Sub jumlah	<u>527.030</u>	<u>650.688</u>
Jumlah (Catatan 40)	1.736.442	2.002.825
Bagian lancar	(940.413)	(1.207.743)
Bagian tidak lancar	796.029	795.082

a. Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan)

Nilai lawan menunjukkan liabilitas Perusahaan kepada Pemerintah terkait pengapalan minyak mentah bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia untuk diproses di kilang Perusahaan dalam memenuhi permintaan produk olahan minyak domestik. Bagian Pemerintah dalam produksi minyak mentah Indonesia diperoleh dari wilayah kerja Kontraktor KKS.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

a. Nilai lawan (utang Pemerintah atas bagian produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang Perusahaan) (lanjutan)

Pergerakan nilai lawan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan		
Saldo awal	961.481	749.956
Ditambah:		
Bagian Pemerintah atas produksi minyak mentah Indonesia yang masuk ke kilang milik Perusahaan	8.684.149	10.289.631
Dikurang:		
Pembayaran tunai	(8.614.115)	(10.029.737)
Laba selisih kurs	(203.732)	(48.369)
Saldo akhir	<u>827.783</u>	<u>961.481</u>

b. Pinjaman proyek pembangunan Depot Pengisian Pesawat Udara (“DPPU”) Bandara Ngurah Rai

Pada tanggal 7 Mei 2007, Pemerintah meneruskan pinjaman sebesar ¥1.172.872.837 (nilai penuh) yang diperoleh dari Overseas Economic Cooperation Fund Jepang kepada Perusahaan untuk proyek pembangunan DPPU Ngurah Rai sesuai dengan perjanjian pinjaman tanggal 29 November 1994.

Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam 36 kali cicilan semesteran mulai Mei 2007 sampai dengan November 2024 dan dikenakan suku bunga 3,1% per tahun. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar ¥414.577.362 (nilai penuh) dan ¥497.492.834 (nilai penuh) atau setara dengan US\$3.816 dan US\$4.505.

c. Pinjaman proyek panas bumi Lumut Balai

Pada tanggal 29 Maret 2011 telah ditandatangani *Loan Agreement IP-557* antara Pemerintah Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan dengan Japan International Cooperation Agency (“JICA”) yang diwakili oleh *Chief Representative* JICA, dengan Perusahaan bertindak sebagai Agen Penyelenggara dan PGE sebagai Agen Pelaksana Proyek, dengan total pinjaman sebesar ¥26.966.000.000 (nilai penuh) untuk jangka waktu penarikan pinjaman delapan tahun sejak dinyatakan efektif dengan tingkat SBE 0,3% p.a ditambah 0,3% p.a dan 0,01% p.a ditambah 0,01% p.a.

Pelunasan pokok pinjaman dilakukan setiap setengah tahunan, setiap tanggal 20 Maret dan 20 September, dimulai tanggal 20 Maret 2021 sampai Maret 2051. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar ¥11.169.782.163 (nilai penuh) dan ¥9.343.033.479 (nilai penuh) atau setara dengan US\$102.824 dan US\$84.594.

d. Pinjaman proyek panas bumi Ulubelu dan Lahendong

Dalam implementasi Proyek Investasi Energi Bersih Panas Bumi Ulubelu dan Lahendong, Perusahaan memperoleh pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development (“IBRD”) sebagai bagian dari pinjaman Bank Dunia.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

d. Pinjaman proyek panas bumi Ulubelu dan Lahendong (lanjutan)

Pada tanggal 5 Desember 2011, Perjanjian LA 8082-ID dan TF10417-ID ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan IBRD dengan Perusahaan sebagai Agen Penyelenggara dan PGE sebagai Agen Pelaksana Proyek, dengan jumlah pinjaman sebesar US\$300.000 yang terdiri dari LA 8082-ID sebesar US\$175.000 dan LA TF10417-ID sebesar US\$125.000. Suku bunga pinjaman dari Bank Dunia adalah sebesar LIBOR + 0,45% + 0,5% (biaya bank) + *variance spread* per tahun sedangkan tingkat bunga dari JICA sebesar 0,25% + 0,25%.

Pembayaran kembali pokok pinjaman dilakukan setiap semester pada tanggal 10 April dan 10 Oktober untuk LA-8082-ID, dimulai tanggal 10 Oktober 2020 sampai 10 Oktober 2035 dan untuk LA TF10417-ID dimulai tanggal 10 Oktober 2021 sampai 10 April 2051.

Berikut adalah saldo pinjaman pada 31 Desember 2019 dan 2018:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LA 8082-ID	129.044	129.044
LA TF10417-ID	124.266	124.266
Jumlah	253.310	253.310

e. Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara ("BMN") di PT Pertamina EP

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 2 Mei 2008, aset - aset yang sebelumnya dimiliki oleh Entitas Pertamina yang tidak diakui dalam saldo awal neraca Perusahaan, merupakan BMN, pengendalian aset tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ("DJKN").

Pada tanggal 20 September 2016, Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina EP No. PRJ-3-MK.6/2016 dan No. 1307/EP0000/2016-S0 telah ditandatangani. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, manajemen berkeyakinan bahwa utang sewa untuk BMN yang tidak digunakan tidak akan ditagih oleh Pemerintah karena tidak termasuk dalam lingkup perjanjian tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2016, PT Pertamina EP melakukan koreksi atas utang sewa untuk BMN yang tidak digunakan oleh PT Pertamina EP.

Jumlah ini merupakan utang sewa pembiayaan atas BMN yang meliputi instalasi, bangunan dan harta bergerak yang digunakan di dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi PT Pertamina EP.

Lessor	Jenis Aset	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kementerian Keuangan	Aset instalasi,		
Dikurangi bagian lancar	bangunan dan HBM	83.999 (1.426)	81.815 (1.180)
Bagian tidak lancar		82.573	80.635

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

e. Liabilitas sewa pembiayaan - Barang Milik Negara (“BMN”) di PT Pertamina EP (lanjutan)

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	14.907	14.310
Jatuh tempo lebih dari satu tahun, sampai dengan lima tahun	59.626	71.550
Jatuh tempo lebih dari lima tahun	160.246	153.832
Jumlah	234.779	239.692
Bunga	(150.780)	(157.877)
Neto	83.999	81.815
Bagian lancar	(1.426)	(1.180)
Bagian jangka panjang	82.573	80.635

f. Utang *overlifting*

Utang *overlifting* merupakan utang anak perusahaan kepada SKK Migas sebagai hasil dari *lifting* minyak dan gas akrual yang lebih tinggi daripada hak *entitlement* pada tahun yang bersangkutan.

g. Pinjaman untuk pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat

Pada tanggal 27 Maret 2003, Japan Bank for International Cooperation (“JBIC”) menyetujui untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan ¥49.088.000.000 (nilai penuh) untuk membantu Pemerintah dalam membiayai pembangunan jaringan pipa transmisi gas dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan jaringan pipa distribusi di Jawa Barat.

Pada tanggal 28 Mei 2003, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA1156/DP3/2003, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari JBIC ini dengan jumlah tidak melebihi ¥49.088.000.000 (nilai penuh) kepada PGN.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, PGN telah membayar angsuran masing-masing sebesar ¥1.591.118.000 (nilai penuh) dan ¥1.591.118.000 (nilai penuh). Pembayaran atas pokok pinjaman dilakukan setiap enam bulan pada 20 Maret dan 15 September. Pembayaran dimulai sejak 20 Maret 2013 hingga 20 Maret 2043. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar ¥37.391.273.000 (nilai penuh) dan ¥38.983.847.840 (nilai penuh) atau setara dengan US\$344.217 dan US\$352.971.

h. Pinjaman proyek pengembangan pasar Gas Domestik

Berdasarkan perjanjian pinjaman tanggal 7 Februari 2006, IBRD menyetujui memberikan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah dengan jumlah keseluruhan setara dengan US\$80.000 untuk membantu Pemerintah dalam membiayai Proyek Pengembangan Pasar Gas Domestik.

Pada tanggal 3 April 2006, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan hasil pinjaman dari IBRD sebesar US\$80.000 kepada PGN yang akan melaksanakan Proyek.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

17. UTANG PEMERINTAH (lanjutan)

h. Pinjaman proyek pengembangan pasar Gas Domestik (lanjutan)

Pada bulan Desember 2011, jumlah fasilitas pinjaman diubah menjadi US\$69.381. Pada tanggal 14 November 2013, PGN mendapatkan Surat No. 5786/PU/2013 dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengenai persetujuan pembatalan sisa fasilitas pinjaman sebesar US\$7.616 terhitung mulai pada tanggal 1 Februari 2013. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$31.849 dan US\$36.008.

i. Pinjaman untuk pembiayaan proyek Distribusi dan Transmisi Gas Tahap II

Pada tanggal 15 September 2000, PGN dan Pemerintah mengadakan Perjanjian Penerusan Pinjaman, dimana Pemerintah meneruskan pinjaman dari European Investment Bank ("EIB") (dalam mata uang Dolar AS) dengan jumlah tidak melebihi dari €70.000.000 (nilai penuh) kepada PGN sebagai bagian dari pembiayaan Proyek Distribusi dan Transmisi Gas Tahap II.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, PGN telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, PGN telah membayar angsuran di masing-masing tahun sebesar US\$4.751. Saldo pinjaman per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$2.375 dan US\$7.126.

j. Selisih Harga JBKP Premium Tahun 2016

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan mencatat Selisih Harga JBKP Premium tahun 2016 yang menyebabkan kelebihan pendapatan sebesar Rp2,37 triliun (setara dengan US\$174.907 per tanggal 31 Desember 2017) (nilai sebelum PPN dan PBBKB) sesuai dengan LHP BPK No. 39/AUDITAMA VII/PDPTT/11/2017 tanggal 13 November 2017.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan surat No. S-100/MK.2/2018 tentang Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat ("LKPP") dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara ("LKBUN") Tahun 2015-2017 serta LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Kementerian Keuangan Tahun 2015-2016, menyatakan bahwa atas kelebihan pendapatan Selisih Harga pada penjualan JBKP Premium tahun 2016 diakui sebagai kelebihan pendapatan bagi Perusahaan. Hal ini menyebabkan jumlah sebesar Rp2,37 triliun atau setara dengan US\$178.070, yang sebelumnya dicatat sebagai liabilitas lain kepada Pemerintah diakui sebagai pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya di tahun 2018 (Catatan 30).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

18. BEBAN AKRUAL

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pemasok dan kontraktor	1.586.318	1.069.409
Bonus, insentif, dan gaji	468.305	441.536
Estimasi klaim retensi sendiri	379.836	286.508
Liabilitas imbalan kerja karyawan yang akan jatuh tempo dalam satu tahun (Catatan 21b)	246.244	232.994
Bunga pinjaman	117.978	105.062
Jumlah	2.798.681	2.135.509

19. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pinjaman bank:		
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 40)	172.874	179.361
Pihak ketiga	1.778.353	1.891.264
	1.951.227	2.070.625
Biaya penerbitan, neto	(3.082)	(4.775)
Jumlah pinjaman bank, neto	1.948.145	2.065.850
Sewa pembiayaan	171.993	160.027
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.120.138	2.225.877
Bagian lancar	(573.726)	(420.577)
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar	1.546.412	1.805.300

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

Tingkat bunga per tahun pinjaman jangka panjang selama tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	7,58% - 10,50%	2,35% - 13,00%
Dolar AS	1,37% - 4,65%	1,37% - 5,60%

a. Pinjaman bank

Rincian pinjaman sindikasi dan pinjaman bank Grup pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>		
	<u>Jumlah</u>	<u>Lancar</u>	<u>Tidak Lancar</u>
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>			
Bank Mandiri	7.671	3.496	4.175
Bank Syariah Mandiri	7.371	3.359	4.012
BNI Syariah	5.976	343	5.633
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	150.000	-	150.000
BNI	1.856	323	1.533
<u>Pihak Ketiga</u>			
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. ("BOTM") (pinjaman sindikasi)	1.282.803	485.119	797.684
HSBC Bank USA, National Association	316.000	-	316.000
SMBC (pinjaman sindikasi)	59.697	10.601	49.096
BTPN	61.027	10.492	50.535
PT Bank ICBC Indonesia	58.826	17.235	41.591
Jumlah	1.951.227	530.968	1.420.259
	<u>31 Desember 2018</u>		
	<u>Jumlah</u>	<u>Lancar</u>	<u>Tidak Lancar</u>
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u>			
Bank Mandiri	19.753	10.043	9.710
Bank Syariah Mandiri	9.330	-	9.330
BRI	181	181	-
BNI Syariah	97	70	27
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	150.000	-	150.000
<u>Pihak ketiga</u>			
BOTM (pinjaman sindikasi)	1.609.539	333.569	1.275.970
SMBC (pinjaman sindikasi)	199.318	10.601	188.717
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	67.407	9.083	58.324
PT Bank ICBC Indonesia	15.000	-	15.000
Jumlah	2.070.625	363.547	1.707.078

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Informasi lain mengenai pinjaman sindikasi dan bank Grup pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Jadwal pembayaran
Perusahaan	
SMBC (pinjaman berjangka)	Beberapa cicilan (2016-2025)
Lembaga Keuangan Lainnya	
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	
(pinjaman berjangka)	Beberapa cicilan (2015-2025)
BOTM	Beberapa cicilan (2016-2021)
Entitas anak	
BNI Syariah	
PT Pertamina Trans Kontinental	Beberapa cicilan (2018-2025)
BTPN	
PT Pertamina Trans Kontinental	Beberapa cicilan (2016-2025)
BOTM	
PT Pertamina Trans Kontinental	Beberapa cicilan (2017-2022)
BOTM (pinjaman sindikasi)	
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	Beberapa cicilan (2020-2023)
Bank Syariah Mandiri	
PT Pertamina International Shipping	Beberapa cicilan (2018-2025)
Bank Mandiri	
PT Pertamina International Shipping	Beberapa cicilan (2018-2025)
PT Bank ICBC Indonesia	
PT Elnusa Tbk.	Beberapa cicilan (2018-2023)
HSBC Bank USA, National Association	
PT Pertamina EP Cepu	Beberapa cicilan (2019-2034)

Pinjaman ini ditujukan untuk mendanai belanja modal Perusahaan dan/atau entitas anak, kegiatan umum dan biaya proyek tertentu sehubungan dengan perjanjian.

Berdasarkan beberapa perjanjian pinjaman, debitur diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu seperti batasan rasio keuangan, batasan melakukan perubahan bisnis yang substansial dan tidak melakukan merger.

Pinjaman bank jangka panjang entitas anak tertentu dijamin dengan piutang (Catatan 7) dan aset tetap (Catatan 12) entitas anak tersebut.

Pada tanggal 12 Desember 2017, Etablissements Maurel et Prom, SA menandatangani perjanjian pinjaman sindikasi dengan 2 (dua) bank nasional dan 7 (tujuh) bank asing. The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Hong Kong Branch bertindak sebagai *Facility Agent*. Jumlah fasilitas pinjaman sindikasi tersebut adalah sebesar US\$600.000 dengan tingkat suku bunga LIBOR ditambah 1,5% margin dan harus dibayar kembali secara triwulanan mulai bulan Maret 2020 sampai Desember 2023.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS JANGKA PANJANG (lanjutan)

a. Pinjaman bank (lanjutan)

Sebelum tanggal efektif perjanjian pinjaman sindikasi tersebut di atas pada tanggal 11 Desember 2017, sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian sindikasi tersebut di atas, PIEP, sebagai *Sponsor*, Maurel et Prom West Africa SA, sebagai *Borrower*, dan The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd., Hongkong Branch sebagai *Facility Agent*, menandatangani perjanjian *Sponsor Support Agreement* dengan Perusahaan. Perjanjian ini mengatur bahwa apabila *Borrower* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan (*Borrower Non-Payment*), maka *Borrower* harus segera menyampaikan *Sponsor Loan Request Notice* yang ditujukan kepada *Sponsor*, dan *Sponsor* berkewajiban untuk menyediakan dana kepada *Borrower* sebesar kewajiban yang belum terselesaikan termasuk di dalamnya bunga yang masih terhutang.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Grup memenuhi batasan-batasan yang diatur dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut.

b. Sewa pembiayaan

Akun ini merupakan pembayaran sewa minimum Grup di masa yang akan datang dari transaksi-transaksi sewa pembiayaan untuk Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji ("SPPBE"), *landing craft transports*, mobil tanki BBM dan LPG, server komputer, instalasi pipa gas dan pabrik LPG. Akun ini merepresentasikan pembayaran sewa guna usaha minimum Group di masa mendatang dari transaksi *finance lease* untuk Pengisian dan Transportasi LPG ("SPPBE"), *landing craft transports*, Truk Tanker BBM dan LPG, server komputer, instalasi pipa gas dan LPG *plant*.

Pembayaran sewa minimum masa akan datang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Jatuh tempo kurang dari satu tahun	57.508	84.137
Jatuh tempo lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	132.106	115.474
Jatuh tempo lebih dari lima tahun	28.739	32.487
Jumlah	218.353	232.098
Dikurangi bunga	(46.360)	(72.071)
Jumlah setelah dikurangi bunga	171.993	160.027
Bagian lancar	(44.525)	(58.722)
Bagian tidak lancar	127.468	101.305

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. UTANG OBLIGASI

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
Obligasi senior		
Penerbitan tahun 2011		
Jatuh tempo 2021	1.000.000	1.000.000
Jatuh tempo 2041	500.000	500.000
Penerbitan tahun 2012		
Jatuh tempo 2022	1.242.000	1.242.000
Jatuh tempo 2042	1.221.590	1.221.590
Penerbitan tahun 2013		
Jatuh tempo 2023	1.615.000	1.615.000
Jatuh tempo 2043	1.433.261	1.433.261
Penerbitan tahun 2014		
Jatuh tempo 2044	1.500.000	1.500.000
Penerbitan tahun 2018		
Jatuh tempo 2048	750.000	750.000
Penerbitan tahun 2019		
Jatuh tempo 2029	750.000	-
Jatuh tempo 2049	750.000	-
Jumlah	<u>10.761.851</u>	<u>9.261.851</u>
Diskonto	(65.654)	(65.654)
Biaya penerbitan	(30.350)	(27.425)
Amortisasi diskonto dan biaya penerbitan	34.004	28.754
Utang obligasi Perusahaan yang dimiliki entitas anak:	(46.750)	(62.000)
Jumlah Perusahaan	<u>10.653.101</u>	<u>9.135.526</u>
PGN dan entitas anaknya:		
Obligasi senior		
PGN	1.350.000	1.350.000
PT Saka Energi Indonesia ("SEI")	625.000	625.000
Biaya diskonto dan penerbitan, neto	(13.608)	(16.430)
Jumlah entitas anak	<u>1.961.392</u>	<u>1.958.570</u>
Jumlah utang obligasi	<u>12.614.493</u>	<u>11.094.096</u>

Informasi lainnya terkait utang obligasi Perusahaan pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Nilai nominal	Harga penerbitan	Tanggal mulai	Tanggal jatuh tempo	Wali amanat	Tingkat bunga
Perusahaan:						
Penerbitan tahun 2011						
Jatuh tempo 2021	1.000.000	98,097%	23 Mei 2011	23 Mei 2021	HSBC Bank USA, N.A	5,25%
Jatuh tempo 2041	500.000	98,380%	27 Mei 2011	27 Mei 2041	HSBC Bank USA, N.A	6,50%
Penerbitan tahun 2012						
Jatuh tempo 2022	1.250.000	99,414%	3 Mei 2012	3 Mei 2022	HSBC Bank USA, N.A	4,88%
Jatuh tempo 2042	1.250.000	98,631%	3 Mei 2012	3 Mei 2042	HSBC Bank USA, N.A	6,00%
Penerbitan tahun 2013						
Jatuh tempo 2023	1.625.000	100,000%	20 Mei 2013	20 Mei 2023	The Bank of New York Mellon	4,30%
Jatuh tempo 2043	1.625.000	100,000%	20 Mei 2013	20 Mei 2043	The Bank of New York Mellon	5,63%
Penerbitan tahun 2014						
Jatuh tempo 2044	1.500.000	100,000%	3 Mei 2014	30 Mei 2044	The Bank of New York Mellon	6,45%
Penerbitan tahun 2018						
Jatuh tempo 2048	750.000	98,061%	7 November 2018	7 November 2048	The Bank of New York Mellon	6,50%
Penerbitan tahun 2019						
Jatuh tempo 2029	750.000	100,000%	30 Juli 2019	30 Juli 2029	The Bank of New York Mellon	3,65%
Jatuh tempo 2049	750.000	100,000%	30 Juli 2019	30 Juli 2049	The Bank of New York Mellon	4,70%
Entitas anak:						
Penerbitan tahun 2014						
Jatuh tempo 2024	1.350.000	99,037%	12 Mei 2014	16 Mei 2024	The Bank of New York Mellon	5,13%
Penerbitan tahun 2017						
Jatuh tempo 2024	625.000	100,000%	26 April 2017	5 Mei 2024	Citicorp International Limited	4,45%

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

20. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan

Perjanjian Wali Amanat menetapkan bahwa:

- Tidak lebih dari 30 hari sejak kejadian dimana Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan (*Change of Control Triggering Event*), Perusahaan dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali obligasi senior dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. Perusahaan mempunyai opsi untuk menebus kembali seluruh obligasi senior ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Indonesia.
- Pembatasan yang dipersyaratkan antara lain: pembatasan atas hak-hak gadai, pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa kembali dan penyampaian laporan keuangan dan laporan lainnya.
- Perusahaan memenuhi pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian dengan Wali Amanat.
- Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi senior ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi akuisisi blok baru, pengembangan lapangan yang sudah ada, pembelian *rig* dan pembangunan *tanker*.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memperoleh peringkat Baa2 dengan *outlook stable* dari Moody's Investors Service, BBB dengan *outlook stable* dari *Fitch Ratings* dan BBB- dengan *outlook stable* dari Standard & Poor's.

Selama tahun 2019, Perusahaan tidak melakukan pembelian kembali sebagian obligasi senior (2018: US\$37.649).

Entitas anak

- PGN *Senior unsecured fixed rate notes*
Sehubungan obligasi tersebut, PGN dibatasi dalam melaksanakan konsolidasi, merger, transfer, sewa atau penghapusan atas semua aset-aset. Berdasarkan Moody's Investors Services, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating obligasi tersebut secara berurutan diberikan peringkat Baa2, BBB-, dan BBB-.
- SEI senior *unsecured fixed rate notes*
SEI tidak mewajibkan membuat sinking fund payment yang berkaitan obligasi ini. Berdasarkan Moody's Investors Services, Standard & Poor (S&P) dan Fitch Rating obligasi tersebut secara berurutan diberikan peringkat Ba2, BB, dan BB+.

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan dan entitas anak tertentu menyelenggarakan program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

1. Program imbalan pascakerja

(i) Program imbalan pasti dikelola Dana Pensiun Pertamina

Perusahaan dan entitas anak tertentu telah menerima persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Pengesahan No. S-190/MK.6/1977 tanggal 15 Juli 1977 untuk mendirikan dana pensiun terpisah, Dana Pensiun Pertamina, dimana seluruh pekerja, setelah memenuhi periode bakti tertentu, berhak atas imbalan pasti saat pensiun, cacat atau kematian, serta imbalan kesehatan pascakerja. Program Pensiun Manfaat Pasti ("PPMP") ini berlaku bagi pekerja yang direkrut sebelum tahun 2005.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

a. Program imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

1. Program imbalan pascakerja (lanjutan)

(ii) Tunjangan kesehatan pascakerja

Tunjangan kesehatan pascakerja meliputi para pensiunan Perusahaan dan pasangannya yang telah menyelesaikan masa kerja minimum 15 tahun dan usia minimum 46 tahun.

(iii) Penghargaan atas pengabdian ("PAP")

Manfaat PAP terdiri dari imbalan tambahan yang diberikan pada saat karyawan memasuki usia pensiun dan dalam hal mengalami cacat tetap, meninggal, atau mengundurkan diri secara sukarela.

2. Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya dalam bentuk tunjangan Masa Persiapan Purnakarya ("MPPK"), biaya pemulangan, tunjangan cuti, Program Asuransi Mandiri Guna I dan ulang tahun dinas, kecuali untuk program asuransi.

3. Program tabungan pekerja

Perusahaan dan entitas anak tertentu (keseluruhannya disebut Peserta) menyelenggarakan program Tabungan Pekerja ("TP") berupa program iuran pasti dan yang akan diterima oleh pekerja pada saat masa kerjanya berakhir. Seluruh dana program tabungan pekerja saat ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK").

b. Provisi imbalan kerja karyawan

Taksiran kewajiban imbalan kerja Perusahaan dan sebagian besar entitas anaknya per tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dihitung berdasarkan laporan penilaian dari aktuaris independen, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, tanggal 29 April 2020. Tabel berikut ini menyajikan ikhtisar kewajiban imbalan kerja sebagaimana tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
Pensiun dan imbalan pascakerja lainnya:		
- PPMP	167.066	142.585
- Tunjangan kesehatan pascakerja	849.411	786.489
- PAP	750.210	718.902
- Biaya pemulangan	5.953	5.423
Sub jumlah	<u>1.772.640</u>	<u>1.653.399</u>
Imbalan kerja jangka panjang lainnya:		
- MPPK	93.759	104.428
- Ulang tahun dinas	4.440	10.035
Sub jumlah	<u>98.199</u>	<u>114.463</u>
Jumlah - Perusahaan	<u>1.870.839</u>	<u>1.767.862</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

b. Provisi imbalan kerja karyawan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Entitas anak:		
Pensiun dan imbalan pascakerja lainnya	369.794	315.515
Jumlah	2.240.633	2.083.377
Bagian jangka pendek (Catatan 18)	(246.244)	(232.994)
Bagian jangka panjang	1.994.389	1.850.383

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program

Tabel berikut ini merangkum komponen biaya manfaat bersih yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya dan status pendanaan serta jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk masing - masing manfaat untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

i. Liabilitas imbalan pascakerja

	31 Desember 2019						Jumlah
	Nilai kini imbalan pasca kerja	PPMP Nilai wajar aset program	Liabilitas imbalan pascakerja	Tunjangan kesehatan pascakerja	PAP	Biaya pemulangan	
Saldo awal	674.493	(531.908)	142.585	786.489	718.902	5.423	1.653.399
Biaya jasa kini (iuran yang dibayarkan karyawan)	2.651	(899)	1.752	19.505	46.960	346	68.563
Biaya jasa lalu	-	-	-	847	-	-	847
Beban (pendapatan) bunga	55.368	(45.543)	9.825	69.061	53.713	420	133.019
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	58.019	(46.442)	11.577	89.413	100.673	766	202.429
Kerugian(keuntungan) aktuarial atas:							
Perubahan asumsi keuangan	53.062	16.320	69.382	128.674	55.953	437	254.446
Penyesuaian historis	(1.880)	-	(1.880)	(162.147)	28.457	(266)	(135.836)
Sub jumlah Biaya (penghasilan) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	51.182	16.320	67.502	(33.473)	84.410	171	118.610
Pembayaran imbalan dari aset program	(67.710)	67.710	-	-	(26.345)	-	(26.345)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	-	-	-	(26.355)	(157.448)	(639)	(184.442)
Iuran Perusahaan	-	(60.869)	(60.869)	-	-	-	(60.869)
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	28.875	(22.604)	6.271	33.337	30.018	232	69.858
Saldo akhir	744.859	(577.793)	167.066	849.411	750.210	5.953	1.772.640

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

c. Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja dan aset program (lanjutan)

i. Liabilitas imbalan pascakerja (lanjutan)

	31 Desember 2018						
	PPMP			Tunjangan kesehatan pascakerja	PAP	Biaya pemulangan	Jumlah
	Nilai kini imbalan pasca kerja	Nilai wajar aset program	Liabilitas imbalan pascakerja				
Saldo awal	790.740	(589.750)	200.990	924.654	900.396	8.480	2.034.520
Biaya jasa kini (iuran yang dibayarkan karyawan)	3.935	(1.057)	2.878	27.061	48.428	405	78.772
Beban (pendapatan) bunga	55.823	(42.502)	13.321	67.111	50.139	542	131.113
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	59.758	(43.559)	16.199	94.172	98.567	947	209.885
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas: Perubahan asumsi keuangan	(67.025)	36.386	(30.639)	(256.537)	(85.986)	(676)	(373.838)
Penyesuaian historis	2.452	-	2.452	117.720	31.520	(1.715)	149.977
Sub jumlah Biaya (penghasilan) diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(64.573)	36.386	(28.187)	(138.817)	(54.466)	(2.391)	(223.861)
Pembayaran imbalan dari aset program	(61.562)	61.562	-	-	-	-	-
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	-	-	-	(35.241)	(169.620)	(1.107)	(205.968)
Iuran Perusahaan	-	(34.218)	(34.218)	-	-	-	(34.218)
Kerugian (keuntungan) selisih kurs	(49.870)	37.671	(12.199)	(58.279)	(55.975)	(506)	(126.959)
Saldo akhir	674.493	(531.908)	142.585	786.489	718.902	5.423	1.653.399

Atas status yang belum didanai pada PPMP akan diselesaikan/dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tingkat pengembalian aktual aset program masing-masing pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah US\$29.223 and US\$6.116.

ii. Imbalan kerja jangka panjang lainnya

	31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	MPPK	Ulang tahun dinas	Jumlah	MPPK	Ulang tahun dinas	Jumlah
Saldo awal	104.428	10.035	114.463	129.278	16.063	145.341
Biaya jasa kini	5.467	560	6.027	6.743	3.866	10.609
Biaya jasa lalu	-	(6.567)	(6.567)	-	-	-
Bunga neto (Keuntungan) kerugian aktuarial	7.995	305	8.300	7.995	802	8.797
	(27.408)	(136)	(27.544)	(18.078)	(3.605)	(21.683)
Sub jumlah yang diakui dalam laporan laba-rugi	(13.946)	(5.838)	(19.784)	(3.340)	1.063	(2.277)
Pembayaran imbalan oleh Perusahaan	(822)	(69)	(891)	(13.453)	(6.138)	(19.591)
Keuntungan selisih kurs	4.099	312	4.411	(8.057)	(953)	(9.010)
Saldo akhir	93.759	4.440	98.199	104.428	10.035	114.463

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial

Asumsi-asumsi aktuarial signifikan yang diterapkan dalam perhitungan liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya untuk Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tingkat diskonto		
- Program imbalan pasti dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina	7,34% per tahun	8,41% per tahun
- Penghargaan atas pengabdian	7,12% per tahun	8,12% per tahun
- Tunjangan kesehatan pascakerja	8,21% per tahun	8,77% per tahun
- Biaya pemulangan	7,94% per tahun	8,29% per tahun
- Masa persiapan purnakarya	7,95% per tahun	8,27% per tahun
- Tunjangan cuti	N/A	7,39% per tahun
- Ulang tahun dinas	7,75% per tahun	8,30% per tahun
Tingkat inflasi emas (per tahun)	7,00% per tahun	8,00% per tahun
Kenaikan gaji (per tahun)	9,50% per tahun	9,50% per tahun
Tren biaya kesehatan tahunan:	8,00%% per tahun seterusnya	8,00% per tahun seterusnya
Faktor demografis:		
- Tingkat kematian	Tabel Mortalita Indonesia 3-2011 ("TMI 3" 2011)	Tabel Mortalita Indonesia 3-2011 ("TMI 3" 2011)
- Tingkat cacat	0,75% TMI 3	0,75% TMI 3
- Pengunduran diri		
Sampai usia 20 (per tahun)	1%	1%
Usia 26 - 45 (per tahun)	berkurang secara linear sebesar 0% per tahun sampai usia 56	berkurang secara linear sebesar 0% per tahun sampai usia 56
- Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
- Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
- Biaya operasional program pensiun	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat	8% dari biaya jasa dan 2,11% dari pembayaran manfaat

Komposisi investasi aset program terdiri dari:

	31 Desember 2019		31 Desember 2018	
	Nilai investasi	%	Nilai investasi	%
Instrumen ekuitas	113.924	18%	154.253	29%
Instrumen utang	317.112	50%	218.082	41%
Lain-lain	203.502	32%	159.573	30%
Jumlah	634.538	100%	531.908	100%

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbalan hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk setiap pasar.

Kontribusi yang diharapkan untuk program imbalan pascakerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah US\$62.067 dan US\$31.166.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

21. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

d. Asumsi-asumsi aktuarial (lanjutan)

Analisis sensitivitas kualitatif untuk asumsi-asumsi yang signifikan terhadap liabilitas imbalan pasti untuk asumsi-asumsi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>Kenaikan 1%</u>	<u>Penurunan 1%</u>
Tingkat diskonto	(214.111)	250.537
Tingkat upah	56.630	(70.854)
Tingkat tren biaya kesehatan	148.765	(114.528)

Durasi rata-rata tahun liabilitas manfaat pascakerja di akhir periode pelaporan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Program pensiun manfaat pasti	9,17	14,35
Penghargaan atas pengabdian	7,74	5,98
Tunjangan kesehatan pascakerja	23,12	17,84

Jadwal jatuh tempo dari program imbalan pascakerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Dalam 1 tahun	246.031	266.405
2 - 5 tahun	782.439	791.955
Lebih dari 5 tahun	21.129.278	22.500.076
Jumlah	22.157.748	23.558.436

Manajemen berkeyakinan bahwa perkiraan liabilitas dari imbalan kerja karyawan yang diberikan dari keseluruhan program pensiun Grup, yang didasarkan pada estimasi perhitungan aktuaris, telah melebihi kewajiban minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.

22. PROVISI PEMBONGKARAN DAN RESTORASI

Mutasi provisi pembongkaran dan restorasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	2.029.735	2.129.337
Penambahan (pengurangan), neto	342.530	(186.637)
Biaya akresi (Catatan 37 dan 45)	86.640	87.035
Saldo Akhir	2.458.905	2.029.735

Penambahan disebabkan karena perubahan asumsi estimasi pembongkaran dan restorasi yang diterapkan oleh Grup.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

23. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Perusahaan Gas Negara Tbk.	1.702.053	1.397.957
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	340.025	333.294
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.	228.896	143.831
PT Elnusa Tbk.	151.958	134.790
PT Patra Jasa	14.139	-
Pertamina International Timor S.A.	1.415	1.447
Total	2.438.486	2.011.319

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR

a. Modal disetor

Sesuai Akta Notaris No. 20 tanggal 17 September 2003 oleh Lenny Janis Ishak, S.H., dan keputusan Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. 408/KMK.02/2003 (KMK 408) tanggal 16 September 2003, jumlah modal dasar Perusahaan sebesar Rp200 triliun yang terdiri dari 200.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dimana jumlah modal yang ditempatkan sebesar Rp100 triliun dan telah disetor oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui pengalihan kekayaan tertentu dari Pertamina Lama termasuk entitas anak dan Ventura Bersamanya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008 pada tanggal 30 Januari 2008, tentang Penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003, jumlah penyertaan modal Pemerintah dalam Perusahaan ditetapkan sebesar Rp82,57 triliun setara dengan US\$9.809.882. Nilai ini terdiri dari seluruh aset dan liabilitas neto Pertamina Lama tidak termasuk aset pabrik LNG yang dikelola oleh PT Badak Natural Gas Liquefaction dan PT Arun Natural Gas Liquefaction, aset hulu eks kontrak yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina EP dan aset berupa tanah dan bangunan tertentu.

Perubahan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari Rp100 triliun menjadi Rp82,57 triliun setara dengan US\$9.809.882, telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 Juni 2009 dan didokumentasikan dengan Akta Notaris No. 11 dari Lenny Janis Ishak, S.H. Perubahan tersebut telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 14 Juli 2009 oleh Lenny Janis Ishak, S.H. dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45429.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 14 September 2009. Pengurangan modal saham Perusahaan yang diterbitkan dan disetor berlaku surut sejak tanggal 17 September 2003.

Pada tanggal 1 Agustus 2012 terjadi penambahan penyertaan modal saham yang didokumentasikan dengan Akta Notaris No. 1 dari Lenny Janis Ishak, S.H. sebesar Rp520,92 miliar (setara dengan US\$55.019) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tanggal 14 Desember 2015, Kementerian BUMN menyetujui permohonan kapitalisasi laba ditahan menjadi modal disetor sebesar Rp50 triliun dengan jumlah lembar saham sebesar 50.000.000 lembar (setara dengan US\$3.552.146).

Uang muka setoran modal kemudian dikapitalisasi menjadi penambahan modal saham ditempatkan dan disetor melalui Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., No. 10 tanggal 11 Januari 2016.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

a. Modal disetor (lanjutan)

Penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.3-0003113 tanggal 15 Januari 2016.

Peningkatan modal yang diotorisasi dari Rp200 triliun menjadi Rp600 triliun telah disetujui oleh Kementerian BUMN sebagai Rapat Umum Pemegang Saham melalui Surat persetujuan No. S-217/MBU/04/2018 tanggal 11 April 2018 dan didokumentasikan dalam Akta Notaris No. 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0052766.01. Tahun 2018 tanggal 13 April 2018 (Catatan 4a).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, jumlah modal Perusahaan yang ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan disetor (nilai penuh)	Persentase kepemilikan	Modal ditempatkan dan disetor
31 Desember 2018 dan 2019			
Pemerintah Republik Indonesia	171.227.044	100%	16.191.204

b. Tambahan modal disetor

Tambahan modal disetor pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan dampak penerapan PSAK 38, Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali (Revisi 2012), untuk mencatat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dan jumlah tercatat.

25. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (“BPYBDS”)

a. Instalasi *refuelling apron* di Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar dan *fuel hydrant facilities* di Bandara Juanda-Surabaya

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Operasional (“BASTO”) No.05/BA/MKS-HND/XII/2011, No. AU/14525/KEU.1227/XII/2011, No. BA 084/F100000/2011-S3 dan BASTO No. 005/F00000/2012-S0, No. BA.125 Tahun 2012, No. 0573/B3/KOBU/IV/2012 dari Kementerian Perhubungan, Perusahaan telah mendapatkan hak pengelolaan dan operasional atas aset Instalasi *Refuelling Apron* di Bandara Sultan Hasanuddin-Makassar dan *Fuel Hydrant Facilities* di Bandara Juanda-Surabaya, sehingga saldo akun ini menjadi Rp12.453 juta (setara dengan US\$1.361) (Catatan 14).

b. Jaringan distribusi (“Jargas”) gas bumi untuk rumah tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (“SPBG”) dan infrastruktur pendukung

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan dan Sekretaris Jenderal Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM selaku kuasa pengguna anggaran/barang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengoperasian Penggunaan (“BASTO”) BMN berupa Jaringan Distribusi (“Jargas”) Gas Bumi untuk Rumah Tangga No. BA-05/C00000/2018-S0 dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (“SPBG”) dan Infrastruktur Pendukung No. BA-06/C00000/2018-S0. Nilai aset BMN yang berupa aset tanah dan non tanah dengan kategori aset beroperasi dan tidak beroperasi adalah sebesar Rp5,8 triliun (setara dengan US\$399.759), saat ini aset tersebut dikelola oleh PT Pertagas Niaga dan PGN.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

25. BANTUAN PEMERINTAH YANG BELUM DITENTUKAN STATUSNYA (“BPYBDS”) (lanjutan)

b. Jaringan distribusi (“Jargas”) gas bumi untuk rumah tangga dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (“SPBG”) dan infrastruktur pendukung (lanjutan)

Berdasarkan hasil pembahasan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (“BPKP”), dan Perusahaan disepakati BASTO tersebut dicatat dan di perlakukan sebagai BPYBDS dan dibukukan dalam akun aset lain-lain serta disepakati hasil reviu BPKP aset Jargas dan SPBG yang berstatus *free and clear* akan direkomendasikan untuk dilakukan proses Penyertaan Modal Negara (“PMN”), sedangkan untuk yang tidak berstatus *free and clear* akan dilakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap progres pengelolaan aset dan pelaksanaan proses PMN dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil evaluasi kinerja.

Pada tanggal 1 Juli 2019, BPKP menerbitkan Laporan Hasil Reviu No. LHR-91/D102/2/2019 atas Aset Kementerian ESDM yang akan diusulkan menjadi PMN dengan kesimpulan dari total aset sebesar Rp5,8 triliun (setara dengan US\$399.759), dengan klasifikasi aset sebagai berikut:

No	Klasifikasi Aset	Nilai (dalam ribuan rupiah)	Nilai (dalam US\$)
1	Tidak dapat diusulkan menjadi PMN	36.324.842	2.509
2	Dapat di-PMN-kan tanpa catatan	2.102.881.621	145.217
3	Dapat di-PMN-kan dengan catatan	3.367.200.049	232.525
4	Belum dilakukan reviu	132.708.504	9.164
5	Selisih antara nilai realisasi dengan BASTO	149.793.262	10.344
	Jumlah	5.788.908.278	399.759

Pada tanggal 2 Mei 2020, Perusahaan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM selaku kuasa pengguna barang telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pengembalian Penatausahaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2009-2017 (“Jargas”) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas dan Infrastruktur Pendukung Tahun Anggaran 2011-2016 (“SPBG”) No. 0010/BAST/95/KPB/2020. Dalam Berita Acara tersebut disepakati Perusahaan akan menyerahkan kembali penatausahaan Jargas dan SPBG yang tidak masuk dalam status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” sebesar Rp3,68 triliun (setara dengan US\$254.542) kepada Kementerian ESDM, sehingga Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 hanya mencatat aset BPYBDS Jargas dan SPBG dengan status “dapat di-PMN-kan tanpa catatan” sebesar Rp2,1 triliun (setara dengan US\$145.217) (Catatan 14).

26. SALDO LABA DAN DIVIDEN

Pada 2 Mei 2018, Perusahaan menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2017. Berdasarkan notulen rapat, pemegang saham menetapkan antara lain penggunaan laba neto Perusahaan tahun buku 2017 sebagai berikut:

- Pembagian dividen sebesar Rp8,57 triliun (setara dengan US\$614.939);
- Sisanya sebesar US\$1.925.256 digunakan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan.

Pada 31 Mei 2019, Perusahaan menyelenggarakan RUPS untuk tahun buku 2018. Berdasarkan notulen rapat, pemegang saham menetapkan antara lain penggunaan laba neto Perusahaan tahun buku 2018 adalah sebagai berikut:

- Pembagian dividen sebesar Rp7,95 triliun (setara dengan US\$552.659);
- Sisanya digunakan sebagai cadangan untuk mendukung kegiatan operasional dan pengembangan Perusahaan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

27. PENJUALAN DALAM NEGERI MINYAK MENTAH, GAS BUMI, ENERGI PANAS BUMI DAN PRODUK MINYAK

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Pertamax, Pertamax Turbo, Peralite, dan Pertadex (bahan bakar diesel)	11.272.222	11.215.914
Minyak Solar ("ADO")	10.516.058	10.713.543
LPG, Petrokimia, Pelumas dan Lainnya	8.196.776	8.201.023
Bensin premium	4.914.915	4.509.233
Avtur dan Avigas	3.408.584	3.955.434
Gas alam	2.754.717	3.196.038
Minyak bumi	793.372	917.333
Panas bumi-uap dan Listrik	654.273	645.593
BBM Industri dan <i>Marine</i>	603.971	639.575
DMO fees-minyak mentah	548.204	612.953
Minyak tanah	112.656	123.894
Minyak diesel industri	7.762	11.978
Jumlah	43.783.510	44.742.511

28. PENGGANTIAN BIAYA SUBSIDI DARI PEMERINTAH

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Tahun berjalan:		
Penggantian biaya subsidi LPG tabung 3 kg (Catatan 8b)	2.673.170	3.496.603
Penggantian biaya subsidi JBT Solar, Biosolar dan Minyak Tanah (Catatan 8c)	2.263.031	2.126.796
Penggantian biaya subsidi minyak tanah (catatan 8)	-	16.828
Sub jumlah	4.936.201	5.640.227
Penyesuaian nilai wajar penggantian biaya subsidi:		
LPG tabung 3 kg (Catatan 8b)	(19.411)	-
JBT Solar, Biosolar, dan Minyak Tanah (Catatan 8c)	(38.582)	-
Koreksi audit pemerintah (BPK & ESDM)		
Untuk penggantian biaya subsidi:		
LPG Tahun 2019 (Catatan 8b)	(1.073)	-
JBT Solar, Biosolar, dan Minyak Tanah Tahun 2019 (Catatan 8c)	(2.060)	-
LPG Tahun 2018 (Catatan 8b)	-	(1.252)
JBT Solar, Biosolar, dan Minyak Tanah Tahun 2018 (Catatan 8c)	-	(699)
LPG Tahun 2017 (Catatan 8b)	-	(5.661)
JBT Solar, Biosolar, dan Minyak Tanah Tahun 2017 (Catatan 8c)	-	(147)
Sub jumlah	(61.126)	(7.759)
Jumlah	4.875.075	5.632.468

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

29. PENJUALAN EKSPOR MINYAK MENTAH, GAS BUMI DAN PRODUK MINYAK

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Produk minyak	2.034.173	1.811.257
Gas bumi	860.326	637.872
Minyak mentah	734.405	1.187.824
Jumlah	3.628.904	3.636.953

30. PENDAPATAN USAHA DARI AKTIVITAS OPERASI LAINNYA

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Selisih harga ketetapan dan formula (Catatan 8a dan 17j)	1.521.948	3.102.218
Jasa perkapalan	179.317	127.010
Jasa penunjang hulu	168.902	156.869
Jasa transportasi gas bumi	95.527	204.140
Jasa asuransi	89.729	84.585
Jasa kesehatan dan rumah sakit	84.506	76.607
Jasa regasifikasi gas	48.700	31.108
Jasa perkantoran dan perhotelan	25.756	26.155
Jasa transportasi udara	18.946	18.756
Jasa teknik dan transportasi	14.083	13.359
Jasa manajemen portofolio	7.746	4.962
Jasa pelatihan dan alih daya	2.414	4.825
Lain-lain	39.594	55.613
Jumlah	2.297.168	3.906.207

31. BEBAN POKOK PENJUALAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Saldo awal persediaan produk minyak	(4.218.260)	(3.778.519)
Saldo awal penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 9)	167.270	92.854
Sub jumlah	(4.050.990)	(3.685.665)

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

31. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Beban produksi:		
- Bahan baku	(18.096.907)	(20.349.186)
- Bahan pembantu	(983.407)	(1.151.033)
- Sewa (Catatan 48c)	(697.011)	(286.481)
- Penyusutan (Catatan 12)	(537.783)	(566.412)
- Gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya	(361.026)	(452.184)
- Utilitas, prasarana, dan bahan bakar	(172.602)	(484.322)
- Angkut dan transportasi	(159.816)	(124.215)
- Jasa profesional	(137.669)	(124.109)
- Bea masuk	(132.862)	(152.255)
- Perawatan dan perbaikan	(101.630)	(115.899)
- Material dan peralatan	(83.017)	(84.460)
- Perjalanan dinas	(22.507)	(17.109)
- Lain-lain	(148.430)	(99.311)
Sub jumlah	(21.634.667)	(24.006.976)
Pembelian produk minyak dan lainnya:		
- Impor produk minyak lainnya	(7.466.222)	(9.230.605)
- Impor bensin premium	(4.902.704)	(4.433.062)
- Pembelian domestik produk minyak lainnya	(3.560.458)	(2.782.989)
- Pembelian energi panas bumi	(1.261.175)	(1.313.799)
- Impor minyak solar	(138.943)	(1.385.810)
Sub jumlah	(17.329.502)	(19.146.265)
Saldo akhir persediaan produk minyak (Catatan 9)	3.538.155	4.218.260
Saldo akhir penyisihan penurunan nilai persediaan produk minyak (Catatan 9)	(82.654)	(167.270)
Sub jumlah	3.455.501	4.050.990
Jumlah	(39.559.658)	(42.787.916)

32. BEBAN PRODUKSI HULU DAN LIFTING

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penyusutan, deplesi, dan amortisasi (Catatan 13)	(2.030.834)	(1.741.040)
Kontrak jasa	(901.176)	(734.342)
Gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya	(674.951)	(618.458)
Mitra Kontrak Bantuan Teknis ("KBT")	(283.062)	(335.532)
Material	(275.452)	(267.437)
Amortisasi investasi blok minyak dan gas (Catatan 11a)	(92.981)	(144.472)
Lain-lain	(741.278)	(545.235)
Jumlah	(4.999.734)	(4.386.516)

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

33. BEBAN EKSPLORASI

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Seismik, geologi, dan geofisika	(101.856)	(89.680)
Sumur kering (<i>dry hole</i>)	(37.657)	(112.476)
Lain-lain	(67.416)	(65.524)
Jumlah	(206.929)	(267.680)

34. BEBAN DARI AKTIVITAS OPERASI LAINNYA

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Beban pokok pendapatan jasa	(1.329.746)	(917.123)
Gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya	(228.444)	(173.585)
Penyusutan (Catatan 12)	(96.211)	(88.405)
Klaim asuransi	(87.288)	(92.864)
Jumlah	(1.741.689)	(1.271.977)

35. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penyusutan (Catatan 12)	(383.594)	(328.695)
Gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya	(271.951)	(263.020)
Angkut dan transportasi	(264.417)	(453.664)
Beban pengisian tabung LPG	(141.416)	(113.971)
Pajak, retribusi, dan denda	(113.351)	(89.179)
Sewa (Catatan 48c)	(97.245)	(26.210)
Perawatan dan perbaikan	(62.533)	(84.776)
Jasa profesional	(40.340)	(96.851)
Iklan dan promosi	(39.436)	(24.151)
Material dan peralatan	(34.209)	(33.441)
Perjalanan dinas	(22.149)	(15.331)
Utilitas, prasarana, dan bahan bakar	(21.035)	(21.092)
Lain-lain	(133.226)	(92.450)
Jumlah	(1.624.902)	(1.642.831)

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Gaji, upah, dan tunjangan karyawan lainnya	(698.848)	(649.669)
Pajak, retribusi, dan denda	(267.111)	(295.439)
Penyusutan, deplesi, dan amortisasi (Catatan 11e, 12 dan 13)	(141.599)	(107.538)
Jasa profesional	(89.736)	(41.828)
Sewa (Catatan 48c)	(45.272)	(31.177)
Material dan peralatan	(56.465)	(36.022)
Perawatan dan perbaikan	(42.674)	(24.825)
Perjalanan dinas	(27.108)	(23.252)
Pelatihan, pendidikan, dan rekrutmen	(27.521)	(29.828)
Lain-lain	(157.286)	(90.333)
Jumlah	(1.553.620)	(1.329.911)

37. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Pendapatan keuangan:		
Piutang dari Pemerintah (Catatan 8a)	867.866	-
Deposito berjangka	192.204	161.818
Jasa giro	63.132	39.958
Investasi lainnya	98.178	54.797
Jumlah	1.221.380	256.573
Beban keuangan:		
Obligasi	(572.008)	(470.757)
Pinjaman jangka panjang	(141.388)	(180.048)
Pinjaman jangka pendek	(99.620)	(59.963)
Biaya akresi (Catatan 22)	(86.640)	(87.035)
Sewa pembiayaan	(30.164)	(30.309)
Lain-lain	(35.470)	(7.126)
Jumlah	(965.290)	(835.238)

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

38. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penyesuaian <i>deferral notes</i> TPPI (Catatan 11c)	96.016	-
Pendapatan dari denda kontrak dan material serta klaim	59.822	91.101
Pemulihan (penurunan) nilai aset minyak dan gas (Catatan 13)	23.409	(218.189)
Dilusi kepemilikan saham TPPI (Catatan 11b)	20.672	-
Pendapatan sewa	14.137	35.325
Penyesuaian nilai wajar atas investasi lainnya	5.663	52.843
Provisi kontrak LNG yang memberatkan (Catatan 48e)	(405.630)	-
(Penurunan) pemulihan nilai piutang	(133.233)	108.757
Koreksi <i>take or pay</i> kontrak LNG	(113.715)	-
(Penurunan) pemulihan nilai aset tetap (Catatan 12)	(98.171)	2.719
Penurunan nilai investasi pada obligasi TPPI (Catatan 11c)	(38.756)	-
Penurunan nilai investasi blok minyak dan gas (Catatan 11a)	(35.184)	(154.773)
Denda pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") (Catatan 39a)	-	(36.622)
Lain-lain, neto	(38.018)	38.014
Jumlah	(642.988)	(80.825)

39. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pajak Penghasilan Badan ("PPH")		
Perusahaan:		
Kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan:		
- 2019	231.791	-
- 2017	14.520	14.520
Sub jumlah	246.311	14.520
Entitas anak:		
Pajak penghasilan badan dan dividen	490.484	434.117
Sub jumlah PPh - konsolidasian	736.795	448.637
PPN		
Perusahaan:		
- 2019	771.402	-
- 2018	-	386.989
- 2016	14.052	84.290
Sub jumlah	785.454	471.279
Entitas anak:		
PPN yang dapat ditagihkan kembali	370.450	315.238
PPN	325.933	386.737
Sub jumlah	696.383	701.975
Sub jumlah PPN - konsolidasian	1.481.837	1.173.254

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pajak lain-lain	18.994	18.994
Jumlah	2.237.626	1.640.885
Bagian lancar	(1.361.726)	(820.598)
Bagian tidak lancar	875.900	820.287

Rincian PPN yang dapat ditagihkan kembali adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PPN yang dapat ditagihkan kembali dari SKK Migas:		
- PT Pertamina EP	113.473	84.264
- PGN dan entitas anaknya	62.696	69.014
- PT Pertamina EP Cepu	55.310	31.194
- PT Pertamina Hulu Energi dan entitas anaknya	26.385	28.009
Sub jumlah	257.864	212.481
PPN yang dapat ditagihkan kembali kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan:		
- PT Pertamina Geothermal Energy	112.586	102.757
Jumlah	370.450	315.238

Perusahaan

Pada tanggal 3 dan 5 September 2019, Perusahaan memperoleh beberapa surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") yang menyetujui keberatan yang disampaikan oleh Perusahaan atas SKPKB Pajak Penghasilan (PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 15) dan PPN untuk tahun fiskal 2016 masing-masing sebesar Rp907.565 juta (setara dengan US\$63.842) dan Rp235.652 juta (setara dengan US\$16.575). SKPKB Pajak Penghasilan sebesar Rp630.777 juta (setara dengan US\$44.368) merupakan SKPKB yang tidak dibayarkan dan sebesar Rp276.788 juta (setara dengan US\$19.474) merupakan SKPKB yang dibukukan sebagai uang muka pajak. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai SKPKB PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 15 dan PPN yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh Perusahaan, masih dicatat sebagai uang muka pajak, dikarenakan belum diterimanya surat perintah membayar dari DJP (Catatan 49e).

Pada tanggal 9 April 2019, Perusahaan menerima surat keputusan dari DJP dengan No. KEP-00297/NKEB/WPJ.19/2019 atas penghapusan denda STP PPN untuk tahun fiskal 2016 sebesar Rp400.929 juta (setara dengan US\$28.147). Jumlah tersebut dikompensasikan dengan pembayaran utang pajak PPN masa Juni 2019.

Pada tanggal 21 Maret 2019, Perusahaan menerima surat keputusan dari DJP No. KEP-00244/NKEB/WPJ.19/2019 sampai dengan No. KEP-00255/NKEB/WPJ.19/2019 atas penghapusan STP PPN tahun fiskal 2016 sebesar Rp590.934 juta (setara dengan US\$40.578). Nilai tersebut dikompensasikan dengan utang pajak sebesar Rp1.308 juta (setara dengan US\$90) sehingga dibayarkan sebesar Rp589.626 juta (setara dengan US\$40.488). Nilai tersebut telah diterima oleh Perusahaan selama bulan April 2019.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

Pada tanggal 27 Desember 2018, Perusahaan menerima SKPKB dan STP atas hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2016 sebesar Rp3.234 miliar (setara dengan US\$222.250). SKPKB terdiri dari SKPKB PPh Badan sebesar Rp565.949 juta (setara dengan US\$39.031), SKPKB PPh Potong Pungut sebesar Rp1.381 miliar (setara dengan US\$94.851) dan SKPKB PPN sebesar Rp295.043 juta (setara dengan US\$20.260). STP terdiri dari tagihan pajak dan sanksi administrasi atas PPN masing-masing sebesar Rp590.934 juta (setara dengan US\$40.578) dan Rp400.929 juta (setara dengan US\$27.531).

Dari nilai keseluruhan SKPKB dan STP tersebut, Perusahaan telah membebankan sebesar Rp533.324 juta (setara dengan US\$36.622) pada laporan laba rugi tahun 2018 (Catatan 38), sebesar Rp1.504 miliar (setara dengan US\$103.283) dibukukan sebagai uang muka pajak dan sebesar Rp565.949 juta (setara dengan US\$39.031) dibukukan sebagai penyesuaian pajak PPh badan tahun sebelumnya, sedangkan untuk nilai sisa sebesar Rp630.776 juta (setara dengan US\$43.315) tidak dibayarkan. Pada tanggal 25 Januari 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB PPh Potong Pungut 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 15, PPN dan STP PPN tahun fiskal 2016 tersebut.

Peningkatan pembayaran PPN pada tahun 2019 sebagian besar disebabkan atas pembayaran dimuka PPN atas subsidi Solar dan LPG, serta PPh Potong Pungut.

Pada tanggal 7 November 2018, Perusahaan menerima surat pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan bayar PPh badan tahun 2017 dari Kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar Tiga No. 80367/051-00367-2018 atas pengembalian pajak sebesar Rp2.264 miliar (setara dengan US\$154.769) dengan menghitung kompensasi utang pajak sebesar Rp159 juta (setara dengan US\$11), sehingga dibayarkan sebesar Rp2.264 miliar (setara dengan US\$154.758).

Pada tanggal 9 Februari 2018, Perusahaan memperoleh keputusan dari DJP No. Kep-29/WPJ.19/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Tertentu dengan Kriteria Khusus, yang diberlakukan mulai 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2019. Wajib pajak yang memenuhi semua kriteria dapat diberikan pengembalian pajak jika sebelumnya mereka telah membayar pajak berlebih.

PGN dan entitas anaknya

Pada tanggal 18 November 2015, DJP menerbitkan SKPKB PPh Final Pasal 4(2) No. 00001/245/14/081/2015 sebesar US\$127.720 atas nama BUT Saka Indonesia Pangkah Limited ("SIPL"). Penerbitan SKPKB tersebut terkait dengan pengenaan *Branch Profit Tax* ("BPT") transaksi pengalihan *Participating Interest* secara tidak langsung atas pengalihan kepemilikan saham BUT SIPL yang dimiliki oleh Hess Oil & Gas Holding Inc ("HOGHI") kepada SEI. SIPL tidak setuju dan belum membayar SKPKB tersebut.

Pada Februari 2016, SIPL mengajukan permohonan keberatan ke DJP dan tanggal 10 Februari 2017, DJP menolak permohonan keberatan tersebut melalui keputusan DJP No. KEP 00158/KEB/WPJ.07/2017.

Pada Mei 2017, SIPL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan permohonan banding tersebut dikabulkan seluruhnya berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put.112654.35/2014/PP/M.IB tahun 2018 tanggal 28 November 2018. Atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, DJP mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ("PK") ke Mahkamah Agung ("MA"), dan atas permohonan PK tersebut, MA mengabulkan permohonan PK dari DJP berdasarkan Putusan MA No. 4003/B/PK/Pjk/2019 tanggal 28 November 2019. Atas Putusan MA tersebut, Pengadilan Pajak mengirimkan surat No. PPMA-316T/PAN/2020 tertanggal 17 Januari 2020 perihal pemberitahuan dan salinan Putusan MA, dan diterima oleh SIPL pada tanggal 20 Januari 2020.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Utang pajak

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pajak penghasilan badan - Perusahaan	-	19.684
Pajak penghasilan badan - entitas anak	199.380	447.921
Sub jumlah	<u>199.380</u>	<u>467.605</u>
Pajak lain-lain:		
- Pajak penghasilan - Pasal 21	37.494	33.909
- Pajak penghasilan - Pasal 23/26	14.646	13.189
- Pajak penghasilan - Pasal 22	13.296	10.580
- Pajak penghasilan - Pasal 15/4(2)	9.495	6.271
- Pajak penghasilan - Pasal 24	24	269
- PPN	103.673	74.542
- PBBKB	124.314	119.645
Sub jumlah	<u>302.942</u>	<u>258.405</u>
Jumlah	<u>502.322</u>	<u>726.010</u>

c. Beban pajak penghasilan, neto

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Beban pajak kini (Catatan 39d)	(1.877.667)	(2.627.443)
Beban pajak tangguhan (Catatan 39e)	(384.926)	(385.759)
Neto	<u>(2.262.593)</u>	<u>(3.013.202)</u>

d. Pajak kini

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak (kerugian). Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak disampaikan ke DJP.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan - konsolidasian	4.880.979	5.729.596
Ditambah:		
Eliminasi konsolidasian	3.301.063	3.610.474
Laba sebelum pajak penghasilan - entitas anak	(5.635.371)	(6.610.027)
Laba Perusahaan sebelum pajak penghasilan	<u>2.546.671</u>	<u>2.730.043</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dengan estimasi penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Perbedaan temporer:		
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (<i>tantiem</i>)	21.756	(6.894)
Penyisihan penurunan nilai atas aset keuangan	147.113	(139.273)
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	43.041	(7.368)
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	2.143	(55)
Akrual biaya hukum	568	14.918
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(45.241)	137.248
Penyusutan aset tetap	400.770	(112.976)
Penyesuaian nilai wajar piutang selisih harga (Catatan 2u dan 8a)	(501.680)	981.331
Liabilitas imbalan kerja karyawan	(112.026)	(181.421)
Revaluasi nilai aset	-	(14.221)
Lain-lain	2.926	7.624
Perbedaan permanen:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	542.514	342.456
Biaya kesehatan pensiunan	96.394	648
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan	5.101	5.372
Laba dari entitas anak dan entitas asosiasi	(3.285.220)	(3.341.620)
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(229.733)	(149.244)
Pendapatan lain-lain dikenakan pajak final	(8.328)	1.055.818
Jumlah perbedaan temporer dan permanen	(2.919.902)	(1.407.657)
(Rugi) laba fiskal Perusahaan	(373.231)	1.322.386
Pajak penghasilan kini - Perusahaan	-	330.597
Penyesuaian tahun sebelumnya	7.172	42.403
Pajak penghasilan kini - entitas anak	1.870.495	2.254.443
Pajak penghasilan kini konsolidasian	1.877.667	2.627.443

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan Grup dengan jumlah teoritis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian Grup adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Laba sebelum pajak penghasilan - konsolidasian	4.880.979	5.729.596
Pajak penghasilan dihitung dengan rata-rata tarif pajak <i>statutory</i>	2.663.696	2.301.890
Beban yang tidak dapat dikurangkan	415.311	375.007
Biaya kesehatan pensiunan	24.099	162
Aset tetap yang tidak dapat disusutkan	1.344	1.368
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	(853.718)	(868.954)
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(21.842)	1.198.784
Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final	(66.777)	(37.458)
Penyesuaian tahun sebelumnya	7.172	42.403
Rugi fiskal yang belum diakui	93.308	-
Beban pajak penghasilan konsolidasian	2.262.593	3.013.202

Jumlah teoritis beban pajak penghasilan dihitung menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak yang berlaku atas masing-masing entitas yang dikonsolidasi ke dalam Grup. Rata-rata tertimbang tarif pajak yang digunakan adalah 46,36% (2018: 52,59%).

e. Pajak tangguhan

	31 Desember 2019					31 Desember 2019
	1 Januari 2019	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	
Aset pajak tangguhan						
Imbalan kerja karyawan	247.522	(262)	1.541	387	(24.382)	224.806
Penyisihan penurunan nilai aset keuangan	79.477	-	145	-	37.945	117.567
Provisi pembongkaran dan restorasi	122.236	(103)	-	-	(47.187)	74.946
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (<i>tantiem</i>)	62.096	-	34	-	7.413	69.543
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	75.694	-	-	-	(16.076)	59.618
Aset tetap	586.578	-	28.507	-	134.653	749.738
Penyisihan penurunan nilai persediaan	70.367	-	30	-	(10.955)	59.442
Penyisihan penurunan nilai aset <i>non-free</i> dan <i>non-clear</i>	27.589	-	-	-	-	27.589
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	2.071	(647)	52	-	1.386	2.862
Pendapatan tangguhan	276	-	-	-	122	398
Biaya hukum yang masih harus dibayar	7.369	-	-	-	142	7.511
Aset minyak dan gas bumi	(72.763)	-	-	-	62.423	(10.340)
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	(12.996)	-	-	-	10.662	(2.334)
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.951)	-	-	-	536	(5.415)
Penyesuaian nilai wajar piutang dari selisih harga (Catatan 2u dan 8a)	245.333	-	-	-	(125.420)	119.913
Lain-lain	6.968	703	(5.973)	-	8.529	10.227
Sub jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian, neto	1.441.866	(309)	24.336	387	39.791	1.506.071

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

31 Desember 2019						
	1 Januari 2019	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	31 Desember 2019
Liabilitas pajak tangguhan						
Provisi pembongkaran dan restorasi	365.066	-	-	-	(26.220)	338.846
Aset sewa pembiayaan	29.905	-	-	-	(1.781)	28.124
Pendapatan tangguhan	8.068	-	-	-	229	8.297
Imbalan kerja karyawan	16.657	103	1	320	3.307	20.388
Penyisihan penurunan nilai	2.008	439	4	-	(8.545)	(6.094)
Aset minyak dan gas bumi	(3.070.616)	-	-	-	(459.707)	(3.530.323)
Selisih nilai wajar atas nilai buku	(12.598)	(426)	(6)	-	774	(12.256)
Aset tetap	(201.891)	35	(164)	-	(68.292)	(270.312)
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	(342.856)	-	-	-	31.904	(310.952)
Lain-lain	(101.149)	-	391	-	103.614	2.856
Sub jumlah liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(3.307.406)	151	226	320	(424.717)	(3.731.426)
Jumlah	(1.865.540)	(158)	24.562	707	(384.926)	(2.225.355)
31 Desember 2018						
	1 Januari 2018	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	31 Desember 2018
Aset pajak tangguhan						
Imbalan kerja karyawan	314.471	516	5.143	(1.302)	(71.306)	247.522
Penyisihan penurunan nilai aset keuangan	121.406	-	(367)	-	(41.562)	79.477
Provisi pembongkaran dan restorasi	136.394	591	-	-	(14.749)	122.236
Penyisihan insentif dan bonus kinerja (<i>tantiem</i>)	83.513	-	(43)	-	(21.374)	62.096
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	64.825	-	-	-	10.869	75.694
Aset tetap	518.336	-	(3.486)	133	71.595	586.578
Penyisihan penurunan nilai persediaan	37.156	-	(46)	-	33.257	70.367
Penyisihan penurunan nilai aset <i>non-free</i> dan <i>non-clear</i>	27.588	-	1	-	-	27.589
Rugi fiskal yang dibawa ke masa depan	13.764	1.567	(27)	-	(13.233)	2.071
Pendapatan tangguhan	7.590	-	-	-	(7.314)	276
Biaya hukum yang masih harus dibayar	3.640	-	-	-	3.729	7.369
Aset minyak dan gas bumi	(5.002)	(3.382)	-	-	(64.379)	(72.763)
Aset dan liabilitas sewa pembiayaan	(11.205)	-	2	-	(1.793)	(12.996)
Diskonto dan biaya emisi yang belum diamortisasi	(5.937)	-	-	-	(14)	(5.951)
Penyesuaian nilai wajar piutang dari selisih harga (Catatan 2u dan 8a)	-	-	-	-	245.333	245.333
Lain-lain	64.541	(2.439)	(298)	-	(54.836)	6.968
Sub jumlah aset pajak tangguhan konsolidasian, neto	1.371.080	(3.147)	879	(1.169)	74.223	1.441.866

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

39. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak tangguhan (lanjutan)

	31 Desember 2018					
	1 Januari 2018	Dibebankan pada ekuitas	Selisih penjabaran	Dibebankan pada laporan penghasilan komprehensif lain	Dibebankan pada laporan laba rugi	31 Desember 2018
Liabilitas pajak tangguhan						
Provisi pembongkaran dan restorasi	371.738	-	-	-	(6.672)	365.066
Aset sewa pembiayaan	29.013	-	-	-	892	29.905
Pendapatan tangguhan	10.750	-	-	-	(2.682)	8.068
Imbalan kerja karyawan	8.549	-	-	(395)	8.503	16.657
Penyisihan penurunan nilai	1.081	-	-	-	927	2.008
Aset minyak dan gas bumi	(2.801.228)	-	-	-	(269.388)	(3.070.616)
Selisih nilai wajar atas nilai buku	(14.114)	-	-	-	1.516	(12.598)
Aset tetap	(351.100)	-	174	-	149.035	(201.891)
Laba yang belum direalisasikan dari transaksi konsolidasian	(377.158)	-	-	-	34.302	(342.856)
Lain-lain	274.317	-	949	-	(376.415)	(101.149)
Sub jumlah liabilitas pajak tangguhan konsolidasian, neto	(2.848.152)	-	1.123	(395)	(459.982)	(3.307.406)
Jumlah	(1.477.072)	(3.147)	2.002	(1.564)	(385.759)	(1.865.540)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 telah memperhitungkan tarif pajak yang berlaku untuk setiap periode yang terkait.

Manajemen Grup berpendapat bahwa aset pajak tangguhan tersebut di atas dapat dipulihkan melalui penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

f. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJP dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Untuk tahun pajak 2018 dan seterusnya, jangka waktu tersebut adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas dan setara kas (Catatan 5)	6.239.908	8.416.251
Kas yang dibatasi penggunaannya (Catatan 6)	127.845	86.230
Piutang usaha - pihak berelasi (Catatan 40a)	1.554.094	1.297.651
Piutang Pemerintah (Catatan 8)	6.689.595	4.758.409
Piutang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 40b)	182.487	149.178
Dana yang dibatasi penggunaannya - tidak lancar (Catatan 14)	1.153.273	910.999
Jumlah	15.947.202	15.618.718
Persentase terhadap jumlah aset	24%	24%

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pinjaman jangka pendek (Catatan 15)	1.069.895	3.164.724
Utang usaha - pihak berelasi (Catatan 40c)	73.304	78.781
Utang Pemerintah (Catatan 17)	1.736.442	2.002.825
Liabilitas jangka panjang (Catatan 19)	172.874	179.361
Utang lain-lain - pihak berelasi (Catatan 40d)	74.459	54.011
Jumlah	3.126.974	5.479.702
Persentase terhadap jumlah liabilitas	9%	16%

a. Piutang usaha

Piutang usaha - pihak berelasi yang berasal dari penjualan dalam negeri minyak mentah gas bumi dan energi panas bumi dan ekspor produk minyak.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Piutang usaha - pihak berelasi	1.623.238	1.330.381
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai	(69.144)	(32.730)
Jumlah	1.554.094	1.297.651

Piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Tentara Nasional Indonesia ("TNI")/Kementerian Pertahanan ("Kemhan") (Catatan 47b.ii.(i))	432.781	318.142
PLN dan entitas anak	420.480	449.662
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak	408.224	239.178
PT Pupuk Indonesia (Persero)	68.704	25.412
PPT Energy Trading Co. Ltd.	48.938	22
PT Patra SK	22.605	40.013
PT Donggi-Senoro LNG	21.537	28.828
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	11.956	11.499
PT Aneka Tambang	2.801	14.226
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$10.000)	185.212	203.399
	1.623.238	1.330.381
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(69.144)	(32.730)
Jumlah	1.554.094	1.297.651

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang usaha dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	(32.730)	(46.847)
Pemulihan penurunan nilai atas piutang yang terpulihkan - neto	1.159	18.734
Penurunan nilai selama tahun berjalan	(36.475)	(7.606)
(Rugi) laba selisih kurs	(1.098)	2.989
Saldo akhir	<u>(69.144)</u>	<u>(32.730)</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang usaha dari pihak-pihak berelasi.

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Rupiah	1.053.963	870.672
Dolar AS	569.206	459.641
Lain-lain	69	68
Jumlah	<u>1.623.238</u>	<u>1.330.381</u>

Piutang atas penyaluran BBM dan pelumas kepada Tentara Nasional Indonesia/Kementerian Pertahanan (TNI/Kemhan)

Penyaluran BBM dan pelumas kepada TNI/Kemhan didasarkan pada rencana kebutuhan TNI/Kemhan dan dibatasi dengan Anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas ("BMP") sebagai salah satu anggaran belanja di TNI/Kemhan dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Saldo awal	318.142	258.566
Penyaluran bahan bakar minyak dan pelumas	453.926	479.959
Penerimaan atas penyaluran BMP	(346.610)	(403.723)
Laba (rugi) selisih kurs	7.323	(16.660)
Saldo akhir	<u>432.781</u>	<u>318.142</u>

Pada 31 Desember 2019 dan 2018 manajemen telah mengakui penurunan nilai masing-masing sebesar US\$39.741 (termasuk provisi *time value of money* sebesar US\$26.135) dan US\$12.992.

Piutang atas penyaluran BBM kepada PLN

Perusahaan melakukan penyaluran minyak solar dan minyak bakar industri kepada PLN untuk digunakan oleh pembangkit-pembangkit listrik PLN di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang tahun 2019, Perusahaan telah menerima pembayaran dari PLN sesuai dengan rumusan harga yang telah disepakati antara Direksi Perusahaan dan Direksi PLN pada tanggal 22 Mei 2018 yang berlaku sampai dengan 2020.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Piutang usaha (lanjutan)

Jika kemudian terdapat perbedaan rumusan harga sementara dengan rumusan harga final yang disepakati bersama, maka koreksi akan dicatat pada periode dimana kesepakatan atas rumusan harga final tersebut telah selesai.

b. Piutang lain-lain

Piutang lain-lain berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
PT Donggi Senoro LNG	121.784	115.500
PLN dan entitas anak	44.491	-
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)	18.919	18.190
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$10.000)	82.225	100.011
Sub jumlah	267.419	233.701
Dikurangi: penyisihan penurunan nilai	(20.375)	(19.616)
Sub jumlah	247.044	214.085
Dikurangi: bagian lancar	(182.487)	(149.178)
Bagian tidak lancar (Catatan 14)	64.557	64.907

Mutasi saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain dari pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo awal	(19.616)	(20.860)
Pemulihan penurunan nilai	-	699
Penurunan nilai	(2)	(705)
(Rugi) laba selisih kurs	(757)	1.250
Saldo akhir	(20.375)	(19.616)

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai telah mencukupi untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang lain-lain dari pihak berelasi.

Piutang dari PT Donggi Senoro LNG

Piutang dari PT Donggi Senoro LNG tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$121.784 dan US\$115.500 ditujukan untuk pembangunan fasilitas produksi LNG yang berkapasitas 2 juta ton per tahun. PT Donggi Senoro LNG dimiliki oleh PHE (29%), Sulawesi LNG Development Limited (59,9%) dan PT Medco LNG Indonesia (11,1%). Proyek yang direncanakan selama 4 tahun ini dibiayai 40% dari ekuitas dan 60% dari pinjaman.

Tingkat suku bunga pinjaman adalah LIBOR Dolar AS satu bulan ditambah 3,75% per tahun dan jatuh tempo setiap tiga bulan setelah pinjaman dicairkan. Pada tahun 2019 dan 2018, biaya bunga yang timbul ditambahkan ke pinjaman pokok karena fasilitas produksi LNG masih dalam tahap konstruksi. Pendapatan bunga selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$6.284 dan US\$6.043.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Piutang lain-lain (lanjutan)

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) ("MNA")

Pada tanggal 27 Oktober 2009, MNA telah mengajukan permohonan untuk merestrukturisasi utangnya. Kesepakatan dicapai pada tanggal 17 Oktober 2011 melalui rapat dengan Kementerian BUMN. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 saldo penyisihan penurunan nilai atas piutang ini masing-masing sebesar US\$18.919 dan US\$18.190.

c. Utang usaha

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
SKK Migas	8.325	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.	7.850	3.027
PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama	7.721	-
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.	6.824	3.690
PT Perta-Samtan Gas	6.558	8.381
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3.766	6.279
PT Barata Indonesia (Persero)	2.605	-
PT Patra SK	2.585	4.060
Lain-lain (masing-masing di bawah US\$2.000)	27.070	53.344
Jumlah	<u>73.304</u>	<u>78.781</u>

d. Utang lain-lain

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Lembaga Manajemen Aset Negara ("LMAN")	31.923	32.392
DJKN	25.758	7.606
SKK Migas	5.708	-
Lain-lain	11.070	14.013
Jumlah	<u>74.459</u>	<u>54.011</u>

e. Penjualan dan pendapatan usaha lainnya

Grup melakukan penjualan dan pendapatan usaha lainnya kepada pihak berelasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Penjualan kepada pihak berelasi mencerminkan 22% dan 24% dari jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya di tahun-tahun tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	4.317.369	4.872.641
Pemegang saham	548.205	450.879
Entitas asosiasi	700	1.222
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah (Catatan 28)	4.875.075	5.632.468
Saldo dipindahkan	9.741.349	10.957.210

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

e. Penjualan dan pendapatan usaha lainnya (lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Saldo pindahan	9.741.349	10.957.210
Imbalan jasa pemasaran		
Pemegang saham	-	15.432
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya		
Entitas berelasi dengan Pemerintah	2.467.659	3.210.732
Jumlah	12.209.008	14.183.374

f. Beban pokok penjualan

Pembelian dari pihak terkait untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan 22% dan 25% dari total biaya barang terjual untuk tahun tersebut. Rinciannya adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Minyak mentah dan Gas Bumi		
Pemegang saham	8.528.269	10.002.633
Produk minyak:		
Perusahaan ventura bersama	133.532	158.260
Entitas asosiasi	-	332.752
Jumlah	8.661.801	10.493.645

g. Kompensasi manajemen kunci dan Dewan Komisaris

Manajemen kunci adalah Direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam Perusahaan. Kompensasi yang dibayar dan terutang pada manajemen kunci dan Dewan Komisaris pada tahun yang berakhir 31 Desember 2019 masing-masing sebesar US\$23.635 dan US\$26.286 (2018: US\$29.809 dan US\$17.464).

h. Hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Sifat dari hubungan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Hubungan	Pihak berelasi
(i). Pemegang Saham	Pemerintah Republik Indonesia
(ii). Entitas asosiasi	PPT Energy Trading Co. Ltd. TPPI Tuban Petro PT Donggi Senoro LNG PT Asuransi Samsung Tugu PT Gas Energi Jambi Seplat
(iii). Perusahaan ventura bersama	PT Patra SK PT Perta-Samtan Gas PT Perta Daya Gas Transgasindo

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

40. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

h. Hubungan dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Sifat dari hubungan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Hubungan	Pihak berelasi
(iii). Perusahaan ventura bersama (lanjutan)	Perkasa PRPP
(iv). Mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan Perusahaan	Koperasi Karyawan Pertamina Dana Pensiun Pertamina Pertamina Foundation Yayasan Kesehatan Pertamina
(v). Entitas berelasi dengan Pemerintah	TNI/Kemhan POLRI Kementerian Keuangan SKK Migas LMAN PLN dan entitas anak PT Pupuk Indonesia (Persero) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan entitas anak PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PT Aneka Tambang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. PT Barata Indonesia (Persero) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) BNI BNI Syariah BRI BRI Syariah BRI Agroniaga Bank Mandiri Bank Mandiri Syariah PT Arun Natural Gas Liquefaction PT Badak Natural Gas Liquefaction Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lainnya
(vi). Personil Manajemen Kunci	Direksi Personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam Perusahaan
(vii). Dewan Pengawas Tata Kelola Perusahaan	Dewan Komisaris

41. INFORMASI SEGMENT

Manajemen telah menentukan segmen operasi berdasarkan laporan yang ditelaah oleh komite pengarah stratejik yang digunakan untuk mengambil keputusan stratejik.

Segmen dikelompokkan menjadi dua kegiatan usaha utama meliputi Hulu dan Hilir, yang merupakan laporan segmen Perusahaan sesuai dengan PSAK 5 (Penyesuaian 2014), Segmen Operasi (Catatan 2v). Kegiatan usaha Gas dan Energi Baru Terbarukan saat ini dikelompokkan pada segmen lain-lain karena masih belum memenuhi ambang batas kuantitatif sebagai segmen operasi dilaporkan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

	31 Desember 2019					
	Hulu	Hilir	Lainnya*)	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasi
Penjualan eksternal	6.412.938	44.064.253	4.107.466	54.584.657	-	54.584.657
Penjualan antar segmen	5.710.697	353.143	473.120	6.536.960	(6.536.960)	-
Jumlah segmen pendapatan	12.123.635	44.417.396	4.580.586	61.121.617	(6.536.960)	54.584.657
Hasil segmen**)	5.112.657	(784.219)	548.859	4.877.297	20.828	4.898.125
Laba selisih kurs, neto						289.430
Pendapatan keuangan						1.221.380
Beban keuangan						(965.290)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama						80.322
Beban lain-lain, neto						(642.988)
						(17.146)
Laba sebelum pajak penghasilan						4.880.979
Beban pajak penghasilan						(2.262.593)
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba <i>merging entities</i>						2.618.386
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk						2.529.342
Kepentingan non-pengendali						89.044
Informasi Lain						
Segmen aset	25.726.635	34.461.868	6.444.700	66.633.203	(2.520.674)	64.112.529
Penyertaan jangka panjang	1.434.169	16.699.269	357.863	18.491.301	(15.517.422)	2.973.879
Jumlah aset	27.160.804	51.161.137	6.802.563	85.124.504	(18.038.096)	67.086.408
Jumlah liabilitas	9.793.778	25.383.631	3.638.486	38.815.895	(2.948.968)	35.866.927
Beban penyusutan, deplesi dan amortisasi	1.981.649	758.585	542.768	3.283.002	-	3.283.002
Penambahan aset tetap, aset minyak & gas serta panas bumi	3.368.297	1.390.213	340.766	5.099.276	-	5.099.276

*) Lain-lain terdiri dari sewa perkantoran dan perumahan, hotel, jasa pengangkutan udara, jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit, manajemen portofolio investasi, jasa transportasi gas, jasa pengembangan sumber daya manusia dan jasa asuransi.

**) Laba kotor dikurangi biaya penjualan dan pemasaran, dan biaya umum dan administrasi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

31 Desember 2018						
	Hulu	Hilir	Lainnya*)	Jumlah sebelum eliminasi	Eliminasi	Jumlah konsolidasi
Penjualan eksternal	7.054.464	45.691.622	5.187.485	57.933.571	-	57.933.571
Penjualan antar segmen	5.498.100	399.699	266.115	6.163.914	(6.163.914)	-
Jumlah segmen pendapatan	12.552.564	46.091.321	5.453.600	64.097.485	(6.163.914)	57.933.571
Hasil segmen **)	5.960.645	(286.777)	616.351	6.290.219	(43.479)	6.246.740
Laba selisih kurs, neto						19.622
Pendapatan keuangan						256.573
Beban keuangan						(835.238)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama						122.724
Beban lain-lain, neto						(80.825)
						(517.144)
Laba sebelum pajak penghasilan						5.729.596
Beban pajak penghasilan						(3.013.202)
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba <i>merging entities</i>						2.716.394
Laba tahun berjalan setelah dampak penyesuaian laba <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada:						
Pemilik entitas induk						2.572.542
Kepentingan non-pengendali						143.852
Informasi lain						
Segmen aset	24.620.521	35.093.033	6.655.756	66.369.310	(4.469.912)	61.899.398
Penyertaan jangka panjang	1.472.711	14.970.480	183.158	16.626.349	(13.807.295)	2.819.054
Jumlah aset	26.093.232	50.063.513	6.838.914	82.995.659	(18.277.207)	64.718.452
Jumlah liabilitas	10.092.998	26.403.047	3.636.191	40.132.236	(5.023.824)	35.108.412
Depresiasi, deplesi dan beban amortisasi	1.684.534	715.492	576.536	2.976.562	-	2.976.562
Penambahan aset tetap, aset minyak & gas serta panas bumi	3.110.810	1.135.645	287.056	4.533.511	-	4.533.511

*) Lain-lain terdiri dari sewa perkantoran dan perumahan, hotel, jasa pengangkutan udara, jasa kesehatan dan pengoperasian rumah sakit, manajemen portofolio investasi, jasa transportasi gas, jasa pengembangan sumber daya manusia dan jasa asuransi.

**) Laba kotor dikurangi biaya penjualan dan pemasaran, dan biaya umum dan administrasi.

Transaksi antar segmen dilakukan dengan mengacu pada syarat yang disetujui di antara perusahaan-perusahaan.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari pendapatan konsolidasian Grup berdasarkan segmen geografis:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan:		
Indonesia	50.955.753	54.296.618
Negara lainnya	3.628.904	3.636.953
Pendapatan konsolidasian	54.584.657	57.933.571

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

41. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Pendapatan dari dua pelanggan segmen hilir untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 mencerminkan masing-masing 19% dan 16% (US\$10.113.836) dan (US\$8.936.080) dari jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya.

Seluruh aset Grup secara substansial berlokasi di Indonesia, kecuali beberapa kepemilikan aset di luar negeri seperti anak Perusahaan PIEP yang masing-masing berlokasi di Aljazair, Irak, Malaysia, Italia, Perancis, Myanmar, Kanada, Kongo, Tanzania, Gabon, Kolombia, Namibia, dan Venezuela.

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI

a. Kontrak Kerja Sama (“KKS”)

KKS dibuat oleh kontraktor KKS dengan Pemerintah melalui SKK Migas (dahulu BP Migas) untuk jangka waktu kontrak 20-30 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Wilayah kerja

Wilayah kerja KKS adalah wilayah dimana kontraktor KKS dapat melaksanakan kegiatan operasi minyak dan gas bumi. Pada saat atau sebelum akhir tahun kontrak ke sepuluh sejak tanggal efektif KKS, kontraktor KKS wajib mengembalikan persentase tertentu dari luas wilayah kerja yang ditentukan kepada Pemerintah.

- Bagi hasil produksi minyak mentah dan gas bumi

Pembagian hasil produksi minyak dan gas bumi dihitung secara tahunan dan merupakan jumlah lifting minyak dan gas bumi selama periode/tahun setelah dikurangi kredit investasi. *First Tranche Petroleum* (“FTP”) dan *cost recovery*.

Kontraktor KKS dikenai pajak atas pendapatan kena pajak dari kegiatan KKS berdasarkan bagian mereka atas hasil produksi minyak dan gas bumi, dikurangi bonus-bonus, pada tarif pajak gabungan yang terdiri dari pajak penghasilan badan dan pajak dividen.

- Pengembalian biaya operasi

Pengembalian biaya operasi tiap tahun terdiri dari:

- i. Biaya non-kapital tahun berjalan;
- ii. Penyusutan biaya kapital tahun berjalan; dan
- iii. Biaya operasi tahun sebelumnya yang belum memperoleh penggantian (*unrecovered costs*).

- Harga minyak mentah dan gas bumi

Bagian kontraktor KKS atas produksi minyak mentah dinilai dengan Harga Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Prices* - “ICP”). Gas bumi yang dikirim kepada pihak ketiga dan pihak berelasi dinilai dengan harga yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli yang bersangkutan.

- DMO

Minyak mentah

Kontraktor KKS wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia dengan perhitungan setiap tahun sebagai berikut:

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

a. Kontrak kerja sama (“KKS”) (lanjutan)

- DMO (lanjutan)

Minyak mentah (lanjutan)

- i. Mengalihkan jumlah minyak mentah yang diproduksi dari wilayah kerja dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak mentah dalam negeri sebagai pembilang dan jumlah seluruh minyak mentah Indonesia yang diproduksi oleh seluruh Perusahaan perminyakan di Indonesia sebagai penyebut;
- ii. Menghitung 25% jumlah minyak mentah yang diproduksi dari wilayah kerja KKS;
- iii. Mengalihkan jumlah minyak mentah yang lebih kecil antara hitungan (i) dan (ii) dengan persentase bagi produk minyak mentah.

Harga DMO untuk minyak mentah adalah harga rata-rata tertimbang dari seluruh jenis minyak mentah yang dijual oleh kontraktor KKS atau harga lain yang ditentukan dalam KKS.

Gas bumi

Kontraktor KKS juga wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri Indonesia sebesar 25% dari jumlah gas bumi yang diproduksi dari wilayah kerja kontraktor KKS dikalikan dengan persentase bagi hasil gas bumi kontraktor KKS.

Harga DMO untuk gas bumi adalah harga yang ditentukan berdasarkan harga jual yang disepakati di dalam kontrak penjualan.

- FTP

Pemerintah dan kontraktor berhak untuk menerima sampai sebesar 10%-20% dari jumlah produksi minyak dan gas bumi setiap tahun sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi.

- Hak milik atas persediaan, perlengkapan dan peralatan

Persediaan, perlengkapan dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor KKS untuk kegiatan operasi minyak dan gas bumi merupakan milik Pemerintah. Akan tetapi, kontraktor KKS memiliki hak untuk menggunakan persediaan, perlengkapan dan peralatan tersebut sampai dinyatakan surplus atau ditinggalkan dengan persetujuan SKK Migas.

b. Kontrak kerja sama PT Pertamina EP dengan SKK Migas

Pada tanggal 17 September 2005, SKK Migas dan PT Pertamina EP menandatangani Kontrak Kerja Sama (“KKS”) dalam bentuk Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina (“KMGBP”) yang serupa dengan Kontrak Bagi Hasil (“KBH”) sebagai kelanjutan dari KMGBP Pertamina, untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dari tanggal 17 September 2005 sampai tanggal 16 September 2035. Kontrak ini dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah. Sebagai konsekuensi Perusahaan melanjutkan KMGBP Pertamina, semua aset dan liabilitas Pertamina sehubungan dengan KMGBP dialihkan ke Perusahaan sebesar nilai buku.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

b. Kontrak kerja sama PT Pertamina EP dengan SKK Migas (lanjutan)

Kontrak kerja sama PT Pertamina EP memiliki ketentuan-ketentuan keuangan sebagai berikut:

- **Wilayah kerja**

Meliputi area eksplorasi dan produksi Pertamina Lama selain Blok Cepu dan Blok Randugunting.

- **Bagi hasil minyak mentah dan gas bumi**

Bagi hasil produksi minyak dan gas antara PT Pertamina EP dan Pemerintah masing-masing 67,2269% dan 32,7731%.

- **FTP**

Pemerintah dan PT Pertamina EP berhak untuk menerima sebesar 5% dari jumlah produksi minyak dan gas setiap tahunnya sebelum dikurangi dengan pengembalian biaya operasi dan kredit investasi. FTP dibagi ke Pemerintah dan PT Pertamina EP berdasarkan jatah produksi minyak dan gas yang sudah ditentukan.

- **Harga minyak mentah dan gas bumi**

Penjualan minyak mentah Perusahaan dinilai sebesar ICP. Penyerahan gas bumi dinilai sebesar harga yang ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas ("PJBG").

c. Perjanjian kerja sama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain

PT Pertamina EP dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan operasi minyak dan gas bumi atau perjanjian perbantuan teknis di sebagian wilayah kerja KKS dalam bentuk perjanjian kerja sama operasi dengan persetujuan Pemerintah melalui SKK Migas.

Perjanjian kerja sama dengan pihak lainnya adalah sebagai berikut:

- **Kontrak Bantuan Teknis ("KBT")**

Dalam KBT, kegiatan operasional dilakukan melalui perjanjian kemitraan dengan PT Pertamina EP. KBT diberikan pada lapangan yang telah berproduksi atau pernah berproduksi tetapi sudah tidak berproduksi. Produksi minyak dan gas bumi dibagi menjadi bagian tidak dibagi (*non-shareable*) dan bagian dibagi (*shareable*). Bagian tidak dibagi merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu lapangan (berdasarkan tren historis produksi dari suatu lapangan) pada saat KBT ditandatangani dan menjadi hak PT Pertamina EP. Produksi bagian tidak dibagi akan menurun setiap tahunnya, yang mencerminkan ekspektasi penurunan produksi. Bagian dapat dibagi berkaitan dengan penambahan produksi yang berasal dari investasi mitra usaha pada lapangan KBT.

Mitra usaha berhak atas pengembalian biaya dengan pembatasan tertentu yang diatur dalam masing-masing kontrak. Sisa produksi bagian dibagi (produksi yang dibagi dikurangi pengembalian biaya) akan dibagi antara PT Pertamina EP dan mitra usaha. Persentase bagi hasil sisa produksi yang dibagi untuk mitra usaha diatur dalam masing-masing kontrak, yaitu antara 26,7857% sampai dengan 35,7143% untuk minyak bumi dan 62,5000% untuk gas bumi. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 7 perjanjian KBT PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera dan Jawa.

Apabila dalam suatu Tahun Kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang dialokasikan dalam suatu Tahun Kalender, maka jumlah kelebihan yang belum dikembalikan akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

c. Perjanjian kerja sama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- Kontrak Bantuan Teknis (“KBT”) (lanjutan)

Pengembalian biaya operasi dan bagi hasil untuk pihak-pihak lain pada perjanjian KBT merupakan bagian dari pengembalian biaya operasi berdasarkan KKS PT Pertamina EP.

Pada saat berakhirnya KBT, seluruh aset KBT diserahkan kepada PT Pertamina EP. Mitra usaha KBT bertanggung-jawab untuk menyelesaikan semua liabilitas KBT yang masih belum diselesaikan kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal tersebut.

- Kontrak Kerja Sama Operasi (“KSO”)

Dalam KSO, kegiatan operasional dilakukan melalui perjanjian mitra usaha dengan PT Pertamina EP. KSO diberikan pada lapangan yang telah berproduksi. Dahulu pernah berproduksi tetapi kemudian dihentikan atau belum berproduksi. Terdapat dua jenis kontrak KSO yaitu:

- a. Kontrak KSO Eksplorasi - Produksi;
- b. Kontrak KSO Produksi.

Pada kontrak KSO Eksplorasi-Produksi tidak ada bagian minyak mentah yang tidak dibagi (*Non-Shareable Oil* - “NSO”). Pada kontrak KSO Produksi, produksi minyak bumi dibagi menjadi bagian yang tidak dibagi (*non-shareable*) dan bagian yang dibagi (*shareable*).

NSO merupakan produksi yang diperkirakan dapat dicapai dari suatu lapangan (berdasarkan tren historis produksi dari suatu lapangan) pada saat perjanjian KSO ditandatangani dan menjadi hak PT Pertamina EP. Bagian dibagi berkaitan dengan penambahan produksi minyak dan gas yang berasal dari investasi mitra usaha terhadap lapangan KSO yang bersangkutan dan secara umum dibagikan dengan pola yang sama seperti KKS.

Mitra dapat memperoleh pengembalian Biaya Operasi pada suatu Tahun Kalender apabila jumlah produksi Mitra lebih besar dari Produksi Dasar. Pengembalian biaya operasi untuk mengangkat minyak inkremental sebesar maksimum 80% (delapan puluh persen) dari jumlah produksi Minyak Inkremental yang diproduksi dan dijual serta tidak digunakan untuk Operasi dalam suatu tahun kalender.

Pada beberapa kontrak KSO produksi, dalam hal produksi sama atau masih di bawah NSO, penggantian biaya produksi tidak ditunda dan dapat diperoleh mitra usaha dengan batasan sebagaimana diatur dalam masing-masing kontrak.

Dalam beberapa kontrak KSO produksi lainnya, apabila jumlah produksi Mitra lebih besar dari Produksi Dasar, Mitra dapat memperoleh pengembalian Biaya Operasi atas minyak inkremental dan NSO dengan batasan sebagaimana diatur dalam masing-masing kontrak.

Apabila dalam suatu tahun kalender, Biaya Operasi melebihi nilai Minyak Mentah yang dialokasikan dalam suatu Tahun Kalender, maka jumlah kelebihan yang belum dikembalikan akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

c. Perjanjian kerja sama PT Pertamina EP dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- Kontrak kerja sama operasi (“KSO”) (lanjutan)

Persentase bagi hasil produksi bagian mitra usaha diatur dalam masing-masing kontrak, antara berkisar antara 16,6667% sampai dengan 29,8039% untuk minyak dan 28,8627% sampai dengan 53,5714% untuk gas bumi.

Pengembalian biaya operasi untuk pihak-pihak lain pada perjanjian KSO merupakan bagian dari pengembalian biaya operasi berdasarkan KKS PT Pertamina EP.

Terdapat komitmen pasti yang harus dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun setelah tanggal kontrak KSO. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, mitra usaha diharuskan memberikan garansi bank, yang tidak dapat dibatalkan dan tanpa syarat kepada PT Pertamina EP. Mitra usaha KSO juga diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada PT Pertamina EP sejumlah uang yang telah dicantumkan di dalam dokumen penawaran sebelum tanggal penandatanganan kontrak KSO.

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 26 perjanjian mitra usaha KSO PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua serta masa kontrak selama 15-20 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2007 sampai tahun 2019 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2022 sampai tahun 2035.

Pada saat tanggal kontrak KSO berakhir, seluruh aset KSO diserahkan kepada PT Pertamina EP. Mitra usaha KSO bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua liabilitas KSO kepada pihak ketiga yang masih belum diselesaikan sampai dengan tanggal tersebut.

- Kontrak unitisasi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor KKS diwajibkan untuk melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelampiran *reservoir* yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya. Menteri ESDM menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan di antara para Kontraktor yang melakukan unitisasi setelah mendapatkan pertimbangan SKK Migas.

Karena beberapa pelampiran *reservoir* minyak dan gas PT Pertamina EP memasuki Wilayah Kerja kontraktor lainnya, Perusahaan melakukan perikatan Perjanjian Unitisasi dengan beberapa kontraktor. Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 6 Perjanjian Unitisasi PT Pertamina EP dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa dan Papua serta masa kontrak selama 10 - 50 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1985 sampai tahun 2013 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2023 sampai tahun 2035.

Berdasarkan Surat Kepala SKK Migas No. SRT-0493/SKKMA0000/2018/S1 tanggal 25 Juni 2018, perihal Penetapan Operator Baru Unitisasi Lapangan Sukowati, Fasilitas Produksi CPA Mudi dan FSO Cintanatomas, PT Pertamina EP ditunjuk sebagai operator baru lapangan Sukowati (Catatan 4h).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerja sama PHE dengan pihak-pihak lain

- Kontrak *gross split* (“*gross split*”)

Pada tanggal 13 Januari 2017, Peraturan Menteri ESDM No. 08/2017 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Bagi Hasil Tanpa Mekanisme Pengembalian Biaya Operasi atau disebut sebagai KBH *Gross Split* diterbitkan.

Dalam KBH *Gross Split*, hasil produksi minyak dan gas bumi dibagi antara Pemerintah Indonesia dan Kontraktor berdasarkan 4 kriteria sebagai berikut:

1. *Base split*;
2. *Variable split*;
3. *Progressive split*;
4. Diskresi Menteri.

Pemerintah juga telah mengatur hal-hal terkait KBH *Gross Split* sebagai berikut:

- i. Rezim pajak yang berlaku untuk KBH *Gross Split* adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan;
- ii. Kontraktor KBH *Gross Split* diwajibkan mengganti biaya investasi yang dikeluarkan oleh kontraktor KBH lama yang belum mendapatkan penggantian;
- iii. Aset minyak dan gas bumi eks-KBH lama yang dimiliki oleh DJKN akan digunakan oleh kontraktor KBH *Gross Split* dengan skema sewa;
- iv. Sewa dikenakan atas aset minyak dan gas bumi yang digunakan dan sudah *cost recovery*, kemudian nilai wajarnya dihitung berdasarkan Standar Penilaian Indonesia oleh Penilai Publik, dikalikan tarif sewa yang ditetapkan oleh DJKN.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kesepakatan KBH *Gross Split* yang telah ditandatangani adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KBH	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
MUJ ONWJ	Blok Offshore North West Java	Jawa Barat	19/01/2017	27/08/1971	18/01/2037	90%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Tuban	Jawa Timur	20/05/2018	12/02/1997	20/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Ogan Komering	Sumatera Selatan	20/05/2018	11/07/1991	20/05/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Offshore Southeast Sumatera	Sumatera Tenggara	06/09/2018	1975	05/09/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok NSO	Lepas Pantai Utara Sumatera	17/10/2018	01/10/2015	17/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Jambi Merang	Jambi	10/02/2019	22/02/2011	09/02/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Raja Pendopo	Sumatera Selatan	06/07/2019	21/11/1992	05/07/2039	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Petrogas (Island) Ltd.	Blok Salawati	Papua	22/04/2020	21/01/1993	23/04/2040	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Petrogas (Basin) Ltd.	Blok Kepala Burung	Papua	15/10/2020	07/10/1996	15/10/2040	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Eni East Sepinggan Ltd.	Blok East Sepinggan	Sepinggan Timur	20/07/2012	-	20/07/2042	15%	Minyak dan gas bumi	30 tahun
Conoco Phillips (Grissik) Ltd. Talisman, (Corridor) Ltd.	Blok Corridor	Sumatera Selatan	20/12/2023*	01/08/1987	19/12/2043	30%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok Maratua	Kalimantan Utara & Kalimantan Timur	18/02/2019	-	17/02/2049	100%	Minyak dan gas bumi	30 tahun

* Amandemen dan pernyataan kembali KBH menjadi KBH *gross split* ditandatangani tanggal 11 November 2019.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerja sama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- ***Indonesian participation arrangements ("IP")***

Melalui kesepakatan IP, Perusahaan, sebagai BUMN, mendapat tawaran untuk memiliki 10% kepemilikan di KKS pada saat pertama kali Rencana Pengembangan ("POD") disetujui oleh Pemerintah Indonesia ("Pemerintah"), yang diwakili oleh SKK Migas. Penyertaan di Blok Jabung sebesar 14,28% merupakan perolehan tambahan penyertaan sebesar 4,28% oleh Perusahaan. Perusahaan menyerahkan kepemilikan IP ini kepada entitas anak PHE pada tanggal 1 Januari 2008.

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 4 perjanjian kesepakatan kemitraan PHE melalui IP dengan wilayah kerja di Sumatera, Kalimantan dan Papua serta masa kontrak selama 20-30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1990 sampai tahun 2005 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2028 dengan persentase partisipasi 10%.

- **Kepemilikan di KKS yang diperoleh setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

1. Minyak dan gas bumi

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 16 kesepakatan kemitraan minyak dan gas bumi PHE dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua serta masa kontrak selama 20-30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1998 sampai tahun 2016 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2046 dengan persentase partisipasi berkisar dari 15% sampai dengan 100%.

2. Gas metana batubara

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 5 kesepakatan kemitraan Gas Metana Batubara ("GMB") dalam kegiatan eksplorasi dengan wilayah kerja di Sumatera dan Kalimantan serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2038 sampai tahun 2042 dengan persentase partisipasi berkisar dari 27,5% sampai dengan 100%.

3. Minyak dan gas bumi nonkonvensional

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 2 kesepakatan kemitraan Migas Non-konvensional dengan wilayah kerja di Sumatera serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut untuk tahun 2013 yang berakhir ditahun 2043 dan tahun 2015 yang berakhir ditahun 2045 dengan persentase partisipasi sebesar 100% dan 50%.

- ***Joint operating body-production sharing contracts ("JOB-PSC")***

Dalam JOB-PSC, kegiatan operasional dilakukan oleh suatu badan operasi bersama antara entitas anak PHE dan kontraktor. Bagian entitas anak PHE atas kewajiban pembiayaan ditanggung lebih dahulu oleh para kontraktor dan dibayar oleh entitas anak PHE melalui bagiannya atas produksi minyak mentah dan gas bumi, ditambah dengan 50% *uplift*. Setelah semua pembiayaan dibayar kembali, maka hasil produksi minyak mentah dan gas bumi dibagi antara entitas anak PHE dan kontraktor sesuai persentase partisipasi masing-masing dalam JOB-PSC. Bagian kontraktor atas produksi minyak mentah dan gas bumi ditentukan dengan cara yang sama sesuai KKS.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerja sama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- *Joint operating body-production sharing contracts* (“JOB-PSC”) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 3 kesepakatan Kemitraan JOB-PSC PHE dengan wilayah kerja di Kalimantan, Sulawesi dan Papua serta masa kontrak selama 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1990 sampai tahun 1998 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2020 sampai tahun 2028 dengan persentase partisipasi berkisar dari 37,5% sampai dengan 50%.

- *Pertamina participating interests* (“PPI”)

Berdasarkan Kesepakatan PPI, PHE mempunyai kepemilikan di dalam kontrak yang serupa dengan kontrak JOB-PSC. Sisa kepemilikan dimiliki oleh kontraktor yang bertindak sebagai operator. Kewajiban pembiayaan bagian PHE dapat dilakukan secara langsung oleh PHE. atau dapat pula ditanggung lebih dahulu oleh para kontraktor dan akan dibayar oleh PHE dengan cara dipotongkan dari bagian PHE atas produksi minyak mentah dan gas bumi. ditambah dengan 50% *uplift*. Produksi minyak mentah dan gas bumi dibagi antara PHE dan kontraktor sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Bagian kontraktor atas produksi minyak mentah dan gas bumi ditentukan dengan cara yang sama sesuai KKS.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kesepakatan kemitraan PPI adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KBH	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
Conoco Philips (South Jambi) Ltd. Petrochina International Jambi B Ltd.	Blok B	Jambi Selatan	26/01/1990	26/09/2000	25/01/2020	25%	Minyak dan gas bumi	30 tahun

- *Kepemilikan pada KKS minyak dan gas di luar negeri*

Pada tanggal 31 Desember 2019, PHE memiliki secara langsung maupun secara tidak langsung kepemilikan pada kontrak minyak mentah dan gas bumi di luar negeri sebagai berikut:

Nama KOB	Mitra usaha KOB	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Persentase kepemilikan	Produksi	Periode kontrak
Petronas Carigali Pertamina PetroVietnam Operating Company Sdn. Bhd. (“PCPP”)	Petronas Carigali Sdn. Bhd. Petrovietnam	Blok Offshore Sarawak (SK 305)*	Malaysia	16/06/2003	26/07/2010	30%	Minyak dan gas bumi	29 tahun

*Blok ini merupakan Pengendalian Bersama Operasi (“PBO”)

- *Kontrak unitisasi*

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor KBH diwajibkan untuk melakukan unitisasi apabila terbukti adanya reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya. Menteri ESDM menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan di antara para Kontraktor yang melakukan unitisasi setelah mendapatkan pertimbangan SKK Migas.

Karena beberapa pelampiran *reservoir* entitas anak PHE memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, entitas anak PHE melakukan perikatan Perjanjian Unitisasi dengan beberapa kontraktor.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

d. Kontrak kerja sama PHE dengan pihak-pihak lain (lanjutan)

- Kontrak unitisasi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, terdapat 6 Perjanjian Unitisasi PHE dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, dan Papua serta masa kontrak selama 10-50 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 1985 sampai tahun 2014 dan tahun berakhir perjanjian tersebut dari tahun 2019 sampai tahun 2035.

- Perpanjangan dan terminasi kontrak kerja sama PHE

KBH "B" berakhir pada tanggal 3 Oktober 2018. Pada tanggal 25 September 2018, Pemerintah melalui Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) menunjuk PHE NSB sebagai pengelola Wilayah Kerja "B" selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2018 atau sampai KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok KBH sesuai dengan Wilayah Kerja "B" saat ini. Mengacu kepada Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 116/13/MEM.M/2019 tanggal 1 April 2019 telah dilakukan perpanjangan kontrak sementara kedua selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi terlebih dahulu.

Mengacu kepada Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No. 8394/13/MEM.M/2019, tanggal 2 Oktober 2019, telah dilakukan perpanjangan kontrak sementara ketiga selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi terlebih dahulu. Mengacu kepada Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, No. 512/13/MEM.M/2019, tanggal 15 November 2019, telah dilakukan perpanjangan kontrak sementara keempat selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan KBH baru ditandatangani, mana yang terjadi terlebih dahulu.

KBH Blok Tengah sudah berakhir pada tanggal 4 Oktober 2018. Pemerintah memutuskan tidak memperpanjang pengelolaan Wilayah Kerja Tengah oleh Kontraktor eksisting. Sampai dengan laporan keuangan ini disusun, PHE Tengah K bersama dengan kontraktor lainnya (Total Tengah dan Inpex Tengah Ltd.) masih dalam proses menyelesaikan hak dan kewajiban pasca terminasi dengan Pemerintah.

e. Kontrak kerja sama PEPC dengan pihak-pihak lain

Pada tanggal 17 September 2005 ditandatangani KKS antara SKK Migas dengan PEPC (50% *participating interest*), MCL (25,50% *participating interest*) dan Ampolex (24,50% *participating interest*) (secara bersama-sama disebut Kontraktor) untuk jangka waktu 30 tahun dari tanggal 17 September 2005 sampai dengan tanggal 16 September 2035 dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan pada KBH PEPC sebagai berikut:

Mitra usaha KKS	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
ExxonMobil Cepu Limited Ampolex (Cepu) Pte. Ltd. PT Sarana Patra Hulu Cepu PT Petrogas Jatim Utama Cendana PT Blora Patragas Hulu PT Asri Dharma Sejahtera	Blok Cepu	Jawa Tengah Jawa Timur	17/09/2005	31/08/2009	16/09/2035	45%	Minyak	30 tahun

- Kontrak unitisasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, kontrak unitisasi entitas anak PEPC adalah sebagai berikut:

Mitra usaha	Wilayah kerja	Area	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
PT Pertamina EP	Blok EP Blok Cepu	Jawa Tengah Jawa Timur	17/09/2005	-	16/09/2035	91.9399%	Gas bumi	30 tahun

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

f. Kontrak kerja sama PT Pertamina EP Cepu Alas Dara Kemuning (“PEPC ADK”) dengan SKK Migas

KKS dibuat oleh PEPC ADK dengan Pemerintah melalui SKK Migas pada tanggal 26 Februari 2014 untuk periode 30 tahun sejak tanggal 26 Februari 2014 hingga 25 Februari 2044. Periode tersebut dapat diperpanjang berdasarkan peraturan yang berlaku. Perusahaan memiliki *participating interest* sebesar 100% pada Blok KKS Alas Dara Kemuning.

g. Kontrak kerja sama PHI dengan SKK Migas

- KBH

KBH dibuat oleh kontraktor KBH dengan Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas” - sebelumnya Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/“BP MIGAS”) untuk jangka waktu kontrak antara 20-30 tahun. Periode tersebut dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal 31 Desember 2019, KBH di PHI Group adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KKS	Wilayah Kerja	Wilayah	Efektif Kontrak	Mulai Produksi	Jatuh Tempo Kontrak	Persentase Partisipasi	Produksi	Periode Kontrak
PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam	Blok Mahakam	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Timur	01/01/2018	01/01/2018	31/12/2037	90%	Minyak dan gas bumi	20 tahun

- Kontrak *gross split*

Pada tanggal 31 Desember 2019, kesepakatan kontrak *Gross Split* adalah sebagai berikut:

Mitra usaha KKS	Wilayah Kerja	Wilayah	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Tanggal Jatuh Tempo Kontrak	Persentase Partisipasi	Produksi	Periode Kontrak
Tidak ada	Blok Sanga Sanga	Daratan Kalimantan Timur	08/08/2018	08/08/2018	07/08/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
Tidak ada	Blok East Kalimantan dan Attaka	Daratan dan Lepas Pantai Kalimantan Timur	25/10/2018	25/10/2018	24/10/2038	100%	Minyak dan gas bumi	20 tahun
ENI West Ganal Ltd Neptune Energy West Ganal B.V.	Blok West Ganal	Lepas Pantai Selat Makassar	26/01/2020	-	25/01/2050	30%	Minyak dan gas bumi	30 tahun

- Kontrak unitisasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, Entitas memiliki Perjanjian Unitisasi sebagai berikut:

Para pihak	Operator	Lapangan	Lokasi	Tanggal penanda-tanganan kontrak	Mulai kontrak	Produksi	Akhir kontrak	Periode Kontrak
PHM & Pertamina Hulu Sanga Sanga (“PHSS”)	PHSS	Nilam & Badak	Kalimantan Timur	Sedang dalam penyelesaian	08/08/2018	08/08/2018	31/12/2037	20 tahun
PHM & Pertamina Hulu Kalimantan Timur (“PHKT”)	PHM	Peciko	Kalimantan Timur	Sedang dalam penyelesaian	25/10/2018	25/10/2018	31/12/2037	20 tahun

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

h. Kepemilikan secara langsung dan tidak langsung PIEP pada KKS minyak dan gas di luar negeri

Pada tanggal 31 Desember 2019, PIEP memiliki secara langsung dan tidak langsung kepemilikan pada KKS atau kontrak sejenis minyak dan gas di luar negeri adalah sebagai berikut:

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
Menzel Lejmat North ("MLN")	Talisman (Algeria) B.V.	Blok 405a	Algeria	2000	2003	65%	Minyak	25 tahun
PTTEP HK Offshore Limited	PTTEP HK Offshore Limited Petronas Carigali Sdn. Bhd.	Blok K	Malaysia	27/01/1999	2007	24%	Minyak dan gas bumi	38 tahun
PTTEP HK Offshore Limited	PTTEP HK Offshore Limited Petronas Carigali Sdn. Bhd.	Blok H	Malaysia	19/03/2007	Tahap pengembangan	Rotan 24% Lain-lain 18%	Gas bumi	38 tahun
PTTEP HK Offshore Limited	PTTEP HK Offshore Limited Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK309	Malaysia	27/01/1999	2003	25,5%	Minyak, gas bumi, dan kondensat	29 tahun
PTTEP HK Offshore Limited	PTTEP HK Offshore Limited Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK311	Malaysia	27/01/1999	2007	25,5%	Minyak, gas bumi, dan kondensat	29 tahun
PTTEP HK Offshore Limited	PTTEP HK Offshore Limited Petronas Carigali Sdn. Bhd.	SK314A	Malaysia	07/05/2013	Tahap eksplorasi	25,5%	-	27 tahun
Mnazi Bay Exploration Mnazi Bay Development/ Production	M&P (Operator); Wentworth; TPDC	Mnazi Bay	Tanzania	Oktober 2006	Agustus 2015	60,075% & 48,06%	Gas bumi	2031 dan dapat diperpanjang sampai 2051
Enzanga Production	M&P (Operator); The Gabonese Republic; Tullow	Ezanga	Gabon	01/01/2014	2007	80%	Minyak	2034 dan dapat diperpanjang sampai 2054
Seplat Petroleum Development Company Plc.	Seplat (Operator); NPDC	OML 4, 38, 41	Nigeria	Juni 1989	Juli 2010	45%	Minyak dan gas bumi	Oktober 2038
	Pillar Oil (Operator); Seplat	OPL 283	Nigeria	2009	Mei 2012	40%	Minyak	Oktober 2028
	Seplat dan NNPC (Joint Operators)	OML 53	Nigeria	1997	1978	40%	Minyak	Juni 2027
	Seplat dan Belema Oil (Joint Operators); NNPC	OML 55	Nigeria	1997	Februari 2017	n/a*)	Minyak	Juni 2027
-	Sonangol Pesquisa e Producao (Sonangol P&P) China Sonangol, Eni, Somoil, NIS dan INA	Blok 3/05 Blok 3/05A	Angola	28/09/2005	1980	20%	Minyak	2025
Petroregional del Lago Mixed Company	Petroleos de Venezuela S.A. ("PDVSA"); PDVSA Social	Urdaneta West Field	Venezuela	2006	1974	32%	Minyak	2026

* Berdasarkan risalah rapat komiten manajemen tanggal 15 September 2016. Perusahaan setuju untuk menghentikan kontrak tersebut.

- Mitra kontrak bantuan teknis ("KBT")

Pada tanggal 31 Desember 2019, *participating interest* KBT yang dimiliki PT Pertamina Irak Eksplorasi Produksi ("PIREP") adalah sebagai berikut:

Nama PBO	Mitra Usaha PBO	Wilayah Kerja	Negara	Tanggal Efektif Kontrak	Tanggal Mulai Produksi	Persentase Kepemilikan	Produksi	Periode Kontrak
West Qurna (Phase 1) Oil Field	ExxonMobil Iraq Limited, Itochu Oil Exploration (Iraq) B.V., PetroChina International Iraq FZE, Oil Exploration Group of Iraqi Ministry of Oil (South Oil Group)	Blok West Qurna - 1	Irak	25/01/2010	25/01/2010	10%	Minyak	35 tahun

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

h. Kepemilikan secara langsung dan tidak langsung PIEP pada KKS minyak dan gas di luar negeri (lanjutan)

- Kontrak unitisasi

Pada tanggal 31 Desember 2019, kontrak unitisasi PIEP adalah sebagai berikut:

1. Algeria

Nama PBO	Mitra usaha PBO	Wilayah kerja	Negara	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Persentase kepemilikan	Produksi	Periode kontrak
Ei Merk ("EMK")	Talisman (Algeria) B.V., Sonatrach, Anadarko, Eni, Maersk, PT Pertamina Algeria Eplorasi Produksi ("PAEP").	Blok 405a	Algeria	Maret 2007	2013	16,90%	Minyak, kondensat, dan LPG	25 tahun
Ourhoud	Talisman (Algeria) B.V., Sonatrach, Anadarko, Eni, Maersk, Cepsa, PAEP.	Blok 405a	Algeria	Desember 1997	2002	3,56%	Minyak	25 tahun

2. Malaysia

Mitra usaha	Operator	Unit lapangan	Persentase partisipasi PMEP	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Produksi	Periode kontrak
Shell, Conoco Phillips Sabah Ltd., Petronas Carigali Sdn. Bdn., PTTEP Sabah Oil Limited, PMEP	Sabah Shell Petroleum Company Limited	Gumusut Kakap Field	2,73%	20/09/2004	18/11/2012	Minyak dan gas bumi	Tidak disebutkan
Shell, Conoco Phillips Sabah Ltd., Petronas Carigali Sdn. Bdn., PTTEP Sabah Oil Limited, PMEP	PTTEP Sabah Oil Limited	Siakap North Petai Field	9,6%	01/01/2007	28/02/2014	Minyak dan gas bumi	Tidak disebutkan

i. Kontrak kerja sama PGN

Pada tanggal 31 Desember 2019, PGN memiliki kepemilikan pada operasi bersama maupun kontrak jasa partisipasi dan perjanjian kerja sama ekonomi dengan perusahaan-perusahaan berikut:

Wilayah kerja	Negara	Partisipasi
Blok Ujung Pangkah	Indonesia	100,00%
Blok South Sesulu	Indonesia	100,00%
Blok Fasken	United States of America	36,00%
Blok Bangkanai	Indonesia	30,00%
Blok Bangkanai Barat	Indonesia	30,00%
Blok Muriah	Indonesia	20,00%
Blok Ketapang	Indonesia	20,00%
Blok Muara Bakau	Indonesia	11,67%
Blok Wokam II	Indonesia	100,00%
Blok Pekawai	Indonesia	100,00%
Blok Yamdena Barat	Indonesia	100,00%

j. Kontrak kerja sama PHR

Pada tanggal 31 Desember 2019, kesepakatan kontrak *Gross Split* yang telah ditandatangani sebagai berikut:

Mitra usaha KKS	Wilayah kerja	Wilayah	Tanggal efektif kontrak	Tanggal mulai produksi	Tanggal jatuh tempo kontrak	Persentase partisipasi	Produksi	Periode kontrak
Tidak ada	Blok Rokan	Sumatera Tengah	09/08/2021	09/08/2021	08/08/2041	100%	Minyak	20 tahun

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

42. KESEPAKATAN KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI (lanjutan)

j. Kontrak kerja sama PHR (lanjutan)

Bagi hasil untuk bagian kontraktor adalah sebagai berikut:

Minyak mentah/ gas alam	Baru/lama	Lapangan	Jenis bagian kontraktor	Bagian Pemerintah
Minyak mentah	WK Baru	Seluruh lapangan	57% + Koreksi Komp. Variabel + Koreksi Komp. Progresif	43% + Koreksi Komp. Variabel + Koreksi Komp. Progresif
Minyak mentah	WK Lama	Lapangan Duri	65%	35%
Minyak mentah	WK Lama	Lapangan Non-Duri	61%	39%
Gas alam	WK Baru	Seluruh lapangan	52% + Koreksi Komp Variabel + Koreksi. Komp. Progresif	48% + Koreksi Komp. Variabel + Koreksi Komp. Progresif
Gas alam	WK Lama	Lapangan Duri	70%	30%
Gas alam	WK Lama	Lapangan Non-Duri	66%	34%

43. WILAYAH KERJA PANAS BUMI

Sejak tahun 1974, Pertamina Lama memperoleh wilayah-wilayah kerja panas bumi di Indonesia berdasarkan surat-surat keputusan dari Menteri Pertambangan dan Energi. Sesuai dengan PP No. 31 Tahun 2003, segala hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dan perikatan antara Pertamina Lama dengan pihak ketiga, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2001, beralih kepada Perusahaan sejak tanggal 17 September 2003. Perusahaan melalui surat No. 282/C00000/2007-S0 tertanggal 12 Maret 2007 menyerahkan wilayah kerja panas bumi kepada PGE sejak tanggal 1 Januari 2007. Pengalihan hak, kewajiban dan kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan pengusahaan panas bumi Perusahaan ke PGE telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM melalui Surat No. 2198/30/DJB/2009 tanggal 4 Agustus 2009 dan No. 2523/30/DJB/2009 tanggal 1 September 2009.

Efektif sejak tanggal 28 Juni 2010, aset panas bumi Perusahaan telah dialihkan kepada PGE, sebagai tambahan setoran modal Perusahaan kepada PGE. Pengalihan aset panas bumi Perusahaan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris No. 23 tanggal 28 Juni 2010 oleh Lenny Janis Ishak, S.H.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 2067 K/30/MEM/2012 tentang penegasan wilayah kuasa dan perubahan batas-batas koordinat pengusahaan sumber daya panas bumi PGE memiliki hak pengelolaan atas 14 wilayah kerja panas bumi. Mengacu ketentuan asal 78 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, pada akhir tahun 2014 mengembalikan 2 (dua) wilayah kerja panas bumi yaitu Kotamobagu dan Gunung Iyang Argopuro ke Pemerintah karena dua wilayah kerja panas bumi tersebut sampai 31 Desember 2014 statusnya masih belum tahap Eksploitasi. Selanjutnya, Perusahaan mendapatkan tambahan dua (2) wilayah kerja panas bumi baru yaitu Gunung Lawu (berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No. 35.K/30/MEM/2016) dan Seulawah (berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang dari Gubernur Aceh No. 541/53157 tanggal 1 November 2013). PGE akan melakukan kegiatan eksplorasi di kedua wilayah kerja panas bumi baru tersebut.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

43. WILAYAH KERJA PANAS BUMI (lanjutan)

Operasional wilayah kerja panas bumi di atas dilaksanakan melalui operasi sendiri dan kontrak kerja sama operasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, wilayah kerja panas bumi PGE adalah sebagai berikut:

a. Operasi sendiri

Berikut informasi wilayah kerja yang dikelola sendiri oleh PGE:

Wilayah Kerja	Lokasi	Status Lapangan
Gunung Sibayak-Gunung Sinabung	Sibayak, Sumatera Utara	Produksi
Kamojang-Darajat	Kamojang, Jawa Barat	Produksi
Lahendong	Lahendong, Sulawesi Utara	Produksi
Gunung Way Panas	Ulubelu, Lampung	Produksi
Karahah-Cakrabuana	Karahah, Jawa Barat	Produksi
Lumut Balai dan Marga Bayur	Lumut Balai, Sumatera Selatan	Pengembangan
Hululais	Hululais, Bengkulu	Pengembangan
Sungai Penuh	Sungai Penuh, Jambi	Eksplorasi
Gunung Lawu	Jawa Tengah	Eksplorasi
Seulawah Agam	Aceh	Eksplorasi

b. Kontrak operasi bersama (“KOB”)

KOB meliputi kegiatan panas bumi di wilayah kerja PGE, yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Berdasarkan KOB, PGE berhak mendapatkan *production allowances* dari kontraktor KOB yang besarnya 2,66% untuk KOB Darajat dan 4% untuk KOB Salak, Wayang Windu, Sarulla, dan Bedugul, dari laba operasi neto tahunan kontraktor KOB yang dihitung berdasarkan KOB.

Pada tanggal 31 Desember 2019, KOB PGE adalah sebagai berikut:

Wilayah Kerja	Lokasi	Status Lapangan	Kontraktor
Cibeureum-Parabakti	Salak, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Salak Ltd. dan Star Energy Geothermal Salak Pratama Ltd.
Kamojang-Darajat	Darajat, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.
Pangalengan	Wayang Windu, Jawa Barat	Produksi	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd.
Gunung Sibualbuali	Sarulla, Sumatera Utara	Produksi	Sarulla Operation Ltd.
Tabanan	Bedugul, Bali	Eksplorasi	Bali Energy Ltd.

Pendapatan PGE dari kegiatan panas bumi dikenakan pajak (bagian pemerintah) sebesar 34% untuk Wilayah Kerja yang dikelola sebelum UU No. 21 tahun 2014 tentang Panas Bumi Diterbitkan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

44. AUDIT PEMERINTAH

PT Pertamina EP, PT Pertamina EP Cepu, dan entitas anak PT Pertamina Hulu Energi

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam KKS menjadi subjek interpretasi oleh SKK Migas dan Pemerintah. Setiap tahun, pembukuan secara akuntansi dan informasi keuangan dari KKS menjadi objek audit oleh SKK Migas dan/atau Pemerintah. Klaim-klaim yang timbul dari audit tersebut akan disetujui oleh operator KKS dan dicatat dalam pembukuan secara akuntansi oleh KKS atau didiskusikan lebih lanjut dengan SKK Migas dan/atau Pemerintah. Penyelesaian atas klaim-klaim yang didiskusikan tersebut memerlukan proses negosiasi yang cukup lama.

Manajemen berpendapat bahwa hasil audit atas KKS PT Pertamina EP dan KKS dimana PT Pertamina EP Cepu dan entitas anak PT Pertamina Hulu Energi memiliki hak partisipasi tidak akan memiliki dampak material terhadap posisi keuangan dan arus kas Grup.

45. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Penambahan (penurunan) aset sewa pembiayaan dalam aset tetap (Catatan 12)	(24.181)	19.828
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset tetap (Catatan 12)	18.964	31.500
Kapitalisasi biaya pinjaman ke aset minyak dan gas serta panas bumi (Catatan 13)	25.452	24.885
Penambahan aset minyak dan gas yang berasal dari provisi untuk pembongkaran dan restorasi (Catatan 22)	86.640	87.035

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

	<u>31 Des 2018</u>	<u>Arus kas</u>	<u>Perubahan non-kas</u>			<u>31 Des 2019</u>
			<u>Pembagian dividen</u>	<u>Pergerakan valas</u>	<u>Lainnya</u>	
Pinjaman jangka pendek	4.347.035	(3.107.812)	-	30.829	-	1.270.052
Utang dividen	-	(563.106)	552.659	10.447	-	-
Liabilitas jangka panjang	2.225.877	(129.819)	-	9.120	14.960	2.120.138
Obligasi	11.094.096	1.498.855	-	-	21.542	12.614.493
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	17.667.008	(2.301.882)	552.659	50.396	36.502	16.004.683

	<u>31 Des 2017</u>	<u>Arus kas</u>	<u>Perubahan non-kas</u>			<u>31 Des 2018</u>
			<u>Pembagian dividen</u>	<u>Pergerakan valas</u>	<u>Lainnya</u>	
Pinjaman jangka pendek	452.879	3.905.941	-	(11.785)	-	4.347.035
Utang dividen	-	(585.755)	614.939	(29.184)	-	-
Liabilitas jangka panjang	2.475.726	(209.420)	-	(46.045)	5.616	2.225.877
Obligasi	10.385.873	696.758	-	-	11.465	11.094.096
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	13.314.478	3.807.524	614.939	(87.014)	17.081	17.667.008

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

a. Kategori instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar

Berikut ini kategori aset dan liabilitas keuangan dari Grup:

	Aset Keuangan				
	Nilai wajar diakui melalui laporan	Tersedia untuk dijual	Pinjaman dan piutang	Dimiliki hingga jatuh tempo	Jumlah
31 Desember 2019					
Kas dan setara kas	-	-	6.756.252	-	6.756.252
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	182.129	-	182.129
Investasi jangka pendek	20.955	364.634	6.995	-	392.584
Piutang usaha	-	-	3.446.152	-	3.446.152
Piutang Pemerintah	-	-	6.689.595	-	6.689.595
Piutang lain-lain	-	-	1.139.419	-	1.139.419
Investasi lainnya, neto	-	85.834	-	-	85.834
Penyertaan jangka panjang	-	139.822	1.540	467.185	608.547
Aset tidak lancar lainnya	-	-	1.569.940	-	1.569.940
Jumlah aset keuangan	20.955	590.290	19.792.022	467.185	20.870.452
	Aset Keuangan				
	Nilai wajar diakui melalui laporan	Tersedia untuk dijual	Pinjaman dan piutang	Dimiliki hingga jatuh tempo	Jumlah
31 Desember 2018					
Kas dan setara kas	-	-	9.112.312	-	9.112.312
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-	108.915	-	108.915
Investasi jangka pendek	20.534	202.195	2.470	-	225.199
Piutang usaha	-	-	3.231.106	-	3.231.106
Piutang Pemerintah	-	-	4.758.409	-	4.758.409
Piutang lain-lain	-	-	883.490	-	883.490
Investasi lainnya, neto	-	80.171	-	-	80.171
Penyertaan jangka panjang	-	15.991	1.530	532.370	549.891
Aset tidak lancar lainnya	-	-	1.149.976	-	1.149.976
Jumlah aset keuangan	20.534	298.357	19.248.208	532.370	20.099.469
	Liabilitas keuangan lainnya				
	31 Desember 2019	31 Desember 2018			
Pinjaman jangka pendek	(1.270.052)	(4.347.035)			
Utang usaha	(4.643.337)	(3.676.558)			
Utang Pemerintah	(1.736.442)	(2.002.825)			
Beban akrual	(2.552.437)	(1.902.515)			
Liabilitas jangka panjang	(2.120.138)	(2.225.877)			
Utang lain-lain	(660.999)	(407.196)			
Utang obligasi	(12.614.493)	(11.094.096)			
Utang jangka panjang lain-lain	(477.877)	(149.428)			
Jumlah liabilitas keuangan	(26.075.775)	(25.805.530)			

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

46. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

a. Kategori instrumen keuangan dan pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Perusahaan

Perusahaan mengadakan perjanjian valuta asing dan derivatif dengan BNI, Bank Mandiri dan BRI untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko nilai tukar. Jumlah nilai nosional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah US\$210.000 dan US\$570.000.

Nilai wajar dari kewajiban keuangan diestimasi menggunakan teknik penilaian yang memadai dengan input yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati.

Perusahaan melakukan lindung nilai atas perubahan nilai wajar liabilitasnya karena risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing antara Rupiah dan Dolar AS. Perubahan bersih dalam nilai wajar instrumen derivatif di atas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah US\$1.932 dan US\$3.044.

Entitas anak

PGN menandatangani kontrak swap mata uang dengan ABN AMRO Bank N.V. Kontrak ini berakhir pada 31 Desember 2019. Jumlah nilai nosional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah ¥19,420,211,744 (nilai penuh) atau setara dengan US\$159.837.

Nilai wajar dari kewajiban keuangan diestimasi menggunakan teknik penilaian yang memadai dengan input yang tidak berdasarkan data pasar yang dapat diamati.

PGN melakukan lindung nilai atas perubahan nilai wajar liabilitasnya karena risiko fluktuasi nilai tukar mata uang Yen Jepang dan Dolar AS. Perubahan bersih dalam nilai wajar instrumen derivatif di atas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah US\$45 dan US\$4.596.

Transaksi ini tidak memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

b. Saling hapus aset dan liabilitas keuangan

Instrumen keuangan di bawah ini bergantung pada saling hapus. pengaturan induk penyelesaian secara neto dan perjanjian serupa:

	Jumlah bruto aset keuangan diakui	Jumlah bruto aset keuangan diakui saling hapus dalam keuangan	Jumlah neto aset keuangan disajikan dalam posisi keuangan	Terkait jumlah tidak saling hapus dalam laporan posisi keuangan		Jumlah neto
				Instrumen keuangan	Agunan kas yang diterima	
31 Desember 2019						
Aset Keuangan						
- Piutang usaha	3.595.260	(149.108)	3.446.152	-	-	3.446.152
Liabilitas Keuangan						
- Utang usaha	4.792.445	(149.108)	4.643.337	-	-	4.643.337
31 Desember 2018						
Aset Keuangan						
- Piutang usaha	3.327.292	(96.186)	3.231.106	-	-	3.231.106
Liabilitas Keuangan						
- Utang usaha	3.772.744	(96.186)	3.676.558	-	-	3.676.558

Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa, setiap perjanjian antara Grup dan pihak lawan memperbolehkan melakukan saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan yang relevan ketika keduanya memilih untuk menyelesaikannya secara neto. Dengan tidak adanya pemilihan tersebut, aset dan kewajiban keuangan akan diselesaikan secara *gross*, namun masing-masing pihak dengan pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa memiliki pilihan untuk menyelesaikan semua jumlah tersebut secara neto ketika terjadi wanprestasi dari pihak lain.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Grup memiliki beragam kegiatan usaha, sehingga memiliki potensi berbagai risiko. Program manajemen risiko yang dimiliki Grup ditujukan untuk meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja Grup.

Manajemen risiko dijalankan oleh Direksi Grup khususnya melalui Komite Manajemen Risiko (Komite *Risk Management Unit* dan *Risk Taking Unit* untuk melakukan identifikasi, penilaian, mitigasi dan memonitor risiko-risiko Grup. Komite Manajemen Risiko menetapkan prinsip manajemen risiko secara keseluruhan meliputi risiko usaha dan risiko keuangan.

a. Risiko usaha

Aktivitas bisnis Grup dipengaruhi berbagai risiko usaha (hulu dan hilir) misalnya sebagai berikut:

- i. Grup berada di bawah kendali Pemerintah dan tidak ada jaminan bahwa Pemerintah akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik Grup. Grup juga memperoleh keuntungan tertentu dengan status sebagai BUMN dan Grup tidak dapat menjamin bahwa setiap atau semua keuntungan tersebut akan terus berlanjut.
- ii. Grup diaudit oleh SKK Migas, BPK, DJP dan/atau Pemerintah. Hasil audit dapat mengakibatkan klaim terhadap Grup atau berkurangnya klaim yang telah diakui Grup kepada Pemerintah.
- iii. Grup tergantung pada mitra usaha patungan dan kontraktor independen pihak ketiga sehubungan dengan operasi eksplorasi dan produksi serta untuk melaksanakan program pengembangan Grup.
- iv. Perkiraan cadangan minyak mentah, gas alam dan panas bumi milik Grup tidak pasti dan mungkin terbukti tidak akurat dari waktu ke waktu atau mungkin tidak dapat secara akurat mencerminkan tingkat cadangan yang sebenarnya atau bahkan jika akurat, keterbatasan teknis dapat mencegah Grup untuk mendapatkan kembali cadangan ini.
- v. Grup tergantung kepada kemampuan manajemen untuk mengembangkan cadangan yang ada mengganti cadangan yang ada dan mengembangkan cadangan tambahan.
- vi. Sejumlah besar pendapatan Grup berasal dari penjualan jenis BBM tertentu yang disubsidi Pemerintah.

b. Risiko keuangan

Risiko keuangan meliputi risiko pasar, kredit dan likuiditas.

i. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar arus kas di masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena adanya perubahan harga pasar.

Faktor-faktor risiko pasar tersebut adalah:

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Pendapatan Grup ditentukan berdasarkan pergerakan *Mean of Platts Singapore* ("MOPS") yang akan dibayarkan secara terpisah baik oleh masyarakat dan Pemerintah Indonesia dalam bentuk subsidi produk BBM dan LPG.

Adanya peraturan di Indonesia yang mengharuskan transaksi dalam mata uang Rupiah sementara sebagian besar biaya operasi khususnya untuk pengadaan minyak mentah dan produk minyak dilakukan dalam mata uang Dolar AS, dapat menyebabkan risiko nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas, piutang usaha, piutang Pemerintah, utang usaha, pinjaman jangka pendek, utang Pemerintah dan liabilitas jangka panjang.

Grup memitigasi risiko nilai tukar mata uang asing secara alami melalui pengelolaan arus kas secara efektif.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko pasar (lanjutan)

Analisis sensitivitas

Penguatan (pelemahan) Rupiah terhadap Dolar AS akan meningkatkan (menurunkan) ekuitas dan laba rugi sebesar jumlah yang ditunjukkan di bawah. Analisis ini didasarkan pada varian nilai tukar mata uang asing yang dipertimbangkan mungkin terjadi pada tanggal pelaporan. Analisis mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, pada khususnya tingkat suku bunga, tetap tidak berubah dan mengabaikan dampak atas perkiraan penjualan dan pembelian.

	Penguatan		Pelemahan	
	Ekuitas	Laba rugi	Ekuitas	Laba rugi
31 Desember 2019				
IDR (pergerakan 1%)	109.859	108.001	(107.684)	(105.863)
31 Desember 2018				
IDR (pergerakan 3%)	364.017	358.908	(342.813)	(338.001)

(ii) Risiko harga komoditas

Volatilitas harga minyak mentah, gas alam dan produk kilang serta ketidakpastian pasar untuk minyak mentah dan gas dapat berdampak buruk terhadap usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Grup.

Kemampuan Grup dalam menghasilkan laba dipengaruhi signifikan oleh harga dan permintaan minyak mentah, gas dan produk kilang, perbedaan antara harga perolehan minyak mentah, biaya eksplorasi, pengembangan, produksi, distribusi dan penjualan minyak mentah, gas dan produk minyak. Pasar internasional dan domestik untuk minyak mentah dan produk kilang berfluktuasi, yang ditandai dari fluktuasi harga belum lama ini. Fluktuasi harga pasar minyak mentah, gas dan produk kilang tergantung dari berbagai faktor diluar kendali Grup.

Grup ikut serta dalam kontrak komoditas fisik sebagai bagian kegiatan usaha normal. Kontrak ini bukan merupakan derivatif dan diukur pada harga perolehan. Dalam hal ini, Grup tidak terekspos risiko harga komoditas karena harga ditentukan pada saat tanggal pembelian.

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar

Grup memiliki eksposur risiko suku bunga arus kas dan nilai wajar suku bunga yang disebabkan oleh posisi aset dan liabilitas keuangan, terutama untuk menjaga arus kas agar dapat memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal.

Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang mengekspos Grup terhadap risiko suku bunga arus kas. Aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Grup menyelenggarakan pendanaan secara terpusat dan memonitor pergerakan tingkat LIBOR, SIBOR, Jakarta Interbank Offered Rate ("JIBOR") dan suku bunga pinjaman lain yang berlaku di pasar dan melakukan negosiasi untuk mendapatkan tingkat suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan penempatan dana atau melakukan negosiasi tingkat bunga kepada pemberi pinjaman apabila tingkat suku bunga pinjaman menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di pasar.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (LANJUTAN)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar (lanjutan)

Grup dapat menggunakan fasilitas pinjaman dari bank pemerintah seperti BNI, BRI, Bank Mandiri serta bank swasta asing.

Pada saat tanggal pelaporan, aset dan liabilitas keuangan dengan tingkat suku bunga mengambang, suku bunga tetap dan non-bunga adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019					
	Suka bunga mengambang		Suku bunga tetap		Non-bunga	Jumlah
	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun		
Aset						
Kas dan setara kas	4.189.729	-	2.560.780	-	5.743	6.756.252
Kas yang dibatasi penggunaannya	163.318	-	18.811	-	-	182.129
Investasi jangka pendek	-	-	167.875	-	224.709	392.584
Piutang usaha	-	-	-	-	3.446.152	3.446.152
Piutang Pemerintah	-	-	-	3.313.801	3.375.794	6.689.595
Piutang lain-lain	-	-	-	-	1.139.419	1.139.419
Investasi lainnya	-	-	-	-	85.834	85.834
Penyertaan jangka panjang	-	352.551	-	109.205	146.791	608.547
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	-	1.569.940	1.569.940
Jumlah aset keuangan	4.353.047	352.551	2.747.466	3.423.006	9.994.382	20.870.452
Liabilitas						
Pinjaman jangka pendek	(1.270.052)	-	-	-	-	(1.270.052)
Utang usaha	-	-	-	-	(4.643.337)	(4.643.337)
Utang Pemerintah	-	-	(26.363)	(796.029)	(914.050)	(1.736.442)
Beban akrual	-	-	-	-	(2.552.437)	(2.552.437)
Utang lain-lain	-	-	-	-	(660.999)	(660.999)
Liabilitas jangka panjang	(529.202)	(1.418.944)	(44.524)	(127.468)	-	(2.120.138)
Utang obligasi	-	-	-	(12.614.493)	-	(12.614.493)
Utang jangka panjang lain-lain	-	(30.564)	-	-	(447.313)	(477.877)
Jumlah liabilitas keuangan	(1.799.254)	(1.449.508)	(70.887)	(13.537.990)	(9.218.136)	(26.075.775)

	31 Desember 2018					
	Suka bunga mengambang		Suku bunga tetap		Non-bunga	Jumlah
	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun	Jatuh tempo kurang dari satu tahun	Jatuh tempo lebih dari satu tahun		
Aset						
Kas dan setara kas	5.045.495	-	4.062.697	-	4.120	9.112.312
Kas yang dibatasi penggunaannya	21.344	-	87.571	-	-	108.915
Investasi jangka pendek	677	-	132.430	-	92.092	225.199
Piutang usaha	-	-	-	-	3.231.106	3.231.106
Piutang Pemerintah	-	-	-	-	4.758.409	4.758.409
Piutang lain-lain	-	-	-	-	883.490	883.490
Investasi lainnya	-	-	-	-	80.171	80.171
Penyertaan jangka panjang	-	391.307	-	14.989	143.595	549.891
Aset tidak lancar lainnya	-	-	-	-	1.149.976	1.149.976
Jumlah aset keuangan	5.067.516	391.307	4.282.698	14.989	10.342.959	20.099.469
Liabilitas						
Pinjaman jangka pendek	(4.347.035)	-	-	-	-	(4.347.035)
Utang usaha	-	-	-	-	(3.676.558)	(3.676.558)
Utang Pemerintah	-	-	(25.247)	(795.082)	(1.182.496)	(2.002.825)
Beban akrual	-	-	-	-	(1.902.515)	(1.902.515)
Liabilitas jangka panjang	(361.855)	(1.703.996)	(58.722)	(101.304)	-	(2.225.877)
Utang lain-lain	-	-	-	-	(407.196)	(407.196)
Utang obligasi	-	-	-	(11.094.096)	-	(11.094.096)
Utang jangka panjang lain-lain	-	-	-	-	(149.428)	(149.428)
Jumlah liabilitas keuangan	(4.708.890)	(1.703.996)	(83.969)	(11.990.482)	(7.318.193)	(25.805.530)

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

i. Risiko Pasar (lanjutan)

(iii) Risiko tingkat suku bunga arus kas dan nilai wajar (lanjutan)

Perubahan 40 basis poin atas tingkat suku bunga mengambang pada tanggal pelaporan akan berpengaruh terhadap laba sebelum pajak sebesar jumlah di bawah. Analisis ini mengasumsikan bahwa seluruh variabel lain, terutama nilai tukar mata uang asing, tidak berubah.

Dampak terhadap:	+40 bp meningkat	-40 bp menurun
Laba sebelum pajak	5.949	(5.949)
Sensitivitas arus kas neto	5.949	(5.949)

ii. Risiko kredit

Grup memiliki risiko kredit signifikan yang berasal dari piutang yang belum dibayar, kas dan setara kas, serta investasi pada efek utang. Pada sebagian besar transaksinya, Grup menggunakan bank dan lembaga keuangan yang secara independen dinilai dengan peringkat AAA, AA+, AA, AA-, A+, A dan A-.

Untuk penjualan non-tunai, Grup menerapkan sistem tata kerja yang mengatur mekanisme persetujuan kredit. Dalam praktik tersebut, beberapa penjualan kredit Grup telah disertai dengan agunan/jaminan bank. Untuk penjualan kredit lainnya tanpa jaminan, Grup memastikan dilakukannya evaluasi *credit scoring*, evaluasi batasan kredit dan persetujuan kredit sebelum melakukan penjualan ke pelanggan.

Grup mempunyai *Credit Management System* untuk memonitor penggunaan batasan kredit dan pemblokiran otomatis untuk tagihan yang melewati tanggal jatuh tempo mulai dari tujuh hari. Grup mengenakan sanksi keterlambatan pembayaran dalam sebagian kontrak penjualan yang didasarkan pada hasil evaluasi kredit masing-masing pelanggan.

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai

Kualitas kredit dari aset keuangan Grup yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai, dianalisis dengan mengacu pada peringkat kredit yang dikeluarkan oleh pemeringkat eksternal PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atau mengacu pada informasi historis tingkat risiko gagal bayar debitur. Rincian kualitas aset keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas dan setara kas		
Diperingkat		
Peringkat AAA	5.259.231	7.285.583
Peringkat AA+	949.988	1.139.349
Peringkat AA	86.871	50.028
Peringkat AA-	147	3.528
Peringkat A+	-	1.381
Peringkat A	5.107	20.380
Peringkat A-	27.794	21.472
Tidak diperingkat	427.114	590.591
Jumlah	6.756.252	9.112.312

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas yang dibatasi penggunaannya		
Diperingkat		
Peringkat AAA	145.845	104.230
Peringkat A-	462	462
Tidak diperingkat	35.822	4.223
Jumlah	182.129	108.915
Investasi jangka pendek		
Diperingkat		
Peringkat AAA	70.181	25.332
Peringkat AA+	7.981	1.027
Peringkat AA	3.635	4.109
Peringkat AA-	2.904	3.129
Peringkat A+	3.561	-
Peringkat A	5.904	5.357
Peringkat A-	2.516	2.330
Peringkat BBB	-	3.887
Peringkat BBB-	-	41.948
Tidak diperingkat	295.902	138.080
Jumlah	392.584	225.199
Penyertaan jangka panjang		
Diperingkat		
Peringkat AAA	560	2.597
Peringkat AA	6.125	5.897
Peringkat BBB-	4.950	4.950
Tidak diperingkat	755	552
Jumlah	12.390	13.996
Piutang usaha		
Pihak ketiga		
> US\$10.000 - dengan riwayat kredit baik	1.166.011	1.335.703
< US\$10.000	751	362
Pihak-pihak berelasi	526.000	675.922
Jumlah	1.692.762	2.011.987

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga		
> US\$10.000 - dengan riwayat kredit baik	860.190	661.979
< US\$10.000	51	31
Pihak-pihak berelasi	178.822	148.777
Jumlah	<u>1.039.063</u>	<u>810.787</u>
Aset lain-lain		
Pihak-pihak ketiga	185.505	80.287
Pihak-pihak berelasi	53.825	54.228
Jumlah	<u>239.330</u>	<u>134.515</u>

Aset keuangan yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang usaha		
- Kurang dari 3 bulan	603.148	431.868
- 3 - 6 bulan	10.008	61.194
- 6 -12 bulan	24.980	21.138
- 12 - 24 bulan	1.859	11.040
- > 24 bulan	15.459	11.561
Jumlah	<u>655.454</u>	<u>536.801</u>
Piutang lain-lain		
Pihak ketiga		
- Kurang dari 3 bulan	52.298	42.912
- 3 - 6 bulan	1.597	1.699
- 6 -12 bulan	1.367	872
- 12 - 24 bulan	3.331	10.674
- > 24 bulan	3.646	5.476
Sub jumlah	<u>62.239</u>	<u>61.633</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang sudah lewat jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi		
- Kurang dari 3 bulan	70	9
- 3 - 6 bulan	98	7
- 6 -12 bulan	3.344	49
- 12 - 24 bulan	71	15
- > 24 bulan	67	24
	<u>3.650</u>	<u>104</u>
Jumlah	<u>65.889</u>	<u>61.737</u>
Aset lain-lain		
Pihak-pihak berelasi	10.732	10.679
Jumlah	<u>10.732</u>	<u>10.679</u>

Piutang usaha

Piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi yang sudah jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal pelaporan terkait dengan pelanggan yang tidak memiliki sejarah gagal bayar dalam dua tahun terakhir. Beberapa piutang usaha dari pelanggan tersebut juga telah disertai dengan agunan/jaminan bank.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang usaha		
- Lancar	567.379	453.510
- Kurang dari 3 bulan	199.305	182.954
- 3 - 6 bulan	44.900	70.803
- 6 -12 bulan	18.612	10.541
- 12 - 24 bulan	369.859	45.159
- > 24 bulan	181.458	180.082
	<u>1.381.513</u>	<u>943.049</u>
Penurunan nilai	(283.577)	(260.731)
Jumlah	<u>1.097.936</u>	<u>682.318</u>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (lanjutan)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Piutang lain-lain		
Pihak-pihak berelasi		
- Kurang dari 3 bulan	28	-
- 3 - 6 bulan	-	-
- 6 - 12 bulan	3	297
- 12 - 24 bulan	2	-
- > 24 bulan	1.437	1.426
	<u>1.470</u>	<u>1.723</u>
Pihak ketiga		
- Kurang dari 3 bulan	35.441	6.169
- 3 - 6 bulan	207	673
- 6 -12 bulan	507	975
- 12 - 24 bulan	562	8.362
- > 24 bulan	18.186	12.631
	<u>54.903</u>	<u>28.810</u>
	56.373	30.533
Penurunan nilai	(21.906)	(19.567)
Jumlah	<u>34.467</u>	<u>10.966</u>
Aset lain-lain		
Pihak-pihak berelasi		
- > 24 bulan	18.919	18.190
Pihak ketiga		
- 0 - 12 bulan	1.383	9.165
- 12 - 24 bulan	-	-
	<u>20.302</u>	<u>27.355</u>
Penurunan nilai	(20.302)	(27.355)
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

Piutang usaha

Piutang usaha dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar US\$3.446.152 (2018: US\$3.231.106) telah diturunkan nilainya sebesar US\$283.577 (2018: US\$260.731), dengan saldo piutang usaha terbesar dari institusi Pemerintah yaitu TNI/Kemhan sebesar US\$432.781 (2018: US\$318.142) (Catatan 40a).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

ii. Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (lanjutan)

Piutang lain-lain

Piutang lain-lain dari pihak ketiga dan pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar US\$1.139.419 dan US\$883.490 telah diturunkan nilainya masing-masing sebesar US\$21.906 dan US\$19.567.

(ii) Pemerintah

Aset keuangan yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Perusahaan:		
Piutang atas pengakuan pendapatan		
Selisih Harga	5.451.285	2.924.148
Piutang atas penggantian biaya subsidi JBT	490.256	175.556
Piutang atas penggantian biaya		
subsidi LPG tabung 3 kg	310.924	1.147.538
Piutang imbalan jasa pemasaran	72.489	72.489
Piutang atas penggantian biaya subsidi		
minyak tanah	17.529	16.828
Konversi minyak tanah	839	10.626
	<hr/>	<hr/>
Sub jumlah	6.343.322	4.347.185
	<hr/>	<hr/>
Entitas anak:		
PEP		
- DMO fees	99.370	106.398
- Underlifting	32.040	18.942
PHE		
- DMO fees	22.684	15.414
- Underlifting	27.261	25.730
PEPC		
- Underlifting	202.563	224.904
PHI		
- DMO fees	32.314	18.780
- Underlifting	2.530	1.056
	<hr/>	<hr/>
Sub jumlah	418.762	411.224
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	6.762.084	4.758.409
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Penyisihan penurunan nilai piutang		
imbalan jasa pemasaran	(72.489)	-
	<hr/>	<hr/>
Jumlah (Catatan 40)	6.689.595	4.758.409
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko keuangan (lanjutan)

iii. Risiko Likuiditas

Tingkat likuiditas yang diperlukan Grup untuk kegiatan operasi tidak pasti dan hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap operasi Grup apabila Grup tidak mempunyai modal kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kas dan operasi. Hal ini dapat terjadi antara lain karena keterlambatan pembayaran subsidi dari Pemerintah.

Grup menggunakan kas dalam jumlah yang cukup signifikan operasinya, terutama untuk pengadaan komoditas dan bahan baku. Salah satu biaya operasi utama adalah pembelian bahan untuk pengolahan di kilang. Fluktuasi harga minyak mentah, gas bumi dan produk turunannya dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing menyebabkan ketidakpastian jumlah modal kerja dan biaya untuk kegiatan hulu dan hilir dari Grup.

Grup mendanai kegiatan operasinya terutama melalui arus kas dari kegiatan operasi, dimana bagian yang signifikan terdiri dari penjualan, pembayaran subsidi, fasilitas modal kerja jangka pendek (termasuk cerukan bank, L/C dan revolving credit) dan pinjaman bank jangka panjang. Sesuai dengan penugasan PSO, Grup harus menyampaikan klaim subsidi kepada Pemerintah setiap akhir bulan untuk bahan bakar minyak subsidi yang didistribusikan selama bulan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Grup memiliki saldo kas dan setara kas masing-masing sebesar US\$6.756.252 dan US\$9.112.312 (Catatan 5). Grup mengelola risiko likuiditas dengan melakukan monitor terhadap estimasi dan realisasi arus kas dan menyesuaikan jatuh tempo antara piutang usaha dan utang usaha.

Tabel di bawah ini merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

	Kurang dari 1 tahun	Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Jumlah
31 Desember 2019				
Liabilitas keuangan				
Pinjaman jangka pendek	1.270.052	-	-	1.270.052
Utang usaha	4.643.337	-	-	4.643.337
Utang Pemerintah	954.232	494.789	441.609	1.890.630
Beban akrual	2.552.437	-	-	2.552.437
Liabilitas jangka panjang	467.038	1.295.942	429.483	2.192.463
Utang lain-lain	1.177.821	-	-	1.177.821
Utang obligasi	577.034	7.652.617	14.262.633	22.492.284
Utang jangka panjang lain-lain	-	111.160	39.600	150.760
Jumlah	11.641.951	9.554.508	15.173.325	36.369.784
31 Desember 2018				
Liabilitas keuangan				
Pinjaman jangka pendek	4.347.035	-	-	4.347.035
Utang usaha	3.676.558	-	-	3.676.558
Utang Pemerintah	1.211.056	262.428	531.845	2.005.329
Beban akrual	1.902.515	-	-	1.902.515
Liabilitas jangka panjang	456.506	1.530.224	343.001	2.329.731
Utang lain-lain	1.257.437	-	-	1.257.437
Utang obligasi	611.409	5.886.768	14.088.112	20.586.289
Utang jangka panjang lain-lain	-	120.591	58.314	178.905
Jumlah	13.462.516	7.800.011	15.021.272	36.283.799

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

47. KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Manajemen Permodalan

Kebijakan direksi adalah mempertahankan basis modal yang kuat untuk menjaga keyakinan investor, kreditur dan pasar dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Modal terdiri dari modal saham biasa, laba ditahan, kepentingan non-pengendali dan komponen ekuitas lainnya. Direksi memastikan tingkat pengembalian modal dan tingkat dividen yang dibagikan.

Grup sebagai entitas yang bergerak dalam bisnis minyak dan gas bumi memonitor permodalan berdasarkan rasio jumlah utang terhadap modal. Utang neto dihitung dari jumlah pinjaman termasuk jangka pendek dan jangka panjang yang mempunyai bunga, sedangkan modal dihitung dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban bunga rata-rata tertimbang atas pinjaman dengan bunga (kecuali liabilitas dengan *imputed interest*) untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar 5,28% dan 5,17%.

Rasio utang terhadap modal milik Grup yang disesuaikan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Jumlah liabilitas (berbunga)	16.857.639	18.487.337
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	28.780.995	27.598.721
Rasio utang terhadap ekuitas	58,57%	66,99%
Rasio jumlah modal sendiri terhadap jumlah aset*	40,66%	40,31%
Rasio tingkat pengembalian modal*	12,84%	13,21%

* Sesuai dengan definisi yang diatur dalam KEP-100/MBU/2002

d. Nilai wajar

Berikut aset keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada 31 Desember 2019:

	<u>Tingkat 1</u>	<u>Tingkat 2</u>	<u>Tingkat 3</u>	<u>Jumlah</u>
Aset keuangan				
Investasi jangka pendek	323.537	62.597	6.450	392.584
Investasi lainnya, neto	-	-	85.834	85.834
Jumlah	323.537	62.597	92.284	478.418

Pada tanggal 31 Desember 2019, tidak terdapat pengalihan antara pengukuran nilai wajar level 1, level 2 dan level 3.

Berikut nilai tercatat dan nilai wajar dari liabilitas keuangan jangka panjang pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	<u>Jumlah tercatat</u>		<u>Nilai wajar</u>	
	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Liabilitas jangka panjang (Catatan 19)	2.120.138	2.225.877	2.162.222	2.329.464
Utang obligasi (Catatan 20)	12.614.493	11.094.096	14.232.462	11.101.427
Jumlah aset keuangan	14.734.631	13.319.973	16.394.684	13.430.891

Nilai wajar dari liabilitas jangka panjang dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga yang dikenakan pada masing-masing liabilitas jangka panjang Perusahaan. Nilai wajar utang obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar pada tanggal pelaporan keuangan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Komitmen KKS

Sesuai dengan KKS, PT Pertamina EP wajib mengembalikan minimum 10% dari wilayah kerja awal kepada Pemerintah pada saat atau sebelum akhir tahun kontrak ke sepuluh sejak tanggal efektif KKS. Pada tanggal 18 Juli 2013, PT Pertamina EP telah mengembalikan sebesar 18,02% dari wilayah kerja awal kepada Pemerintah.

PT Pertamina EP wajib membayar bonus kepada Pemerintah sejumlah US\$500 dalam 30 hari setelah produksi kumulatif minyak dan gas bumi mencapai 500 MMBOE sejak tanggal efektif KKS (sudah dibayarkan PT Pertamina EP pada Januari 2011), US\$1.000 dalam 30 hari setelah produksi kumulatif minyak dan gas bumi mencapai 1.000 MMBOE sejak tanggal efektif KKS (sudah dibayarkan PT Pertamina EP pada Januari 2015), dan US\$1.500 dalam 30 hari setelah produksi kumulatif minyak dan gas bumi mencapai 1.500 MMBOE sejak tanggal efektif KKS.

Jumlah produksi kumulatif minyak dan gas bumi PT Pertamina EP hingga tanggal 31 Desember 2019 belum mencapai 1.500 MMBOE.

Pada tanggal 31 Desember 2019, PT Pertamina Hulu Energi memiliki 15 komitmen eksplorasi sehubungan dengan kontrak bagi hasil PSC dengan nilai komitmen antara US\$11.750 sampai dengan US\$225.000 dan 11 komitmen eksplorasi sehubungan dengan kontrak *Gross Split* dengan nilai komitmen antara US\$15.550 sampai dengan US\$250.000.

PHI memiliki komitmen pengeluaran dan rencana kerja dengan nilai komitmen antara US\$141.300 sampai dengan US\$703.000 dengan jangka waktu enam tahun sejak tanggal efektif kontrak.

b. Komitmen modal

Grup memiliki komitmen pengeluaran barang modal dalam menjalankan usaha normalnya. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah komitmen pengeluaran barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$359.124.

c. Komitmen sewa operasi - Grup sebagai pihak yang menyewa

Jumlah pembayaran sewa operasi yang tidak dapat dibatalkan berjumlah:

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
Kurang dari satu tahun	557.034	493.867
Antara satu sampai lima tahun	479.413	559.313
Lebih dari lima tahun	58.874	33.284
Jumlah	<u>1.095.321</u>	<u>1.086.464</u>

Grup menyewa beberapa kapal, gedung kantor, kendaraan dan fasilitas IT atas dasar sewa operasi. Sewa umumnya berlaku selama sepuluh tahun, dengan opsi perpanjangan masa sewa.

Pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, beban operasi sewa masing-masing sebesar US\$839.528 dan US\$343.868 (Catatan 31, 35, dan 36).

d. Perjanjian jual beli gas

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan melalui PT Pertamina EP memiliki komitmen untuk mengirimkan gas sebesar 1.005.384 MMSCF kepada beberapa pelanggan. Gas tersebut akan dikirimkan secara periodik dari tahun 2018 sampai 2031.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Perjanjian jual beli gas (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan melalui PHE memiliki kontrak-kontrak perjanjian jual beli gas yang signifikan kepada beberapa pelanggan, dengan volume gas masing-masing kontrak senilai antara 0,8 TBTU hingga 1.418 TBTU. Kontrak-kontrak tersebut akan berakhir antara tahun 2020 sampai 2031.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan melalui PHI memiliki kontrak-kontrak PJBG yang signifikan kepada beberapa pelanggan, dengan volume gas masing-masing kontrak senilai antara 33,27 TBTU hingga 128,43 TBTU. Kontrak-kontrak tersebut akan berakhir antara tahun 2020 sampai 2023.

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan dan PEPC menandatangani kontrak PJBG untuk mengirimkan gas sebesar 172 MMSCFD. PJBG tersebut berlaku efektif selama 20 tahun semenjak tanggal perjanjian atau kemampuan *reservoir* lapangan JTB dengan harga jual gas sebesar US\$6,7 per MMBTU.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan melalui PGN memiliki 55 PJBG dengan wilayah kerja di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua serta masa kontrak selama 1 - 30 tahun. Tahun efektif perjanjian tersebut berkisar dari tahun 2002 sampai tahun 2019 dan tahun berakhir perjanjian tersebut tahun 2019 (yang sedang dalam proses perpanjangan hingga 2021) sampai tahun 2037, berakhir pada saat kuantitas yang diperjanjikan tercapai, atau kombinasi keduanya, yang mana yang lebih dahulu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu, Perusahaan melakukan amandemen penurunan kontrak harga gas dalam perjanjian jual beli gas dengan industri tertentu dan berlaku efektif sejak 30 Januari 2017.

e. Komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang

Perusahaan menandatangani Kontrak Pembelian LNG Jangka Panjang dengan beberapa penjual untuk bisnis niaga LNG sebagai berikut:

Penjual	Tanggal Perjanjian	Jangka Waktu	Minimum Kuantiti (juta ton per tahun)
Corpus Christi Liquefaction, LLC	20 Maret 2015	2019-2040	0,5 – 1,5
Chevron Rapak, Ltd., Eni Rapak Limited, Tiptop Rapak Limited	21 November 2016	2016-2021	0,06 – 0,42
Total Gas & Power Asia Private Limited	21 Desember 2016	2020-2034	0,38 – 1,0
Eni Muara Bakau B.V., GDF SUEZ Exploration Indonesia B.V., PT Saka Energi Muara Bakau	21 Februari 2017	2018-2024	0,5 – 1,4
Woodside Energy Trading Singapore Pte. Ltd.	5 Juni 2017	Tranche A: 2019-2033 Tranche B: 2024-2038	0,07 – 0,57 0,5 – 1,07
Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd.	13 Februari 2019	2025-2034	1,0

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Komitmen kontrak pembelian LNG jangka panjang (lanjutan)

Pada 31 Desember 2019, Perusahaan tidak dapat meyerap pembelian gas setara 5,5 kargo dari ENI Muara Bakau karena tidak terlaksananya penyaluran kepada PLN sebagai pengguna akhir. Manajemen melakukan provisi atas *Take or Pay* sebesar US\$113,715 sesuai dengan estimasi terbaik dan mempertimbangkan belum adanya kepastian volume *make-up* LNG dimasa yang akan datang.

Manajemen telah melakukan estimasi nilai manfaat ekonomis masing-masing kontrak tersebut sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam PSAK 57 mengenai provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi untuk kontrak yang memberatkan (Catatan 2ae) dengan mempertimbangkan beberapa parameter antara lain harga, permintaan dan tingkat diskonto per tanggal pelaporan. Suatu estimasi nilai manfaat ekonomis telah dibangun dan dibandingkan dengan penalti apabila perusahaan tidak menjalankan komitmen sesuai dalam kontrak. Atas nilai yang lebih rendah diakui sebagai provisi, diukur dan disajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi sebesar US\$405.629.

f. Perjanjian pengalihan 10% *participating interest* ("PI")

Pada tanggal 19 Desember 2017 PT PHE ONWJ dan PT Migas Hulu Jabar ONWJ ("MUJ ONWJ") menandatangani perjanjian pengalihan 10% PI di KBH Blok ONWJ dari PT PHE ONWJ ke PT Migas Hulu Jabar ONWJ. Perjanjian tersebut berlaku efektif pada tanggal diterimanya persetujuan dari Menteri ESDM atau pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dalam surat persetujuannya.

Pada tanggal 17 Mei 2018 persetujuan atas pengalihan PI 10% di wilayah kerja ONWJ telah disetujui oleh Menteri ESDM melalui Surat dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas No. 2803/13/MEM.M/2018. Dimana dinyatakan dalam surat tersebut bahwa tanggal peralihan PHE ONWJ kepada MUJ ONWJ adalah sejak tanggal efektif KBH Blok ONWJ.

Pada tanggal 17 Desember 2018, nilai pengalihan PI tersebut ditetapkan melalui Surat dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas No. 3149/12/MEM.M/2018. Nilai pengalihan dihitung dari kewajiban BUMD atas porsi besaran jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) untuk pelaksanaan komitmen kerja pasti dan porsi pembayaran *unrecovered cost* oleh Kontraktor KKS baru kepada Kontraktor KKS lama dengan nilai sebesar US\$43.292.

Pada tanggal 19 September 2018, PHM dan PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam ("MMPKM") telah menandatangani Pokok-pokok Kesepakatan Rencana Pengalihan 10% PI Wilayah Kerja Mahakam, dimana para pihak akan melakukan diskusi yang lebih intensif mengenai ketentuan dan persyaratannya.

Pada tanggal 17 Juli 2019, PHM dan MMPKM telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% PI Pada Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Mahakam dimana diantaranya mengatur tentang kompensasi, mekanisme pembiayaan, pengembalian, dan bagi hasil produksi.

Pada tanggal 12 September 2019 persetujuan atas pengalihan PI 10% di wilayah kerja Mahakam telah disetujui oleh Menteri ESDM melalui Surat dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas No.371/13/MEM.M/2019. Telah dinyatakan dalam surat tersebut bahwa tanggal peralihan PHM kepada MMPKM adalah sejak tanggal efektif KBH Blok Mahakam.

Dimulai sejak tanggal pengalihan, pembayaran bagi hasil produksi yang menjadi bagian MMPKM akan dilakukan oleh PHM setiap bulan, setelah dikurangi bagian MMPKM atas biaya operasi KBH Mahakam dan kewajiban lainnya sesuai dengan KBH.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perjanjian pengalihan 10% *participating interest* (“PI”) (lanjutan)

Dalam hal bagian bagi hasil produksi MMPKM pada bulan berjalan tidak mencukupi bagian biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MMPKM, kekurangan pembayaran biaya operasi tersebut akan diperhitungkan di bulan-bulan berikutnya.

Untuk menjamin pendapatan MMPKM, bagi hasil produksi serta biaya operasi bagian MMPKM dihitung menggunakan persentase provisional untuk setahun penuh. Jika akumulasi biaya operasi yang harus dibayarkan oleh MMPKM ke PHM pada suatu tahun melebihi bagian MMPKMM atas bagi hasil produksi, PHM akan memberikan pembayaran kepada MMPKM sebesar US\$1 (nilai penuh) setiap bulan pada tahun yang berikutnya.

Pada tanggal 7 Agustus 2018, PHE Siak dan PT Riau Petroleum Siak sepakat untuk menandatangani perjanjian pengalihan dan pengelolaan 10% PI sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

g. Sewa BMN

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 92/KMK.06/2008 tanggal 2 Mei 2008 ditetapkan bahwa status aset eks Pertamina Lama yang tidak dimasukkan ke dalam Neraca Pembukaan Pertamina sesuai dengan SK Menteri Keuangan No. 23/KMK.06/2008, adalah Barang Milik Negara (“BMN”) dimana pengelolaan barang-barang tersebut dilakukan oleh DJKN.

Pada tanggal 7 Oktober 2008, SKK Migas menerbitkan surat kepada Menteri Keuangan yang menyarankan bahwa PT Pertamina EP dapat menggunakan BMN secara bebas. Pada tanggal 14 Januari 2009, Menteri Keuangan menolak saran yang diberikan SKK Migas.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan cq. DJKN No. S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Pemerintah menyetujui untuk menerapkan skema sewa atas aset eks Pertamina Lama senilai Rp16.226.357 juta (setara dengan US\$1.444.269).

Berdasarkan risalah rapat tanggal 23 Januari 2009, yang dihadiri oleh Pertamina dan Menteri Keuangan cq. wakil DJKN, disetujui bahwa skema sewa berlaku untuk aset eks Pertamina Lama, kecuali untuk sumur dan tanah senilai Rp6.753.549 juta, dengan jumlah sewa untuk aset yang bersangkutan senilai Rp9.472.808 juta untuk jangka waktu 32 tahun.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-023/C00000/2009-S0 tanggal 6 Maret 2009, ditetapkan tarif sewa aset KKS sementara menunggu ditetapkannya kontrak sewa secara resmi oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp9.472.808 juta untuk jangka waktu 32 tahun atau Rp296.025 juta per tahun.

Dengan dialihkannya aktivitas KKS Pertamina ke PT Pertamina EP, efektif mulai tanggal 17 September 2005 perjanjian sewa tersebut melibatkan PT Pertamina EP. Pada tanggal 12 Desember 2014, Menteri Keuangan menyampaikan surat No. S-837/MK.06/2014 kepada SKK Migas dan menyatakan bahwa biaya sewa BMN diperlakukan sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan.

Sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Keuangan tersebut, Kepala SKK Migas menerbitkan Surat No. SRT- 1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 dan menyampaikan bahwa pada dasarnya SKK Migas dapat menyetujui pembebanan sewa BMN sebagai biaya operasi (*cost recovery*) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu minyak dan gas PT Pertamina EP. Atas dasar hasil inventarisasi aset BMN eks Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Surat Direktur Utama Pertamina No. 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Sewa barang milik negara (“BMN”) (lanjutan)

SKK Migas berpendapat bahwa dasar pengenaan sewa yang seharusnya adalah Rp6.630.929 juta (nilai revaluasi) yaitu aset kategori *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP. SKK Migas kemudian menghitung kembali kewajiban dengan dasar pengenaan sewa tersebut menggunakan metode yang sama dengan Kementerian Keuangan dan menyatakan bahwa kewajiban sewa yang seharusnya adalah Rp2.227.578 juta untuk mulai periode tahun 2003 hingga 30 Juni 2014.

Menindaklanjuti surat SKK Migas tersebut, Pertamina melakukan pembayaran sewa sebesar nilai yang telah disetujui sebagai *cost recovery* oleh SKK Migas melalui mekanisme memperhitungkan kewajiban Pemerintah kepada Pertamina (*offsetting*). Manajemen berpendapat bahwa perjanjian kontraktual sehubungan dengan BMN yang digunakan harus dicatat sebagai sewa pembiayaan.

Pada tanggal 20 September 2016, telah ditandatangani Perjanjian Sewa Barang Milik Negara antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina EP No. PRJ-3-MK.6/2016 dan No. 1307/EP0000/2016-S0 (“Perjanjian”) dengan dasar pengenaan sewa BMN sebesar Rp6.630.929 juta (setara dengan US\$504.560). Berdasarkan Perjanjian tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak akan menagih biaya sewa atas BMN yang tidak digunakan oleh PT Pertamina EP karena BMN tersebut tidak termasuk dalam lingkup Perjanjian. Oleh karena itu, pada tahun 2016, PT Pertamina EP melakukan koreksi atas utang sewa BMN yang tidak digunakan oleh PT Pertamina EP senilai Rp1.527.330 juta (setara dengan US\$112.610).

Pada bulan Desember 2019 dan 2018, PT Pertamina EP melakukan pembayaran atas utang sewa BMN untuk masing-masing periode senilai Rp207 miliar (setara dengan US\$14.820, 2018: US\$14.407) dengan pembayaran terakhir berdasarkan perjanjian sewa No. PRJ-1/MK.6/2019 atau No. 1379/EP0000/2019-S0 antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan PT Pertamina EP.

Pada tanggal 18 Juni 2019, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan No. 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Milik Negara dari Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja Sama Hulu Minyak dan Gas Bumi (“PMK No. 89/PMK.06/2019”). Untuk periode sewa masa depan, metode perhitungan sewa aset akan mengacu pada PMK No. 89/PMK.06/2019.

PHI mengukur nilai wajar biaya pemanfaatan aset kepada Pemerintah dengan menggunakan nilai wajar aset yang digunakan dikurangi dengan faktor penyesuaian dan insentif: a) pemetaan aset; b) penghapusan aset; c) biaya pengamanan; d) pelaporan aset; e) sertifikasi tanah; dan f) realisasi target produksi.

Pendekatan nilai wajar aset untuk PHI diperoleh antara lain melalui *self assessment* dengan mempertimbangkan faktor utilitas dan kapasitas produksi atau melalui hasil *external assessment* oleh Kantor Jasa Penilai Publik.

Dengan dasar PMK No.89/PMK.06/2019, PHI telah menghitung besaran nilai sewa dan telah mencatat kewajiban sewa tersebut pada tanggal 31 Desember 2019.

Aset minyak dan gas bumi eks-KBH ONWJ lama yang dimiliki oleh DJKN digunakan oleh kontraktor KBH ONWJ Gross Split dengan skema sewa.

Pada tanggal 16 Januari 2018 Perjanjian Sewa No. PRJ-1/KN/2018 ditandatangani oleh PT PHE ONWJ dan DJKN untuk periode sewa dari tanggal 19 Januari 2017 sampai 19 Januari 2018 dengan nilai sewa sebesar Rp225.603.000.000 (nilai penuh). Periode sewa dapat diperpanjang berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh PHE ONWJ ke DJKN melalui SKK Migas.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Sewa barang milik negara (“BMN”) (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2018 Perjanjian Sewa No. PRJ-2/KN/2018 ditandatangani oleh PT PHE ONWJ dan DJKN untuk periode sewa dari tanggal 19 Januari 2018 sampai 18 Januari 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp202.650.750.000 (nilai penuh). Periode sewa dapat diperpanjang berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh PHE ONWJ ke DJKN melalui SKK Migas.

Untuk periode sewa Januari 2019 sampai dengan Januari 2020, PHE ONWJ masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) terkait perubahan metode perhitungan sewa aset yang akan diterbitkan oleh DJKN. Untuk masa periode sewa aset akan mengacu pada PMK No.89/PMK.06/2019.

h. Perjanjian sewa, operasi dan perawatan

Pada tanggal 25 Januari 2012, PGN dan Hoegh Lampung menandatangani perjanjian sewa, operasi dan pemeliharaan yang berlaku dari tanggal pengiriman dan berakhir 20 tahun setelah tanggal pengiriman.

Pada tanggal 21 Februari 2014, PLI, PGN dan Hoegh Lampung menandatangani Perjanjian Novasi atas *Amended and Restated Lease, Operation and Maintenance Agreement* dimana hak dan kewajiban PGN terkait dengan perjanjian tersebut di atas beralih ke PLI. Melalui perjanjian novasi tersebut Hoegh Lampung akan menyediakan FSRU Lampung dan melakukan proses regasifikasi selama 20 tahun dengan opsi perpanjangan untuk dua periode masing-masing 5 tahun.

Pada 14 September 2015, PT Kalimantan Jawa Gas (“KJG”), PLN, SEM, PT Bakrie & Brothers, Tbk. dan PC Muriah Ltd. (“PCML”) menandatangani Surat Perjanjian tentang Penerapan Novasi dan Amandemen Perjanjian Transportasi Gas (“GTA Kalija I”) dengan KJG sebagai Transporter, PLN sebagai *Offtaker*, dan PCML sebagai Pengirim. Berdasarkan ketentuan Perjanjian Transportasi Gas, Transporter setuju untuk menyediakan layanan transportasi gas dari lapangan Kepodang ke fasilitas pembangkit listrik PLN di Tambak Lorok.

Perjanjian ini berlaku selama 12 tahun sejak awal sejak tanggal pengiriman gas. Pada 8 Juni 2017, PCML memberikan pemberitahuan tentang *force majeure* tentang Perjanjian Transportasi Gas Kepodang-Tambak Lorok.

i. Perkara hukum

***Class action* atas isu lingkungan hidup di Blok PHE ONWJ**

Sehubungan dengan terjadinya tumpahan minyak di perairan Karawang Jawa Barat yang diduga berasal dari operasi re-entry sumur YYA-1 di blok ONWJ, saat ini Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, sedang melakukan penyelidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan penyelidikan oleh Polda Jabar terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran BUMN tahun anggaran 2019 terkait PHE ONWJ yang melaksanakan kegiatan pengeboran minyak mentah dan pemeliharaan pipa jaringan serta penggunaan anggaran untuk pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak kebocoran minyak mentah di wilayah Karawang Jawa Barat.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, belum ada proses penyelidikan lanjutan oleh Bareskrim Polri dan Polda Jabar. Namun Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas Laporan Polisi tersebut belum diterbitkan.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan Kelompok Terkait Lingkungan Hidup di Blok ONWJ

Gugatan terjadi karena sebagian tumpahan minyak bumi yang diduga berasal dari sumur YYA-1 yang menyebar ke berbagai tempat dan diduga mempengaruhi kehidupan warga di beberapa wilayah.

Sebagian warga yang berdomisili di Teluk Banten (Kota Serang) telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat I dan PHE ONWJ sebagai Tergugat II. Adapun tuntutan penggugat adalah untuk memberikan ganti rugi karena penggugat merasa dirugikan oleh tumpahan minyak sumur YYA-1.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dugaan Tindak Pidana Terkait *Operatorship* oleh PHE WMO

PHE WMO merupakan operator dari Blok West Madura Offshore (“WMO”). Kontraktor lainnya adalah PT Mandiri Madura Barat (“MMB”) dan Kodeco Energy Co. Ltd. (“Kodeco”).

Dalam pelaksanaan operasi minyak dan gas pada KBH WMO, PHE WMO melakukan operasi eksklusif dimana sesuai dengan ketentuan JOA WMO setiap hak dan kewajiban operasi eksklusif akan menjadi milik PHE WMO. Namun selama periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016, pendapatan dari operasi eksklusif turut diterima oleh Kodeco dan MMB secara penuh, selanjutnya PHE WMO memperhitungkan pengembalian pendapatan tersebut melalui tagihan *cash calls* setiap bulannya.

MMB mengklaim bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran *cash calls* untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2016 sebesar US\$16.481. MMB melaporkan PHE WMO ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan melakukan tindak pidana.

Laporan polisi tersebut saat ini dalam proses penyidikan, sebagai bentuk kehati-hatian, PHE WMO telah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan mengajukan permohonan audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) Republik Indonesia untuk melakukan audit atas aktivitas operasi eksklusif.

Sesuai dengan surat BPK No. 175/S/XX/07/2019 tanggal 23 Juli 2019, PHE WMO mengembalikan US\$16.481 kepada MMB. Selanjutnya, PHE WMO dan MMB bersepakat menunjuk auditor independen untuk melakukan audit terkait kewajiban atas kelebihan *cash call* dan kelebihan alokasi pendapatan masing-masing pihak.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perkara hukum (lanjutan)

***Force majeure* pada Perjanjian Gas Transportasi Kepodang - Deklarasi Tambak Lorok oleh PC Muriah Ltd. ("PCML")**

Pada tanggal 8 Juni 2017, PCML memberikan notifikasi perihal adanya keadaan kahar atas Perjanjian Pengangkutan Gas Kepodang - Tambak Lorok.

Karena ketidakmampuan PCML dalam memenuhi komitmen volume gas yang telah disepakati dalam GTA Kalija I, maka sesuai ketentuan GTA Kalija I timbul kewajiban *ship-or-pay* yang harus diselesaikan oleh pihak yang menyebabkan *ship-or-pay* tersebut. KJG telah melakukan musyawarah dengan PCML terkait kewajiban *ship-or-pay* tahun 2016 sejak awal tahun 2017, namun sampai dengan akhir tahun 2017, PCML belum menyelesaikan kewajiban *ship-or-pay* tersebut. Selain itu, PCML juga menyampaikan klaim kahar sesuai surat PCML. Atas klaim kahar tersebut KJG menyampaikan penolakan sesuai surat tanggal 13 Juni 2017, dimana KJG menyampaikan bahwa sesuai GTA Kalija I maka syarat untuk keadaan kahar berlaku adalah adanya penetapan oleh konsultan mandiri yang ditunjuk bersama oleh para pihak yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh SKK Migas.

PCML telah menunjuk Lemigas sebagai konsultan independen untuk memeriksa keadaan kahar tersebut. Namun, KJG menganggap penunjukan dan hasil laporan Lemigas tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam GTA Kalija I.

Dengan belum terpenuhinya syarat-syarat keadaan kahar sesuai GTA Kalija I, maka semua hak dan kewajiban para pihak tetap berlaku khususnya terkait dengan *ship-or-pay*. KJG juga sudah meminta bantuan BPH Migas untuk menjadi mediator atas permasalahan *ship-or-pay* tersebut. BPH Migas mengundang para pihak dalam GTA pada tanggal 20 Maret 2018 dan 8 Mei 2018, namun PCML tidak hadir dalam kedua rapat tersebut. Mengingat KJG sudah melakukan upaya musyawarah dan mediasi, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2018 KJG mengajukan gugatan arbitrase atas belum terpenuhinya kewajiban *ship-or-pay* tahun 2016-2018 serta kewajiban *ship-or-pay* untuk tahun 2019-2026 ke International Chamber of Commerce ("ICC") Hong Kong. PCML telah menghentikan pengaliran gas tanggal 23 September 2019 sehingga sejak tanggal 24 September 2019 tidak ada pengaliran gas melalui pipa KJG. Efektif sejak tanggal 13 Desember 2019, KJG telah melakukan terminasi GTA sesuai surat KJG tanggal 13 November 2019, karena KJG melihat tidak ada itikad baik dari PCML untuk melanjutkan dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur dan disepakati dalam GTA. Terkait terminasi tersebut, KJG telah memasukan gugatan ganti rugi dalam Statement of Claim tertanggal 28 Februari 2020 ke ICC.

Manajemen beranggapan bahwa hasil arbitrase akan berdampak positif terhadap KJG. Arbitrase diharapkan dapat diselesaikan di akhir tahun 2021.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan PT Bakrie Harper Corporation

Pada tanggal 20 November 1996, Perusahaan mengadakan Perjanjian *Build and Rent* berupa Pembangunan, Pengoperasian, Penyewaan, dan Pemeliharaan Pipanisasi Kertapati-Jambi ("Pekerjaan Proyek Pipanisasi") No. SPB-1474A/C0000/96 dengan PT Bakrie Harper (dahulu PT Bakrie Harper Corporation - "Bakrie"). Total Nilai Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan biaya sewa masing-masing adalah US\$144.068 dan US\$16.703 (tidak termasuk PPN). Jangka waktu sewa proyek tersebut adalah 10 tahun dengan tanggal mulai pengembangan proyek pada 19 Mei 1997.

Karena krisis moneter pada tahun 1998, Perusahaan menunda Pekerjaan Proyek Pipanisasi dan menegosiasikan kembali nilai proyek. Pada tahun 2001, kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Deloitte Touche ("Deloitte") sebagai pihak independen untuk mengaudit biaya pasar yang adil dari Pekerjaan Proyek Pipanisasi. Berdasarkan laporan audit Deloitte Touche yang dikeluarkan pada tahun 2001, biaya pasar yang adil dan biaya sewa masing-masing adalah US\$92.125 dan US\$7.616.

Pada tanggal 27 Agustus 2002, Pertamina menunjuk BPKP untuk melakukan uji tuntas untuk mendapatkan nilai pasar yang wajar atas biaya yang dikeluarkan oleh Bakrie untuk proyek tersebut sejak tanggal mulai hingga tanggal ketika pengembangan proyek berhenti. Berdasarkan laporan BPKP yang dikeluarkan pada 23 Desember 2003, tercatat bahwa kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dengan nilai wajar US\$15.394 tidak termasuk kompensasi untuk biaya investasi yang dikeluarkan. BPKP juga mencatat bahwa Proyek Pekerjaan Pipanisasi tidak lagi ekonomis dan tidak layak untuk dilanjutkan.

Pada tanggal 9 Juni 2017, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan kasus ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"). Jumlah yang diklaim oleh Bakrie adalah US\$15.394 untuk pekerjaan kemajuan fisik dan US\$17.307 untuk 14 tahun bunga. Berdasarkan putusan BANI No. 969/VIII/ARB-BANI/2017 tanggal 21 Februari 2018, diketahui bahwa Perjanjian Pekerjaan Proyek Pipanisasi telah berakhir, kemajuan fisik Pekerjaan Proyek Pipanisasi adalah 10,6853% dan Perusahaan harus membayar kepada Bakrie sebesar US\$15.856, yang terdiri dari kompensasi dan total bunga kepada Bakrie masing-masing sebesar US\$15.394 dan US\$462.

Pada tanggal 16 April 2018, Perusahaan menunjuk Kantor Jaksa Pengacara Negara ("JPN") cq Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia ("Jamdatun") untuk memberikan bantuan hukum dan mengajukan gugatan hukum terkait putusan BANI. Perusahaan bersedia untuk menyelesaikan putusan BANI dengan syarat pembayaran yang dilakukan oleh Perusahaan didasarkan pada laporan BPKP dan harus didukung oleh dokumen yang memadai, termasuk hak atas tanah dengan nilai yang sama dengan pembayaran yang akan dilakukan oleh Perusahaan. Gugatan Pembatalan telah diajukan Jamdatun melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun ditolak. Berdasarkan saran dari Jaksa Pengacara Negara, dalam hal Bakrie mengajukan upaya eksekusi putusan BANI, Pertamina memiliki opsi untuk mengajukan gugatan perlawanan atas eksekusi.

Pada tanggal 18 September 2019, Pertamina menerima Relas Panggilan Teguran/Peringatan (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela melaksanakan Putusan BANI ("Teguran") I, yang kemudian berturut - turut Pertamina menerima Teguran II pada tanggal 02 Oktober 2019 dan Teguran III pada tanggal 10 Desember 2019. Pada rentang waktu diterimanya Teguran I, Teguran II dan Teguran III tersebut, secara bersamaan Pertamina dan Bakrie telah melakukan upaya penyelesaian pelaksanaan Putusan BANI dengan poin - poin negosiasi berupa (i) pengurangan kewajiban pembayaran menjadi sebesar US\$12.189 (ii) tidak memperhitungkan bunga dan (iii) Bakrie akan menyerahkan sebidang aset tanah dengan Sertipikat HGB No. 348 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Provinsi Jambi terkait Proyek Pipanisasi Kertapati - Jambi.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Perkara hukum (lanjutan)

Gugatan PT Bakrie Harper Corporation (lanjutan)

Upaya negosiasi ini telah disampaikan pada Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menunggu hasil dari upaya negosiasi tersebut. Setelah mendapat keputusan Direksi Pertamina, maka kesepakatan penyelesaian pelaksanaan Putusan BANI tersebut akan diformalkan dalam suatu Perjanjian.

j. Penugasan PSO untuk penyediaan BBM

Perusahaan memiliki hubungan dengan Pemerintah untuk penugasan PSO untuk memasok produk bahan bakar tertentu (Catatan 1a). Perusahaan dan Pemerintah setuju untuk menggunakan MOPS sebagai dasar harga pasar penggunaan produk bahan bakar untuk menghitung jumlah subsidi. Namun demikian, harga jual eceran untuk produk bahan bakar tertentu yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM selama tahun 2018 dan 2019 tidak dapat mencakup semua biaya untuk pengadaan dan mendistribusikan produk bahan bakar yang mengakibatkan kerugian dari penjualan produk bahan bakar PSO untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

k. Penggantian biaya investasi untuk kontraktor KBH sebelumnya

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26/2017, No. 47/2017, No. 24/2018 dan No. 46/2018 mengharuskan kontraktor PSC baru untuk mengganti biaya investasi tertentu yang dikeluarkan oleh kontraktor PSC sebelumnya yang memiliki belum dipulihkan pada saat PSC berakhir. Jumlah yang akan diganti berdasarkan verifikasi dan persetujuan dari SKK Migas. Berdasarkan surat SRT-0665/SKKMA0000/2018/S4 tanggal 13 Agustus 2018 dari SKK Migas, jumlah yang akan diganti oleh Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS ke kontraktor PSC Sanga-Sanga sebelumnya berjumlah US\$111,9 juta. PHSS tidak setuju dengan jumlah tersebut dan sedang dalam proses mendapatkan bantuan dari lembaga terkait untuk memverifikasi jumlah yang harus dibayar. Pada tanggal 31 Desember 2019, jumlah biaya investasi untuk diganti kepada kontraktor PSC Sanga-Sanga sebelumnya belum diakui.

l. Mekanisme Struktur Pinjaman Wali Amanat (“TBS”)

Pada tanggal 13 Juni 2019, PEPC melalui TBS memperoleh fasilitas pembiayaan berikut untuk pengembangan proyek JTB dengan total fasilitas US\$1.846.400 sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pinjaman Jambaran-Tiung Biru, yang ditandatangani oleh HSBC Bank USA sebagai Wali Amanat, MUFG Bank Ltd. sebagai Agen dan Pemberi Pinjaman, dengan total fasilitas US\$700.000 dari *Tranche A* dan US\$1.046.400 dari *Tranche B*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar LIBOR + margin yang berlaku 2,95% untuk *Tranche A* dan LIBOR + margin yang berlaku 2,15% untuk *Tranche B*.
- b. Perjanjian Wakala Jambaran-Tiung Biru yang ditandatangani oleh HSBC Bank USA sebagai Wali Amanat dan MUFG Bank (Malaysia) Berhad sebagai Agen Investasi, dengan total fasilitas US\$40.000 dari *Tranche A* dan US\$60.000 dari *Tranche B*. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar tingkat bunga LIBOR + margin yang berlaku 2,95% untuk *Tranche A* dan LIBOR + margin yang berlaku 2,15% untuk *Tranche B*.

Pokok pinjaman *Tranche A* akan dilunasi setiap setengah tahun dimulai sejak tanggal 31 Maret 2022 dan pelunasan terakhir pada tanggal 31 Maret 2034. Pokok pinjaman *Tranche B* akan dilunasi setiap enam bulan dimulai sejak tanggal 31 Maret 2022 dan pelunasan terakhir pada tanggal 31 Maret 2029.

Jumlah pinjaman terutang pada tanggal 31 Desember 2019 adalah US\$316.000. Total beban bunga dan biaya komitmen yang terjadi selama tahun berjalan masing-masing sebesar US\$4.450 dan US\$8.709. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan memenuhi batasan-batasan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian pinjaman tersebut. Perusahaan mencatat sisa dana pada akun trustee pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan eksplorasi

Sesuai dengan amandemen *Gross Split* KKS Jambi Merang Blok tanggal 14 Oktober 2019, Perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka Indonesia dengan total pengeluaran komitmen sebesar US\$196.500 untuk 5 (lima) tahun kontrak awal.

n. Proyek RDMP, RU-V Balikpapan, dan proyek Lawe-lawe

Perusahaan telah menandatangani berbagai kontrak yang berhubungan dengan Proyek RDMP RU V Balikpapan dan proyek Lawe Lawe dengan jumlah total kontrak sebesar US\$2.594.596 dan Rp25.894.796 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembayaran dimuka kepada vendor sebesar US\$199.915 (Catatan 14c).

o. Penyisihan untuk pembongkaran dan restorasi untuk PHM, PHSS, PHKT dan PT Pertamina Hulu Energi OSES (“PHE OSES”)

Seperti yang dibahas dalam Catatan 3.b.viii. perusahaan mengakui penyisihan untuk ASR untuk semua aset di area PSC Grup, kecuali untuk anak perusahaan berikut ini, di mana tingkat kewajiban pembongkaran dan restorasi aset masih dalam pembahasan dengan Pemerintah:

- PHM, PHSS dan PHKT: Penyisihan untuk ASR diakui untuk aset yang baru sejak PSC berlaku;
- PHE OSES: Penyisihan untuk ASR diakui untuk aset yang saat ini digunakan oleh PHE OSES.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, diskusi dengan Pemerintah masih berlangsung.

p. Tarif Pemanfaatan kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan Western Buyers (“WBX”) dan Regas

Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam surat No.S-355/MK.6/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Negara Berupa Aktiva Kilang LNG Badak untuk Gas Bumi dari Wilayah Kerja Mahakam Pasca-2017, memberikan persetujuan kepada PHM untuk memanfaatkan kilang LNG Badak untuk pemrosesan gas dari wilayah kerja Mahakam dengan membayar tarif pemanfaatan sebesar US\$0,22/MMBtu, diluar biaya operasi dan pemeliharaan serta pengeluaran kapital (“Surat S-355/2017”).

Namun, Surat S-355/2017 tersebut tidak sejalan dengan persetujuan Menteri Keuangan sebelumnya dalam surat No. S-651/MK.6/2011 tentang Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset Kilang LNG Badak untuk Gas WK Mahakam tanggal 20 Oktober 2011 kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) (“Surat S-651/2011”), yang butir 3.a dalam surat tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan menyetujui pemanfaatan aset tanpa pembebanan sewa terhadap kontraktor KBH yang masih terikat kontrak penjualan LNG (Vico, Total EP, dan Chevron), mengingat kontrak penjualan gas telah ditandatangani oleh Pemerintah dan produsen gas di masa lalu.

Pengecualian dalam Surat S-651/2011 tersebut diberikan kepada kontraktor PSC yang kontrak penjualannya telah ditandatangani sebelum dikeluarkannya Surat S-651/2011 (termasuk kontrak penjualan WBX dan Regas). Pada saat surat tersebut dikeluarkan, Pemerintah belum menetapkan kontraktor wilayah kerja Mahakam pasca-2017. Dengan mempertimbangkan penetapan kontrak wilayah kerja Mahakam saat ini yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018, maka PHM berpendapat bahwa PHM juga berhak mendapatkan pembebasan tarif pemanfaatan karena melanjutkan suplai LNG untuk kontrak penjualan WBX (hingga tahun 2020) dan NR (hingga tahun 2022).

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

48. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Tarif Pemanfaatan kilang LNG Badak untuk kontrak penjualan Western Buyers (“WBX”) dan Regas (lanjutan)

Oleh karena itu, sejak dikeluarkannya Surat S-355/2017 tersebut, PHM, dengan persetujuan SKK Migas, meminta pengecualian tarif pemanfaatan kilang LNG Badak kepada Menteri Keuangan untuk kontrak penjualan WBX dan NR dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Kontrak penjualan WBX dan NR adalah kontrak penjualan yang ditandatangani oleh Pemerintah dan produsen gas di masa lalu, yang mana Menteri Keuangan melalui Surat S-651/2011 pernah memberikan pembebasan biaya untuk pemanfaatan kilang LNG Badak;
- Pemenuhan kontrak penjualan WBX dan NR adalah penugasan Pemerintah kepada PHM sebagai operator wilayah kerja Mahakam pasca-2017 sebagai pelaksanaan komitmen Pemerintah kepada pembeli (berdasarkan *Letter of Intent*, tanggal 26 Maret 2010, tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas pada Blok Mahakam dan Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 16777/15/DJM.B/2012, tanggal 22 November 2012, tentang Jaminan Pasokan LNG untuk FSRU Jawa Barat Pasca-2017). Pemerintah menunjuk PHM sebagai kontraktor wilayah kerja Mahakam pasca-2017 pada tanggal 14 April 2015, dan sebagai konsekuensinya, PHM diwajibkan untuk melanjutkan suplai kepada Pertamina yang bertindak sebagai penjual bagian negara dan kontraktor atas pemenuhan kontrak penjualan LNG WBX dan Regas (berdasarkan Perjanjian Pengembangan LNG Wilayah Kerja Mahakam tanggal 26 Juni 2018 dan Perjanjian Pemasaran, Penjualan, Suplai dan Penanganan *Sales Liabilities* Untuk Penjualan LNG dari Wilayah Kerja Mahakam Kepada Western Buyers tanggal 9 Agustus 2018):
- Pembebanan tarif BMN terhadap kontrak penjualan tersebut tidak diperhitungkan dalam keekonomian harga kontrak pada saat penandatanganan kontrak penjualan;
- Renegosiasi harga kontrak penjualan (karena adanya tambahan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak) tidak diperbolehkan dalam kontrak penjualan tersebut. Apabila dilakukan, maka akan berpotensi pemutusan kontrak oleh para pembeli; dan
- Pengenaan tarif pemanfaatan kilang LNG Badak ini tidak sejalan dengan prinsip dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 yang pada prinsipnya mengatur bahwa skema pemanfaatan hanya dapat diberlakukan atas suatu BMN yang belum atau tidak digunakan secara optimal. Kilang LNG Badak, sejak pengoperasiannya pada tahun 1977 hingga saat ini, masih digunakan secara optimal untuk kegiatan bisnis usaha hulu minyak dan gas oleh Pemerintah dan kontraktor.

Adapun besaran biaya pemanfaatan kilang LNG Badak terkait kontrak penjualan WBX dan NR yang masih disengketakan adalah sebesar:

- US\$29.139 bagian KBH Mahakam atau US\$13.713 bagian PHM (47,0588%) untuk tahun 2018; dan
- US\$29.863 bagian KBH Mahakam atau US\$11.711 bagian PHM (39,2157%) untuk tahun 2019.

Proses negosiasi antara PHM dan Pemerintah masih terus berlangsung yang dilakukan melalui beberapa pertemuan, yang terakhir diantaranya diadakan pada 6 Februari 2020 dan dihadiri oleh LMAN, SKK Migas dan PHM. Hasil pertemuan ini adalah akan direncanakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas kejelasan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak terkait kontrak penjualan WBX dan NR. Pertemuan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada kuartal kedua 2020 antara LMAN, SKK Migas, PHM, PHI, dan akan difasilitasi oleh Tenaga Ahli Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, Grup tidak mengakui biaya pemanfaatan kilang LNG Badak dalam laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN

a. Penerbitan obligasi senior Perusahaan

Pada tanggal 25 Februari 2020, Perusahaan kembali menerbitkan obligasi senior sejumlah US\$1,45 miliar (nilai penuh) yang terdiri dari dua *tranche*. *Tranche* pertama senilai US\$650 juta (nilai penuh) dengan tingkat bunga 3,10% akan jatuh tempo pada tahun 2030, sementara *tranche* kedua senilai US\$800 juta (nilai penuh) dengan tingkat bunga 4,15% akan jatuh tempo pada tahun 2060. Pada saat yang bersamaan, Perusahaan juga melakukan *tender offer* atas obligasi senior yang akan jatuh tempo pada tahun 2021 senilai US\$608 juta (nilai penuh).

Pada tanggal 21 Januari 2020, Perusahaan menerbitkan obligasi senior sejumlah US\$1,5 miliar (nilai penuh) yang terdiri dari dua *tranche*. *Tranche* pertama senilai US\$500 juta (nilai penuh) dengan tingkat bunga 3,10% akan jatuh tempo pada tahun 2030, sementara *tranche* kedua senilai US\$1 miliar (nilai penuh) dengan tingkat bunga 4,175% akan jatuh tempo pada tahun 2050.

b. Kontrak kerja sama wilayah kerja Makassar Straits

Berdasarkan surat Menteri ESDM Republik Indonesia menetapkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Makassar Straits saat ini untuk melakukan pengelolaan operasi sementara Wilayah Kerja Makassar Straits terhitung sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2027. Kontrak Kerja Sama Sementara telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2020.

c. Persetujuan pengalihan *participating interest* di KBH Nunukan

Sehubungan dengan mundurnya Videocon Indonesia Nunukan Inc. ("VINI") dari KBH Nunukan, pada tanggal 5 Februari 2020, PHE menerima surat pemberitahuan dari Perusahaan bahwa Dewan Direksi dan Komisaris Pertamina menyetujui pengalihan *participating interest* yang semula dimiliki oleh VINI di Nunukan, sehingga kepemilikan PHE Nunukan Company di KBH Nunukan bertambah dari 64,5% menjadi 83,77%.

d. Terminasi KBH Blok B - South Jambi

Pada tanggal 25 Januari 2020, periode KBH Blok B - South Jambi telah berakhir. Pemerintah telah menunjuk kontraktor lain untuk melakukan pengelolaan blok tersebut sejak terminasi.

e. Pembatalan biaya administrasi pajak

Perusahaan telah menerima beberapa surat perintah membayar kelebihan pajak pada tanggal 8 dan 28 Januari 2020 terkait dikabulkannya keberatan Perusahaan pada tanggal 3 dan 5 September 2019 atas SKPKB Pajak Penghasilan (PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 15) dan PPN untuk tahun fiskal 2016, masing masing sebesar Rp276.788 juta (setara dengan US\$19.864) dan Rp235.652 juta (setara dengan US\$16.940) dan dikompensasikan dengan utang pajak penghasilan sebesar Rp116 juta (setara dengan US\$9), sisanya diterima oleh Perusahaan masing-masing sebesar Rp276.788 Juta (setara dengan US\$19.864) atas Pajak Penghasilan (PPh 22, PPh 23, PPh 4(2), PPh 15) dan Rp235.536 juta (setara dengan US\$16.931) atas PPN (Catatan 39a).

f. Penarikan tambahan pinjaman untuk proyek pengembangan JTB

Dari bulan Januari 2020 hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, PT Pertamina EP Cepu telah melakukan penarikan tambahan pinjaman dari fasilitas pendanaan untuk proyek pengembangan JTB sebesar US\$151.000.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

g. Volatilitas harga minyak

Pada saat penyelesaian laporan keuangan konsolidasian terdapat kondisi pasar dunia yang tidak biasa sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan kegagalan OPEC-Rusia untuk mencapai kesepakatan dalam membatasi pasokan minyak untuk menyeimbangkan pasar. Akibatnya, pada awal bulan Maret 2020, terjadi penurunan harga minyak mentah yang berkelanjutan. Peristiwa tersebut berdampak pada volatilitas harga minyak mentah. Selain itu dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi global termasuk Indonesia antara lain penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, termasuk penundaan pembayaran oleh pelanggan, dan depresiasi nilai tukar mata uang asing.

Per tanggal 31 Desember 2019, Grup mempunyai aset minyak dan gas bumi, persediaan dan aset finansial tertentu, termasuk piutang dari pihak berelasi dan kontrak LNG jangka panjang, yang rentan terhadap harga minyak yang rendah, penurunan permintaan, dan menurunnya kemampuan pelanggan untuk melunasi piutang, sebagai dampak dari pandemic COVID-19, akan tetapi peristiwa-peristiwa tersebut hanya bersifat indikatif (*non-adjusting events*) yang muncul setelah tanggal pelaporan keuangan, sehingga tidak berdampak pada kesimpulan mengenai jumlah terpulihkan dari aset perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019.

Manajemen akan selalu menjaga portofolio dalam diversifikasi usaha untuk mengantisipasi volatilitas harga dan mengurangi dampaknya. Manajemen selalu menganalisa pergerakan harga minyak dan komoditasnya, dan pengaruhnya terhadap struktur biaya. Manajemen menyiapkan perencanaan strategis dan keuangan dengan berbagai skenario yang mempertimbangkan aspek parameter makro ekonomi. Rencana-rencana tersebut selalu diuji relevansi dan validitas secara periodik, guna mempertahankan kekuatan posisi keuangan dalam menghadapi harga pasar yang dinamis.

h. Peraturan Pemerintah

Pada saat penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Per tanggal 31 Maret 2020. Dalam Bab II Mengenai Kebijakan Keuangan Negara, Bagian Ketiga mengenai Kebijakan di Bidang Perpajakan, pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan terdapat penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap turun menjadi 22% dan berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan 2021, serta menjadi 20% pada tahun 2022. Dengan demikian, pada tahun 2020, jika tidak terdapat perubahan signifikan pada aspek lain di industri, penurunan tarif pajak akan berdampak pada penurunan Pajak Kini dengan catatan penurunan pajak akibat penurunan tarif PPh Badan lebih besar nilainya dibanding *impairment* Aset Pajak Tangguhan.

Pada tanggal 2 April 2020, Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri. Dalam Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Menteri menetapkan Harga Gas Tertentu di titik serah pengguna Gas Bumi (plant gate) dengan harga US\$6/MMBTU. Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik. Dalam pasal 8 ayat 1, disebutkan bahwa Menteri menetapkan harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik (plant gate) paling tinggi US\$6/MMBTU, kecuali ditetapkan lain sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 2. Grup tengah mengkaji dampaknya terhadap aspek komersial, kerja sama bisnis dan rencana pengembangan infrastruktur bersama-sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan SKK Migas. Selain itu, Grup juga akan melakukan peninjauan kembali atas skema biaya transmisi dan distribusi gas untuk mengakomodir Peraturan Pemerintah tersebut.

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

i. Fasilitas *Non-Cash Loan* Regas

Pada tanggal 2 Januari 2020, Regas menandatangani Adendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. KP/037/NCL/12 dengan Bank Mandiri. Berdasarkan perjanjian tersebut, Bank Mandiri berkomitmen untuk menyediakan fasilitas *Non-Cash Loan* sejumlah US\$110.000 dengan nilai jaminan yang harus disetor oleh Regas adalah 0% untuk menunjang kegiatan usaha Regas dengan jangka waktu mulai 27 Agustus 2019 sampai dengan 26 Agustus 2020.

j. Perubahan kontrak utang di M&P

Pada tanggal 16 Maret 2020 M&P menandatangani perjanjian perubahan atas profil pembayaran dua fasilitas utangnya yang meliputi pinjaman bank sindikasi dan pinjaman pemegang saham. Perjanjian juga mencakup penetapan nilai maksimum dividen yang bisa didistribusikan untuk tahun 2021 dan 2022 sebesar masing-masing US\$15 juta (nilai penuh). Tidak ada perubahan lainnya yang terjadi selain dari dua hal di atas.

k. Kasus Pajak Patra Niaga

Pada tanggal 14 Februari 2020, Patra Niaga menerima Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali ("SP2PK") dari DJP atas PPN tahun pajak 2013. Hasil dari putusan MA telah diterima sebagian oleh Patra Niaga di tahun 2019, dengan hasil PK yang ditolak adalah sebesar Rp287.448.308.366 (nilai penuh). Patra Niaga telah membebaskan hasil PK tersebut ke dalam laporan laba rugi tahun 2019 sebesar Rp287.448.308.366 (nilai penuh) atau setara dengan US\$20.678.

Pada tanggal 15 April 2020, Patra Niaga menerima Keputusan DJP terkait pembatalan STP untuk PPN untuk periode fiskal Januari sampai Desember 2016 sebesar Rp125.676.662.228 (nilai penuh) setara dengan US\$8.001, atau Rp518.609.315 (nilai penuh) setara dengan US\$33, lebih kecil dari jumlah yang ditagihkan. Patra Niaga telah membayar dan mencatat Rp29.000.697.539 (nilai penuh) setara dengan US\$1.846, untuk STP di Agustus, Oktober, dan Desember 2016 sebagai estimasi pengembalian pajak. Untuk sisa STP 2016 sebesar Rp97.194.574.004 (nilai penuh) setara dengan US\$6.188, Patra Niaga tidak mengakui adanya laba di dalam laporan laba rugi karena Patra Niaga tidak membayar tagihan dan mengajukan surat keberatan ke DJP.

l. Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-120/MBU/04/2020 tanggal 17 April 2020, David Bingei diangkat sebagai Komisaris baru Perusahaan. Sehingga, susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	Basuki Tjahaja Purnama
Wakil Komisaris Utama	Budi Gunadi Sadikin
Komisaris	Ego Syahril
Komisaris	Alexander Lay
Komisaris	Condro Kirono
Komisaris	Isa Rachmatarwata
Komisaris	David Bingei

PERTAMINA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

49. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

m. Perubahan Susunan Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) No. 11/KPTS/K/DK/2020 tanggal 31 Maret 2020, Agus Prabowo diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Pertamina (Persero) dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) No. 12/KPTS/K/DK/2020 tanggal 28 April 2020, David Bingei diangkat sebagai Ketua Komite Audit PT Pertamina (Persero). Sehingga, susunan Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua	David Bingei
Wakil Ketua	Alexander Lay
Anggota	Agus Yulianto
Anggota	Bonar Lumban Tobing
Anggota	Agus Prabowo

n. Akuisisi Pertamedika atas PT Rumah Sakit Pelni

Berdasarkan perjanjian jual beli saham antara PT Pertamina Bina Medika IHC (PBM-IHC), entitas anak dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (PT Pelni (Persero)) yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 31 Maret 2020, oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., PBM-IHC membeli saham PT Rumah Sakit Pelni dari PT Pelni (Persero) sebanyak 42.721 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dengan harga akuisisi sebesar Rp503,8 miliar (setara dengan dengan US\$30.781).

Berdasarkan pernyataan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang saham PT Rumah Sakit Pelni yang dituangkan di dalam Akta Notaris No. 36 tanggal 31 Maret 2020, oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., PBM-IHC melakukan penyertaan modal PT Rumah Sakit Pelni sebanyak 16.959 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham dengan harga sebesar Rp101 miliar (setara dengan US\$6.171), sehingga kepemilikan PBM-IHC di PT Rumah Sakit Pelni sebesar 51%.

o. Akuisisi Saham PT Tuban Petrochemical Industries yang sebelumnya dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari

Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 149/29/2020, tanggal 23 Maret 2020, PT Pertamina Pedeve Indonesia membeli 7.500 lembar saham PT Tuban Petrochemical Industries yang sebelumnya dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari sebesar Rp129.801.717.000 (nilai penuh) (setara dengan US\$7.816). Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terkait perubahan susunan pemegang saham Tuban Petro diselenggarakan tanggal 27 April 2020. Hingga tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini, legalisasi RUPS tersebut sedang dalam proses.

p. Dugaan Tidak Pidana Terkait Operatorship oleh PHE WMO

Laporan Polisi No. LP/B/0191/I/2020 bertanggal 15 April 2020 terhadap PHE WMO dibuat oleh MMB. Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini proses klarifikasi atas Laporan tersebut sedang berjalan, namun demikian Perusahaan berupaya menghentikan proses Laporan tersebut.

Manajemen PHE WMO berkeyakinan bahwa Laporan tersebut terkait dengan sengketa hukum perdata, yang sewajarnya diselesaikan secara musyawarah atau melalui forum penyelesaian sengketa di arbitrase sesuai dengan Joint Operating Agreement (JOA) pasal 18.2.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi berikut adalah laporan keuangan Entitas Induk PT Pertamina (Persero), yang merupakan informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pertamina (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

**PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	1.954.609	4.567.089
Kas yang dibatasi penggunaannya	3.480	3.344
Piutang usaha		
Pihak berelasi	4.001.404	3.507.946
Pihak ketiga	754.020	1.474.122
Piutang Pemerintah	2.957.032	1.423.038
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	298	3.725
Pihak ketiga	47.707	81.805
Persediaan	5.428.830	5.984.287
Pajak dibayar di muka - bagian lancar	771.402	386.989
Beban dibayar di muka dan uang muka	220.053	250.272
Investasi lainnya	58.506	80.171
Jumlah Aset Lancar	16.197.341	17.762.788
ASET TIDAK LANCAR		
Aset pajak tangguhan	1.156.098	1.166.255
Penyertaan jangka panjang	21.030.733	19.217.870
Aset tetap	9.069.839	8.494.968
Piutang Pemerintah	3.313.801	2.924.148
Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian tidak lancar	279.356	117.803
Uang muka investasi	138.966	-
Aset tidak lancar lainnya	2.805.989	3.085.624
Jumlah Aset Tidak Lancar	37.794.782	35.006.668
JUMLAH ASET	53.992.123	52.769.456

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

**PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019**

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman jangka pendek	995.094	4.247.006
Utang usaha		
Pihak berelasi	4.549.091	3.492.122
Pihak ketiga	3.270.076	2.545.617
Utang Pemerintah - bagian lancar	853.024	1.010.478
Utang pajak		
Pajak penghasilan	-	19.684
Pajak lain-lain	158.809	148.429
Beban akrual	745.762	590.664
Liabilitas jangka panjang - bagian lancar	360.375	388.426
Utang obligasi		
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	11.203	50.382
Pihak ketiga	464.165	563.039
Pendapatan tangguhan - bagian lancar	39.972	5.545
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	11.447.571	13.061.392
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang Pemerintah - dikurangi bagian lancar	356.388	341.659
Liabilitas jangka panjang - dikurangi bagian lancar	568.490	895.214
Utang obligasi	10.699.852	9.197.526
Liabilitas imbalan kerja karyawan	1.633.717	1.542.931
Pendapatan tangguhan - dikurangi bagian lancar	37.305	31.044
Utang jangka panjang lain-lain	467.805	100.969
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	13.763.557	12.109.343
JUMLAH LIABILITAS	25.211.128	25.170.735

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
EKUITAS		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Modal dasar 600.000.000 saham biasa - nilai nominal Rp1.000.000 (nilai penuh) per saham;		
Ditempatkan dan disetor – 171.227.044 saham	16.191.204	16.191.204
Tambahan modal disetor	(924.296)	(924.296)
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	146.578	401.120
Komponen ekuitas lainnya	67.697	607.564
Saldo laba		
- Ditentukan penggunaannya	10.770.470	8.796.357
- Belum ditentukan penggunaannya	2.529.342	2.526.772
JUMLAH EKUITAS	<u>28.780.995</u>	<u>27.598.721</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>53.992.123</u>	<u>52.769.456</u>

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

**PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
Penjualan dan pendapatan usaha lainnya:		
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi, dan produk minyak	35.159.311	35.665.976
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	4.875.075	5.632.468
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak	1.764.090	1.673.026
Imbalan jasa pemasaran	-	15.432
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	1.632.928	3.211.117
JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA	43.431.404	46.198.019
Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya:		
Beban pokok penjualan	(41.927.881)	(44.315.959)
JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA	(41.927.881)	(44.315.959)
LABA BRUTO	1.503.523	1.882.060
Beban penjualan dan pemasaran	(1.901.699)	(1.794.514)
Beban umum dan administrasi	(814.353)	(719.478)
Laba selisih kurs, neto	348.826	9.234
Pendapatan keuangan	1.108.446	149.244
Beban keuangan	(573.343)	(433.646)
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	3.329.069	3.387.233
Pendapatan (beban) lain-lain, neto	(453.798)	249.910
	1.043.148	847.983
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.546.671	2.730.043

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

**PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.546.671	2.730.043
(Beban) manfaat pajak penghasilan		
Pajak kini	(7.172)	(372.999)
Pajak tangguhan	(10.157)	169.728
Jumlah beban pajak penghasilan, neto	(17.329)	(203.271)
LABA TAHUN BERJALAN	2.529.342	2.526.772
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):		
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	(452.733)	234.631
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak):		
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	16.388	(59.338)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	(103.522)	(69.138)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, NETO SETELAH PAJAK	(539.867)	106.155
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	1.989.475	2.632.927

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT PERTAMINA (PERSERO)

ENTITAS INDUK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor	Tambahkan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba		Jumlah Ekuitas
				Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 1 Januari 2018/ 31 Desember 2017	13.417.047	2.736	1.361	(302.976)	790.675	6.871.101	2.540.195	23.320.139
Perubahan atas kepemilikan di PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. dan PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	-	-	-	-	13.710	-	-	13.710
Kapitalisasi uang muka setoran modal	2.774.157	(927.032)	-	-	-	-	-	1.847.125
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-	399.759	-	-	-	-	399.759
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	(59.338)	-	-	-	(59.338)
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(69.138)	-	-	(69.138)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	-	-	-	-	234.631	-	-	234.631
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(614.939)	(614.939)
Alokasi cadangan lain	-	-	-	-	-	1.925.256	(1.925.256)	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	2.526.772	2.526.772
Saldo 31 Desember 2018	16.191.204	(924.296)	401.120	(362.314)	969.878	8.796.357	2.526.772	27.598.721

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT PERTAMINA (PERSERO)

ENTITAS INDUK

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham ditempatkan dan disetor	Tambahkan modal disetor	Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	Komponen ekuitas lainnya		Saldo laba		Jumlah Ekuitas
				Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Ekuitas lainnya	Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 31 Desember 2018	16.191.204	(924.296)	401.120	(362.314)	969.878	8.796.357	2.526.772	27.598.721
Bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya	-	-	(254.542)	-	-	-	-	(254.542)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	-	-	-	16.388	-	-	-	16.388
Penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	(452.733)	-	-	(452.733)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti, neto	-	-	-	-	(103.522)	-	-	(103.522)
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(552.659)	(552.659)
Alokasi cadangan lain	-	-	-	-	-	1.974.113	(1.974.113)	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	2.529.342	2.529.342
Saldo 31 Desember 2019	16.191.204	(924.296)	146.578	(345.926)	413.623	10.770.470	2.529.342	28.780.995

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

**PT PERTAMINA (PERSERO)
ENTITAS INDUK
LAPORAN ARUS KAS**

**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)**

	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	45.760.895	41.339.979
Penerimaan kas dari Pemerintah	5.666.177	6.224.744
Penerimaan kas dari restitusi pajak	40.488	154.758
Pembayaran kas kepada pemasok	(42.077.230)	(37.264.381)
Pembayaran kas kepada Pemerintah	(8.651.601)	(10.521.957)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(21.358)	(349.514)
Pembayaran kas kepada pekerja dan manajemen	(735.297)	(594.693)
Penempatan pada kas yang dibatasi penggunaannya	-	(1.735)
Penerimaan bunga	87.974	123.409
Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	70.048	(889.390)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Hasil dari pelepasan investasi jangka panjang	713.242	708.365
Penerimaan dividen dari entitas asosiasi	730.177	421.950
Pembelian aset tetap	(694.077)	(594.108)
Penempatan penyertaan jangka panjang	(394.724)	(1.171.616)
Pembayaran uang muka investasi	(137.826)	-
Penerimaan pelunasan pinjaman dari entitas anak	257.903	393.778
Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	474.695	(241.631)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari pinjaman jangka pendek	6.504.793	8.100.439
Penerimaan dari penerbitan obligasi	1.498.855	734.407
Pembayaran pinjaman jangka pendek	(9.756.705)	(4.108.701)
Pembayaran pinjaman jangka panjang	(341.360)	(341.349)
Pembayaran dividen	(563.106)	(585.755)
Pembayaran beban keuangan	(558.526)	(516.893)
Pembayaran obligasi	-	(37.649)
Kas neto yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	(3.216.049)	3.244.499
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	(2.671.306)	2.113.478
Efek perubahan nilai kurs pada kas dan setara kas	58.826	(159.185)
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	4.567.089	2.612.796
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.954.609	4.567.089

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

PT PERTAMINA (PERSERO) ENTITAS INDUK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk

Laporan keuangan tersendiri Entitas Induk disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri".

PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Entitas Induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 55, "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Amendemen PSAK No. 4 (2015) memperkenalkan penggunaan metode ekuitas sebagai salah satu metode pencatatan investasi Entitas Induk pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam Laporan Keuangan Tersendiri entitas tersebut.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

2. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2018 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian akun dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019. Rincian akun tersebut adalah sebagai berikut:

	Dilaporkan sebelumnya	Reklasifikasi	Disajikan kembali
<u>Laporan arus kas tersendiri</u>			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan kas dari pelanggan	41.733.757	(393.778)	41.339.979
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi	(495.612)	(393.778)	(889.390)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan pelunasan pinjaman dari entitas anak	-	393.778	393.778
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(635.409)	393.778	(241.631)